

Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah

**Kumaidi
Elsa Monicha
M. Shaleh Hamid
Ferdyanto
Fauziah Nur. H
Zulhendri
Feri Irawan
Fika Reflina**

**Editor:
Dr. Asyari, S.Ag., M.Si**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

**Solusi Masalah
Ekonomi Makro
Perspektif Syariah**

Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah

© Kumaidi, Elsa Monicha, M. Shaleh Hamid, Ferdyanto, Fauziah Nur. H, Zulhendri, Feri Irawan, Fika Reflina

Editor : Dr. Asyari, S.Ag., M.Si.


Layout : Team WADE Publish


Design Cover : Team WADE Publish


Diterbitkan oleh:




Jln. Pos Barat Km. 1 Melikan Ngimput Purwosari
Babadan Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63491

 buatbuku.com

 redaksi@buatbuku.com

 0821-3954-7339

 Penerbit Wade

 [buatbuku](https://www.instagram.com/buatbuku)

Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan Pertama, Juli 2019

ISBN: 978-623-7007-88-3

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfoto-copy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR EDITOR

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemiskinan merupakan problem krusial bagi pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Beragam kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk tujuan mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan dan program tersebut ada yang berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan namun ada pula yang melahirkan kemiskinan baru.

Bentuk-bentuk bertahan hidup (*survival*) dan keluar (*exit*) dari kemiskinan yang dilakukan oleh orang miskin dan rumah tangga miskin dapat diadopsi sebagai instrumen untuk program pengentasan kemiskinan. Dari berbagai hasil penelitian terungkap bahwa dalam bertahan hidup atau keluar dari kemiskinan di tempuh beberapa cara. Menurut Qialun Ye (2006), menyebutkan; pertama; pergi ke daerah lain (*migration*). kedua, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian (*agricultural intensification and divercification*), ketiga, mengaktifkan dan memperluas usaha bidang pertanian (*argricultural intensification and diversification*), keempat, menjalin kontrak kerja pertanian dengan pihak swasta maupun pemerintah (*contract farming*) dan kelima, bekerja di luar bidang pertanian (*off-farm employment in rural area*). Masih di China, Zhengdong Li, (2009) dalam penelitian yang dilakukannya di masyarakat miskin kota (*urban poverty*) di China, ditemukan beberapa strategi bertahan hidup masyarakat miskin. Pertama, merubah struktur konsumsi (*change of the structure consumption*). Bentuk perubahan konsumsi yang dilakukan adalah juga pengurangan pada *non food items*, seperti; pembelanjaan untuk pakaian, peralatan rumah, biaya kesehatan, komunikasi, hiburan, tempat tinggal dan jasa. Juga maksud dari *changestructure consumption* adalah perubahan gaya dan kebiasaan dalam berbelanja dan kebiasaan diet. Strategi ini diyakini dapat membawa dampak jangka pendek (*short-term*) untuk bertahan hidup dan pengurangan kemis-

kinan. Kedua, *partofolio management of tangible assets*. *Tangibles assets* meliputi teaga kerja (labor) dan sumber daya manusia (*human capital*), ketiga, menggunakan intangible assets, meliputi; hubungan kekeluargaan dan *social capital*, keempat, pengurangan investasi pada sumber daya manusia (*reduction on investment in human capital*), kelima, menggunakan asset produktif (*operation of productive assets*) yang meliputi, rumah, mesin cuci, ruangan motor/ garase, dan lainnya, keenam, meningkatkan kekuatan tenaga kerja keluarga (*increase of family labor*) ketujuh; memaksimalkan nilai konversi modal sosial (*maximum value conversion of social capital*).

Menurut Andri Tri Kuncoro, (2008) dengan mempelajari dan meneliti penduduk Miskin Lahan Kering, Gunung Kidul, Yogyakarta, menemukan cara bertahan hidup penduduk miskin desa: Pertama, memperluas lahan pertanian namun tetap dengan tingkat teknologi dan sistem pembagian kerja semula, kedua, intensifikasi pertanian dengan melakukan memadati sebidang tanah dengan semakin banyak tenaga kerja, ketiga; melanggar aturan atau norma yang ada ketika terdapat peluang keuntungan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan pada saat patuh pada norma. Bedriati Ibrahim dan Murni Baheram, (2009) menemukan cara bertahan hidup keluarga miskin dengan pekerja sebagai Pemulung, pertama, meminjam uang ke tetangga, kedua menghemat konsumsi di samaping berhemat sebagian pendapatan ditabung, ketiga, mengikuti julo-julo atau arisan, keempat, dicukup-cukupkan dengan apa yang ada tanpa meminjam, kelima, mengembangkan jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Revallion (2001), dengan melakukan penyesuaian konsumsi mengarah kepada pengurangan protein dan meningkatkan konsumsi karbohidrat mengikuti hukum Angel. (Revallion, 2001). Kedua, selain cara tersebut juga dilakukan pengurangan investasi produktif lainnya (Elfindri, 2005). Ketiga, mengembangkan hubungan sosial dalam berbagai tujuan

dengan bentuk pinjaman dan penjualan asset produktif sehingga menyarankan perlunya adanya intervensi pemerintah (WRD, 2004, Dershem dan Gzirishvill, 1998).

Model-model di atas merupakan temuan berbagai riset yang dapat dimanfaatkan sebagai model pengentasan kemiskinan dengan dikuatkan oleh aturan legal-formal dan berbagai regulasi yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Buku ini merupakan hasil diskusi terhadap bahan kajian mata Kuliah Ekonomi Makro Syariah di Program Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi. Masalah-masalah ekonomi makro, seperti pendapatan nasional, pengangguran dan kemiskinan dibahas dan ditawarkan solusinya dalam perspektif syariah. Buku ini dapat dijadikan rujukan dalam mencermati soal ekonomi makro dan pemecahan masalahnya secara syariah.

Sebagai bagian dari hasil kajian atau bahan diskusi tentu bahasan dalam buku ini memiliki keterbatasan karena permasalahan ekonomi makro bersifat dinamis. Namun kehadiran buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memahami persoalan ekonomi makro dan tawaran ajaran syariah sebagai solusinya, Semoga.

Bukittinggi, Juni 2019
Editor

Dr. Asyari, S.Ag., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR Dr. Asyari, S.Ag., M.Si	5
DAFTAR ISI	9
> <i>Kumaidi dan Elsa Monicha</i> Analisis Pendapatan Nasional Dari Aspek Syariah.....	11
> <i>M. Shaleh Hamid dan Ferdyanto</i> Konsep Uang Dalam Islam.....	51
> <i>Zulhendri dan Feri Irawan</i> Inflasi Dalam Aspek Ekonomi Makro Syariah.....	83
> <i>Fika Reflina</i> Kemiskinan Dalam Aspek Ekonomi Makro Syariah ...	111
> <i>Fauziah Nur . H</i> Pengangguran Dalam Aspek Ekonomi Makro Syariah	145
BIOGRAFI PENULIS.....	183

ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL DARI ASPEK SYARIAH

Kumaidi

Salah Satu Inisiator Dangau Tuo Institute
*Program Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
aaidie8@gmail.com*

Elsa Monicha

Entrepreneur M. Alif Fashion
*Program Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
elmonicha0295@gmail.com*

Latar Belakang

Dari berbagai negara di dunia ini pasti mempunyai konsepsi sendiri mengenai arah dan tujuannya terhadap perkembangan perekonomian. Misalnya dalam memilih corak ataupun sistem perekonomian yang mungkin dirasakan cocok dengan keadaan suatu negara itu sendiri. Dewasa ini kita bisa melihat bahwa semua sistem perekonomian yang ada di dunia, pasti menganut sistem yang melandasi arah dan tujuannya kemana. Misalnya, suatu negara menganut sistem ekonomi kapitalisme, namun ada juga sebagian negara yang memandangi sistem fasisme yang terbaik dan cocok untuk diterapkan, malahan ada pula beberapa negara yang memilih menggunakan sistem ekonomi sosialisme atau bahkan komunisme. Namun saat ini hampir di beberapa negara baik di Asia Tenggara maupun Asia, Afrika serta sebahagian negara yang ada di Eropa dan Amerika

mulai melirik dan mencoba menerapkan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah menjadi ekonomi alternatif setelah tenggelamnya sosialis komunis dan mulai goyahnya sistem ekonomi kapitalis, lalu muncul ekonom muslim yang menawarkan konsep ekonomi yang selalu terikat dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum di setiap praktek ekonomi.¹

Di dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa kajian yang sangat menarik untuk dibicarakan pembahasannya yaitu tentang pendapatan sebuah Negara dalam istilah ilmu ekonomi pendapatan nasional. Karena mengingat pendapatan nasional hingga kini masih dianggap oleh para pelaku ekonomi sebagai pilar utama penyangga politik ekonomi. Artinya, ke arah peningkatan pendapatan nasional itulah hampir semua kebijaksanaan di bidang perekonomian difokuskan.²

Setiap kegiatan ekonomi dalam suatu negara pasti berkaitan dengan pendapatan nasional. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Usaha terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara pasti diarahkan untuk meningkatkan kestabilan pendapatan nasional. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai analisis pendapatan nasional dari aspek syariah, dengan melihat konsep pendapatan nasional dengan segala variabel yang menentukan tingkatnya serta pandangan ekonomi Islam terhadap pendapatan nasional itu sendiri.

Hasil dan Pembahasan Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam

¹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) h.97

²Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro)*... h.99

perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur untuk perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.³

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional bruto dan pendapatan nasional domestik bruto.

Gross National Product (GNP) atau disebut juga dengan pendapatan nasional bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produk si milik warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di luar negeri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam negara tersebut.⁴

Ukuran nilai output seperti barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu Negara dalam satu tahun disebut dengan Pendapatan Nasional. Perannya sangat vital bagi sebuah Negara, karena merupakan

³Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 195

⁴Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 36

tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu Negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu Negara, semakin tinggi penapatan nasional suatu negara maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP Rill dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasusikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP perkapita). GNP/kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh, jika nilai output turun maka akibatnya orang-orang mengurangi jam kerjanya atau menambah waktu istirahatnya.

Sedangkan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yang membedakan adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* merupakan kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenarnya. Dalam Islam esensi manusia ada pada rohani-nya, karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak hanya memenuhi tuntutan fisik jasadiyah melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia.

Pendapatan nasional dalam aspek syariah, dalam Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk pada masalah Negara dan juga pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi –seorang pemikir terkemuka abad ke-5-berpendapat bahwa pelaksanaan *imamah* (*kepemimpinan politik keagamaan*) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam

Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan atau pemasukan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Dari rekaman historis sejarah Islam awal, ditemukan bahwa para perancang keuangan dan pembuat kebijakan mencoba memahami masalah-masalah keuangan yang ada di wilayah taklukan dan menilainya berdasarkan al Quran dan sunnah.

Ada beberapa karya fuqaha terdahulu yang membahas mengenai keuangan publik dan segenap kebijakannya. Satu diantaranya adalah kitab al-Kharaj. Karya monumental ini dinisbahkan kepada ahli fikih dan sarjana besar Qady Abu Yusuf. Dengan daya analisis yang tinggi, Abu Yusuf berusaha menganalisis masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diasopsi untuk kesejahteraan rakyat.

Karya lain yang terkenal adalah al-Amwal. Dari catatan sejarah sekurang-kurangnya ada enam buku dengan judul al-Amwal. Salah satunya adalah karya Abu 'Ubaid, yang membahas masalah keuangan dan pengelolaan keuangan negara dalam konteks historis dan fikih.⁵

Pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam dilihat secara lebih jernih dari 4 hal, yaitu:⁶

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga, GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output perkapita. GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar, artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Padahal

⁵Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 2, 2008, h. 442-443

⁶Muhammad Syahbudi, *Diktat Ekonomi Makro Prespektif Islam*, Medan: FEBI UIN SU Medan, 2018, h.34

kegiatan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan individu. Di dalam penghitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok. Maka untuk lebih mendekati pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah.

2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimana pun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten ke dalam penghitungan GNP. Subsisten ini, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam percaturan perekonomian dunia. Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsisten ini, jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar dan disinilah inti masalah dari distribusi pendapatan.
3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai presentase total konsumsi. Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Prof. William Nordhans dan James Tobin dengan *Measure for Economic Welfare* (MEW), dalam konteks ekonomi Barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan

ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya bergantung pada tingkat konsumsinya. Meski MEW ini diukur dalam konteks barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami.

4. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah adalah penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antar saudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sector tambahan dan jenis tambahan dari aktifitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di Negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi diukur tidak semata mata dilihat dari sisi pencapaian materi atau hasil kuantitas, namun ditinjau juga dari sisi perbaikan agama, sosial, kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dapat dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi.

Konsep Pendapatan Nasional

Dilihat dari konsep pendapatan nasional dibagi atas 6 yaitu:⁷

1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/ *Gross Domestic Product*)
PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan.
2. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/ *Gross National Bruto*)
PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.
Rumus:
$$\text{GNP} = \text{GDP} - \text{Produk netto terhadap LN}$$
3. NNP (*Net National Product*)
NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.
Rumus:
$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Penyusutan}$$
4. NNI (*Net National income*)
NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (*indirect tax*)
Rumus:
$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung}$$

⁷Muhammad Syahbudi, *Diktat Ekonomi Makro*..... h.35

5. PI (*Personal Income*)

PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat yang benar-benar sampai ketangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.

Rumus:

$PI = (NNI - \text{transfer payment}) - (\text{laba ditahan} + \text{iuran asuransi} + \text{iuran jaminan sosial} + \text{pajak perorangan})$

6. DI (*Disposable Income*)

DI adalah pendapatan yang ditera masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

Rumus:

$DI = PI - \text{Pajak langsung.}$

Faktor yang Mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional bisa dilihat dari:⁸

1. Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan bahwa ada hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa yang sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada

⁸Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*,... h.194

tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

2. Konsumsi dan tabungan

Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan dan tabungan sangat erat hubungannya.

3. Investasi

Pengeluaran investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

Ekonomi Islam Mengkritisi Hitungan GDP/GNP Riil Yang Dijadikan Sebagai Indikator Bagi Suatu Kesejahteraan Negara

Pendapatan perkapita bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan tapi hanya mengedepankan sebuah kondisi kebutuhan dalam isu kesejahteraan bukan sebuah kondisi kecukupan. Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Selain harus memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat dan sadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.⁹

Beberapa keberatan penggunaan GDP/kapita sebagai indikator kesejahteraan suatu negara: 1) GNP hanya menilai/menghitung produk-produk yang masuk ke pasar, sedangkan produk yang dihasilkan atau diproduksi dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP. 2) GNP tidak menghitung

⁹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,) h.28

waktu yang digunakan untuk istirahat, padahal pengaruhnya sangat besar dalam kesejahteraan. 3) Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut elas mengurangi kesejahteraan. 4) Kesejahteraan GNP dihitung dengan material scope atau yang tampak saa, misalnya: barang dan jasa seperti gojek/ barang yang jelas-jelas.

Pendapatan dan Pengeluaran Nasional Pada Negara

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah Islam memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan. Di dunia Islam, pemerintahan memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah semata-mata diperoleh dari kekayaan material yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi termasuk juga kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat.

Dalam sistem ekonomi konvensional, sumber penerimaan pemerintah terdiri dari tiga bagian. *Pertama* dan merupakan sumber penerimaan primer, berasal dari pungutan pajak. *Kedua*, berasal dari penerimaan negara bukan pajak. *Ketiga*, adalah hibah atau bantuan dan pinjaman luar negeri. Lebih sistematis dapat dilihat pada tabel 2. 1 berikut:¹⁰

¹⁰Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam...* h. 444

**Tabel 1. Format Tabel
Pos-pos Penerimaan Pemerintah Indonesia**

No	Pendapatan Negara
1	Penerimaan Pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dalam negeri (pajak penghasilan, perseroan, pertambahan nilai, penjualan, dsb) b. Pajak perdagangan internasional
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan sumber daya alam b. Bagian pemerintah atas laba BUMN c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
3	Hibah dan Bantuan Luar Negeri

Pos-pos Pengeluaran Pemerintah Indonesia

No	Pengeluaran negara
1	<ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Negara b. Belanja pemerintah pusat c. Belanja daerah
2	Pembiayaan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Negeri b. Luar negeri c. Tambahan pembiayaan hutang

Sumber: Nota Keuangan, APBN Indonesia 2009

APBN dalam sistem ekonomi konvensional sangat mengandalkan pajak dari rakyat dan hutang, terutama dari luar negeri jika tidak mencukupi. Hal ini bisa dilihat dari Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P 2009 Indonesia sebesar Rp. 848 triliun, di mana 68 persennya adalah dari pajak yaitu sebesar Rp. 609,2 triliun. APBN dalam sistem sekular, pemasukan dari berbagai sumber dilebur menjadi satu tanpa melihat dari mana asalnya apakah dari kepemilikan umum atau negara dan memang demikian adanya aturannya. Setelah

semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara.¹¹

Sumber-Sumber Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Syariah

Sedangkan dalam Islam, walaupun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional (klasik dan neoklasik), namun penggalan sumber-sumber dana didasarkan pada syariah. Terhadap pengaturan pendapatan publik, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara dan bukan milik individu.

Tempat pengumpulan dana disebut Baitul Mal atau bendahara negara. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawy*), Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Adapun secara terminologis (*ma'na istilahy*), sebagaimana uraian Abd alQadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwal fi Daulat al-Khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: *al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

Di setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal.

¹¹Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam...* h. 445

Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum. Saat itu, Baitul Mal dipusatkan di Masjid Nabawi, sehingga pada masa pemerintahan Rasulullah masjid selain digunakan sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus tempat tinggal Rasulullah. Harta-harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dalam waktu singkat kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Mengenai sumber pendapatan negara (*Baitul Mal*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: *pertama*, bersumber dari kalangan muslim (zakat, zakat fitrah, wakaf, *nawaib*, sedekah dan *amwal fadla*). *Kedua*, penerimaan yang bersumber dari kalangan nonmuslim seperti *jizyah*, *kharaj* dan *ushur*. Dan *ketiga*, penerimaan dari sumber lain seperti *ghanimah*, *fai'*, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.

Lebih lengkap dapat dilihat pada:

Tabel 1. 2
Sumber Penerimaan Negara Periode Rasulullah dan
Khulafaur Rasyidin

No	Sumber Penerimaan	Tahun Mulai Dikumpulkan
1	Zakat	Diperintahkan tahun 2 H dan diwajibkan tahun 9 H
2	Jizyah	Setelah tahun 7 H
3	Kharaj	Setelah tahun 7 H
4	'Ushur	Setelah tahun 7 H
5	Nawaib	-
6	Pinjaman	-
7	Wakaf	Tahun 4 H, melalui penaklukan Bani Nadhir
8	Fai'	Tahun 7 H atau 8 H
9	Khums	Tahun 2 H, setelah perang Badar
10	Amwal Fadla	-
11	Kaffarah	-

Sumber: Diolah dari beberapa literatur

Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw. tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada tahun kedelapan Hijriyah.¹²

Pertama, zakat. Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan. Zakat merupakan unsur penting karena sistemnya penunaianya yang bersifat wajib (*obligatory zakat system*), sedangkan tugas negara adalah sebagai 'âmil dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan perimbangan harta di antara sesama masyarakat. Dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat. Negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya. Mencoba memperbandingkan dengan sistem konvensional, maka pemasukan zakat sangat tergolong kecil. Meskipun demikian, negara Islam tidak berada pada posisi yang terbebani, karena secara mendasar, sistem zakat telah secara langsung dan signifikan telah mengurangi beban negara dari spesifikasi syariat yang ada dalam aturan aplikasinya, yaitu menanggulangi kecenderungan negatif dan pengangguran, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Di lain sisi, zakat merupakan ujung tombak pertama dari negara yang berfungsi untuk menjamin kebutuhan minimal rakyat.¹³

Kedua, *ghanîmah*. *Ghanîmah* merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil *ghanîmah* secara khusus diatur langsung dalam Alquran surah al-Anfâl ayat. Empat perlima dibagi kepada para

¹²Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam...* h.446

¹³A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997,) h.249

prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan seperlimanya sendiri diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Dalam konteks perekonomian modern, pos penerimaan ini boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara sebagai barang *ghanîmah*.¹⁴

Ketiga, *khumus*. *Khumus* atau seperlima bagian dari pendapat *ghanîmah* akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah dan kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Meskipun demikian, perlu hati-hati dalam penggunaannya karena aturan pembagiannya telah jelas, seperti pada ayat di atas. *Khumus*, juga bisa diperoleh dari barang temua (harta karun) sebagaimana terjadi pada periode Rasul. Ulama Syiah mengatakan bahwa sumber pendapatan apa pun harus dikenakan *khumus* sebesar 20%. Sedangkan ulama sunni, beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. 'Uman Abû 'Ubayd menyatakan bahwa yang dimaksud *khumus* itu bukan hasil perang saja, tapi juga barang temuan dan barang tambang. Dengan demikian, di kalangan ulama sunni ada sedikit perkembangan dan memaknai *khumus*.¹⁵

Keempat, *fay'*. *Fay'* adalah sama dengan *ghanîmah*. Namun bedanya, *ghanîmah* diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan, *fay'* tidak dengan pertumpahan darah. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta *fay'* adalah pendapatan negara selain dari zakat. Jadi termasuk di dalamnya: *kharâj*, *jizyah*, *ghanîmah*, '*usyur* dan pendapatan-pendapatan dari usaha komersil pemerintah. Definisi ini lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer saat ini yang strukturnya cukup berbeda dengan keadaan pada masa Rasulullah.

Kelima, *jizyah*. *Jizyah* merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-Muslim yang mampu.

¹⁴Muh. Fudhail Rahman, *Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*, Jurnal al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013, h.245

¹⁵A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah...* h.250

Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus memenuhi kebutuhan pendidik bukan Muslim tersebut akibat ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela dalam pemerintahan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pertama dari negara. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatas hanya kepada penduduk Muslim saja. *Jizyah* ini bisa disebut pula dengan istilah pajak perlindungan. Ketika non Muslim hidup dengan tenang dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah Islam, maka dengan *jizyah* tersebut bisa menjadi imbalannya.

Surat al-Taubah: 29 yang menjadi landasan bagi *al-jizyah* diturunkan setelah Nabi SAW. Melakukan hijrah umumnya para ahli tafsir mengajukan keunggulan dan kemuliaan Islam sebagai alasan penarikan *al-jizyah* terhadap umat agama lain yang dianggap sebagai ajaran yang rendah dan sesat.

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.

Perlindungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat.

Sementara itu, ahli fikih mazhab Syafii dan Ibn al-Qayyim menafsirkan *al-sighar* dengan kepatuhan pada ketetapan hukum Islam. Artinya, penduduk yang ditaklukkan harus mengikuti berbagai ketentuan hukum Islam. Penarikan *al-jizyah* terhadap laki-laki dewasa non muslim yang mampu, secara khusus menunjukkan tidak adanya hubungan keimanan dalam pengadaan

al-jizyah. *Al-jizyah* hanya mempertimbangkan aspek kesejahteraan warganegara.

Dalam zakat penyatuan pajak menghendaki adanya kewenangan pengelolaan zakat oleh Departemen Keuangan. Untuk itu, zakat terlebih dulu harus dipahami sebagai kewajiban sosial umat Islam. Zakat harus diletakkan dalam wacana *mu'amalah* daripada ibadah sebab zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spirituil.

Nash yang menjelaskan zakat, baik mengenai sumber maupun distribusinya, terbuka untuk dilakukan ijtihad interpretatif. Ijtihad tersebut harus diupayakan sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapi. Berangkat dari pemahaman zakat sebagai wacana sosial, pemerintah Negara Indonesia dapat menjadikan zakat sebagai sumber penerimaan negara. Hanya saja, distribusi zakat tersebut harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat bawah, baik muslim maupun non muslim. Untuk itu, dana zakat zakat harus dipisahkan dari sumber penerimaan yang lain. Adapun sumber yang lain, seperti gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan sebagainya.¹⁶

Keenam, *kharâj*. *Kharâj* merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, *kharâj* sebagai pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah dari *kharâj* bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. *Kharâj* adalah pajak terhadap tanah, yang bila dikonversi ke Indonesia, ia dikenal sebagai Pajak Bumi dan

¹⁶Supangat: *Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Economica*, Volume IV, Edisi 2, 2013, h.101-105

Bangunan (PBB). Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara sistem *kharâj* dan sistem PBB adalah *kharâj* ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas dari tanah (*land productivity*) dan bukan berdasarkan zona sebagaimana dalam aturan sistem PBB (*zona strategi*). Hal ini bisa jadi dalam sistem *kharâj*, tanah yang bersebelahan, yang satu ditanami buah kurma dan tanah lainnya ditanami buah anggur, mereka harus membayar *kharâj* yang berbeda. Yang menentukan jumlah besar pembayaran *kharâj* adalah pemerintah. Secara spesifik, besarnya *kharâj* ditentukan berdasarkan tiga hal, yaitu: karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman (termasuk *marketability* dan *quantity*) dan jenis irigasi. *Kharâj* ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang Muslim maupun orang-orang non-Muslim.¹⁷

Pertama, *'usyur*. *'Usyur* merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Pada masa Rasul, *'usyur* hanya dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah Saw. berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara. Ia menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan pelbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah Muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang. Menurut 'Umar ibn al-Khaththâb, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor negara Islam kepada negara yang sama juga dikenakan pajak ini. Dan jika dikenakan besarnya juga harus sama dengan tarif yang diberlakukan negara lain atas barang Islam yang diekspor.

Kedua, infak, sedekah dan wakaf. Infak, sedekah dan wakaf merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridha Allah Swt. semata.

¹⁷Muh. Fudhail Rahman, *Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*, Jurnal al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013, h.247

Namun, oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proyek-proyek pembangunan Negara. Penerimaan ini sangat tergantung pada kondisi spiritual masyarakat secara umum. Diyakini ketika keimanan masyarakat begitu baik, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan besar. Sebaliknya jika keimanan masyarakat buruk, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan relatif kecil. Ketiga, lain-lain. Masa Rasul, selain diperoleh dari pendapatan primer, ada pula yang didapatkan dari peroleh sekunder.

Ketiga, *nawaib*, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.

Keempat, *amwâl fadhîlâ*, yaitu bersumber dari harta kaum Muslimin yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Atau bisa pula bersumber dari kaum muslimin yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa ada kabar berita maupun wasiat.

Kelima, bentuk lain bisa diperoleh dari kurban dan *kaffârah*. Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel seperti warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah, atau hadiah dari negara sesama Islam serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.¹⁸

Dalam konteks ekonomi modern saat ini, tentu saja negara akan memiliki pos penerimaan yang cukup variatif. Misalnya berupa penerimaan devisa dan berupa keuntungan dari badan usaha milik negara (BUMN). BUMN tersebut tentu saja harus dikelola secara profesional dan efisien sehingga dapat mendatangkan hasil yang optimal. Dalam khasanah ideal pemerintah Islam, pengelolaan usaha-usaha milik negara tidak melibatkan penguasa secara langsung dalam kegiatan perekonomian pasar. Hal tersebut akan cenderung membuat pasar tidak berjalan secara wajar dan efisien.

¹⁸A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah...* h. 253

Praktik kolusi, korupsi dan nepotisme relatif akan terjadi, jika para pemimpin atau pejabat negara juga berperan sebagai pelaku pasar. Abû Bakr al-Shiddiq, sebagai khalifah pertama, pernah mengingatkan sahabatnya 'Umar ibn al-Khaththâb untuk tidak berniaga (bertani), karena cukup baginya upah sebagai pejabat negara yang diberikan oleh *bayt al-mâl* kepadanya. Abû Bakr al-Shiddiq menyadari betul bahwa sukar bagi siapapun untuk dapat berlaku adil dan maksimal pada masing-masing perannya, jika pada saat yang sama seseorang berperan ganda, sebagai pemegang otoritas politik dan sebagai saudagar.¹⁹

Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Nasional dari Berbagai Negara

1. Arab Saudi

Arab Saudi merupakan sebuah negara yang pemerintahannya berbentuk kerajaan. Arab Saudi membawahi dua kota suci bagi umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Sejak zaman Rasulullah, negeri tempat berdirinya Ka'bah itu mendapat tempat istimewa di hati umat Islam di seluruh dunia. Dalam beberapa bidang, misalnya pengelolaan zakat, Arab Saudi lebih progresif dibanding negara lain. Zakat dan pajak dikelola dibawah Kementerian Keuangan dan untuk itu dibentuk badan khusus yang bernama *Department of Zakat and Income Tax (Mashlahah az-Zakaah Wa ad-Dakhl)*.

Pengelolaan zakat dilihat berdasarkan Undang-undang di Arab Saudi berlaku mulai tahun 1951 M. Sebelumnya pelaksanaan zakat tidak diatur oleh Undang-undang. Pelaksanaan zakat oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan pada Keputusan Raja (*Royal Court*) No 17/2/28/8634 tertanggal 7 April 1951 M (29/6/1370 H) dimana menetapkan sistem wajib zakat (*zakat syar'i*). Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan sesuai

¹⁹Muh. Fudhail Rahman, *Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam...* h.248

dengan ketentuan syariah Islam dan diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi.

Dalam perkembangan peraturan berikutnya pemerintah Arab Saudi juga membolehkan bagi *Muzakki* individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengah dari pembayaran zakatnya dan sisanya harus disetorkan ke Kementerian Keuangan melalui *Department of Zakat and Income Tax*. Sedangkan untuk *Muzakki* perusahaan harus menyeter semua kewajiban zakatnya ke Kementerian Keuangan juga melalui *Department of Zakat and Income Tax*.²⁰

Berdasarkan Keputusan Raja, zakat diberlakukan bagi setiap warga Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Arab Saudi. Penghimpunan zakat di negara tersebut diterapkan pada semua jenis kekayaan. Kewajiban pembayaran zakat bagi warga Muslim terutama zakat perusahaan dengan pengelolaan yang tersentral pada *Department of Zakat and Income Tax* memastikan bahwa kewenangan resmi untuk menghimpun zakat hanya pada pemerintah. Warga Muslim yang telah membayar zakat tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga warga tidak dibebani dengan kewajiban ganda (*double tax*). Salah satu keunggulan dalam pengelolaan zakat di Arab Saudi adalah pengumpulan zakat dan pajak telah menggunakan sistem online. *Department of Zakat and Income Tax* di negara tersebut memiliki pusat data dan informasi yang lengkap dan didukung perangkat ICT (*Information and Communication Technology*). Dan 70 persen dari penerimaan lembaga tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Arab Saudi.

Berdasarkan Keputusan Raja juga, Zakat hanya diwajibkan kepada warga Arab Saudi dan sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, sebelumnya telah ada keputusan tentang zakat, yaitu keputusan Raja tentang pajak pendapatan bagi bukan

²⁰Murtadho Ridwan, *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*, Ziswaf, Vol.1, No.1, Juni 2014... h.135

warga Arab Saudi. Hal ini berarti bahwa bagi warga non Arab Saudi tidak membayar zakat tetapi diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sementara itu untuk warga Arab Saudi mereka hanya diwajibkan membayar zakat yang keduanya diurus oleh *Department of Zakat and Income Tax*. Hal ini kemudian juga berimplikasi munculnya pandangan warga Arab Saudi yang mengidentikkan zakat dengan pajak. Karena system yang dibangun untuk penghimpunan tersebut identik dengan system penghimpunan pajak pendapatan. Pada awalnya antara nilai pembayaran zakat yang dibayarkan seseorang dengan nilai pajak pendapatan masih lebih tinggi nilai pembayaran zakat, karena awalnya pajak hanya sekedar formalitas.

Sehingga karena relatif besarnya pembayaran zakat tersebut, akhirnya muncul kebijakan dibolehkannya zakat individu disalurkan sendiri maksimal 50 persen. Pada perkembangan berikutnya terjadi perubahan peraturan pajak pendapatan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Pajak pendapatan mengacu pada laba yang dihasilkan, selain itu prosentase pajak pendapatan juga dinaikkan. Hal ini kemudian mengakibatkan nilai pembayaran pajak pendapatan lebih tinggi dibanding nilai pembayaran zakat.²¹

Hal ini mendorong warga Muslim yang bermukim di sana dan kebanyakan mereka adalah warga Teluk, mengajukan permohonan kepada pemerintah Arab Saudi agar mereka pun diwajibkan membayar zakat saja sebagai pengganti pajak pendapatan. Akhirnya hal tersebut disepakati oleh pemerintah Arab Saudi dengan Keputusan Raja yang kemudian ditetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada warga Arab Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Negara tersebut.

Telah disebutkan di atas bahwa zakat diterapkan pada semua kekayaan. Zakat pertanian misalnya dikelola oleh komisi bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian

²¹Murtadho Ridwan, *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim...* h.135

Dalam Negeri yang disebut dengan “*Awamil al-Khirsch*” (ahli taksir), yaitu komisi khusus yang bertugas melakukan penaksiran hasil pertanian. Mereka akan datang ke petani pada saat akan panen dan menaksir hasil panen yang ada di kebun atau sawah petani. Lalu petugas menerbitkan kupon yang dibagikan kepada *Mustahik* zakat dan setelah waktu panen tiba maka *Mustahik* menukar kupon tersebut ke petani. Petugas penaksir hanya melaporkan hasil taksirannya kepada Kementerian Keuangan. Hal yang serupa juga dilakukan pada ternak, petugas permungutan zakat ternak datang ke pelosok-pelosok daerah yang kemudian melaporkan semua hasilnya ke Kementerian Keuangan.²²

Demikian halnya dengan zakat perdagangan, zakat simpanan uang dan zakat pendapatan. Yang termasuk kategori zakat pendapatan di Arab Saudi adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan dan para pegawai termasuk juga seniman, penghasilan hotel dan biro travel. Semua jenis asset dan pendapatan tersebut akan dipotong dari *account*-nya masing-masing jika telah mencapai nishab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing masing. Sedangkan untuk pendistribusiannya, pemerintah Arab Saudi lebih berfokus pada penyediaan jaminan sosial bagi warganya. Hal ini didukung juga adanya kewenangan pendistribusian zakat yang berada pada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial.

Penentuan *Mustahik* ditentukan oleh kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian tersebut dengan nilai santunan kurang lebih 6 ribu Reyal per tahunnya. Kebijakan yang menarik dan inspiratif adalah adanya penetapan zakat atas perusahaan pemerintah (BUMN), yang pada dasarnya tidak ada zakat untuk perusahaan pemerintah, karena semua hasil perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan umum dan Negara.

²²Murtadho Ridwan, *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim...* h.136

Tetapi kemudian hal itu juga diperkuat keputusan Majelis Tinggi Qhadhi yang memfatwakan bahwa perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta juga harus membayar zakat. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum.²³

2. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu contoh unik dalam sistem pengelolaan zakat, di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah. Menurut konstitusi wilayah, semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing dari 14 wilayah yang dikelola oleh Majelis Agama Islam setiap wilayah.

Dengan demikian, setiap wilayah memiliki Undang-undang pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lain. Hal tersebut ternyata menimbulkan beberapa permasalahan koordinasi antar wilayah dimana terdapat perbedaan penentuan *nishab*, harta wajib zakat dan bahkan definisi dari delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Meskipun demikian, secara yuridis perundangan zakat di Malaysia merupakan salah satu yang terbaik dari segi kejelasan dan kerincian mengenai berbagai metode dan prosedur yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat.

Sebelum tahun 1980, zakat hanya diwajibkan atas hasil tani seperti beras, meskipun berat *nishab* yang ditetapkan tidak seragam di semua wilayah persekutuan. Pada tahun 1989, Rumah Zakat pertama didirikan bagi pemerintahan daerah 14 wilayah. Pada tahun 1986, regulasi mengenai implementasi zakat diterbitkan dan menjadi landasan pengelolaan zakat bagi seluruh wilayah negeri di Malaysia.

Kemudian Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 dalam rangka mensosialisasikan zakat

²³Murtadho Ridwan, *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim...* h.136

untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan dampak dari zakat. Hasilnya mengesankan, dimana penerimaan zakat melonjak enam kali lipat dari jumlah yang dikumpulkan sebelumnya.

Bahwasanya hal ini ingin menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan sangat efektif. Sebelum adanya PPZ, masyarakat menganggap bahwa kewajiban pembayaran zakat sudah lunas dengan pembayaran zakat fitrah. Ada lima tujuan utama PPZ didirikan oleh pemerintah Malaysia sebagai lembaga zakat, lima tujuan tersebut adalah:²⁴

- 1) Meningkatkan jumlah penghimpunan zakat.
- 2) Meningkatkan jumlah pembayar zakat dari tahun ke tahun.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajemen professional sejalan dengan teknologi.
- 4) Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ditawarkan
- 5) Menambah lingkungan kerja yang Islami.

Setelah adanya kampanye dan sosialisasi zakat secara intensif, tingkat pengumpulan zakat harta meningkat. Meskipun demikian, banyak yang menilai bahwa mekanisme penalti masih harus diterapkan. Secara umum, Undang-undang mengenakan penalti sebesar 1.000 ringgit dan/atau penjara selama enam bulan jika terbukti adanya penyelewengan pembayaran zakat. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih membayar penalti daripada membayar zakat secara periodik. Hal ini tentu perlu diatasi dengan berbagai kerangka kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Oleh karena itu, pada tahun 2004, Malaysia meresmikan Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) yang bernaung di bawah Departemen Perdana Menteri. Sistem pengelolaan zakat

²⁴Murtadho Ridwan, *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim...* h.137

di Malaysia dapat dikategorikan dalam tiga jenis; *pertama*, sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi. Sistem ini diterapkan di wilayah Selangor, Sarawak dan Penang. *Kedua*, sistem semi korporasi, dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian. Mekanisme ini diterapkan di Malaka, Negeri Sembilan, Pahang dan wilayah federal. *Ketiga*, pengelolaan zakat secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau Majlis Ugama Islam, sistem ini diterapkan pada wilayah selain yang telah disebutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Selangor, Sarawak dan Pahang menunjukkan perbaikan dan peningkatan berbagai aspek yang menyangkut pengelolaan zakat.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat secara korporasi lebih berhasil di Malaysia. Adapun hubungan zakat dan pajak di Malaysia, maka regulasi yang berlaku di Negara tersebut menetapkan bahwa zakat dapat mengurangi kewajiban pajak. Hal itu berlaku jika *Muzaki* membayarkan zakatnya ke lembaga zakat yang diakui oleh kerajaan seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Selangor dan yang lain. Jadi, jika seorang *Muzaki* membayarkan zakat ke PPZ, maka zakat yang telah dibayarkan bisa mengurangi beban pajak yang ditanggung.²⁵

Pengelolaan dan Pembangunan Pondasi Ekonomi Rasulullah Pasca Hijrah Ke Madinah

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah Rasulullah saw. mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama.

²⁵Murtadho Ridwan, *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim...* h.139

Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau.²⁶

Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Dalam waktu yang singkat beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari para pengikutnya, namun jumlah hari demi hari semakin meningkat. Hampir seluruh penduduk kota Madinah menerima Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, tak terkecuali orang-orang Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh jazirah Arab.

Di Madinah, Rasulullah mula-mula mendirikan majelis syura, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggungjawab mencatat wahyu. Pada tahun 6 Hijriyah Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah dibangun. Rasulullah juga telah mengutus utusan ke pemimpin negara-negara tetangga. Orang-orang ini mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh. Pada dasarnya, orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan orang-orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Setelah Makkah telah dikuasai kaum muslimin, jumlah delegasi yang

²⁶ Ririn Noviyanti. *Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis*. Iqtishodia, Vol. 1, No.1, Maret 2016. h 96

datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah. Tentara secara formal juga belum terbentuk. Ketika diseru untuk berjihad, semua muslim yang mampu dianjurkan untuk menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang (*ghanimah*).

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut, untuk menghilangkan riba ini, al-Qur'an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribusikan kepada para fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), muallaf dan lain-lain. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas persentase zakat untuk barang-barang yang berbeda-beda. Tatanan ekonomi negara madinah sampai tahun keempat hijrah, pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil. Kekayaan pertama datang dari banu Nadzir, kelompok ini masuk dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah saw. Nabi meminta mereka meninggalkan kota Madinah, akan

tetapi mereka menolaknya, Nabi pun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Pada akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Bani Nadzir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah saw, sebagaimana ketentuan yang sampaikan Allah SWT dalam al-Qur'an, kaerena mereka mendapatkan tanpa peperangan. Rasulullah pun membagikan tanah-tanah ini kepada kaum fakir miskin dari golongan anshar dan muhajirin. Sedangkan bagian Rasulullah diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya.

Aset pemerintahan Islam Madinah juga didapat dari Khaibar, yang telah ditaklukkan pada tahun ke-7 hijrah. Setelah pertempuran satu bulan mereka menyerah dengan syarat tidak meninggalkan tanah mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Mereka meminta izin untuk tetap tinggal di Khaibar. Rasulullah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kepada mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Sahabat Nabi bernama Abdullah Rawabah biasanya datang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak. Hal itu terus berlangsung selama masa pemerintahan kepemimpinan Rasulullah SAW. dan Abu Bakar al-Shiddiq. Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam pendapatan yang didapatkan oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil. Di antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumber-sumber, diantaranya: rampasan perang (*ghanimah*), tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, *khumuz atau rikaz* (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), *wakaf, nawaib* (pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, *amwal fadhla* (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), *zakat fitrah, kaffarat* (denda atas kesalahan yang dilaku-

kan seorang mislim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para sahabat yang tidak mengikat.²⁷

Eksistensi Madinah sebagai kekuatan ekonomi, agama dan politik dan perpaduan antara keragaman ideologi adalah satu tradisi baru dalam peradaban manusia yang sebelumnya tidak ada dan tidak dikenal, apalagi dalam konteks kebudayaan bangsa Arab. Kelahiran pemerintahan Islam Madinah di jazirah Arab telah membawa revolusi rohani (mental) dan pemikiran yang memproyeksikan pembangunan tata dunia baru yang dipijakkan pada kekuatan moral dan ditumpukan pada kekuatan agama dalam membentuk etika baru di mana kekuasaan dipandu oleh akhlak, persamaan dan saling menghormati yang begitu mendalam. Madinah dengan caranya sendiri telah berusaha dan menjelma menjadi negara baru yang dihuni oleh penduduk egaliter yang semangat, spirit perjuangan dan cita-citanya masih terasa sampai sekarang.²⁸

Segi ekonomi masyarakat yastrib ketika itu masih sangat terlihat klas-klas sosial dimana orang-orang yahudi yang menguasai perdagangan, sedangkan kaum Anshar sebagian besar adalah petani. Berbeda lagi dengan kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah yang belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan termasuk Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut nabi membangun masjid sebagai tempat tinggal sekaligus tempat ibadah untuk mempersatukan orang Islam ketika itu. Dan di masjid inilah nabi mengatur strategi bersama kaum muslimin untuk secara bersama-sama membina masyarakat baru dengan cara menjalin kerja sama dan

²⁷Kharidatul Mudhiiah. *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Jurnal Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015. h 199

²⁸Abdul Mukti Thabrani, *Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014, h.14

saling menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, turunlah syari'at zakat dan puasa, yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggung jawab social, baik secara material maupun moral. Dengan dana dari zakat kehidupan sosial dapat meningkat dan dengan puasa secara ekonomis menekan tingkat konsumsi, sehingga modal masyarakat bias berkembang dan tingkat solidaritas sosial lebih tinggi.²⁹

Tata kelola ekonomi dan keuangan yang berlandaskan etika Islam memastikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berdaya saing. Prinsip transparansi dan akuntabilitas akan mengangkat kemajuan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara, sekaligus memajukan pelayanan finansial regional dan internasional. Untuk merangsang terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperluas jaringan investasi, Madinah merencanakan langkah keuangan yang jitu untuk mendorong usaha rakyat (sektor riil) dalam bidang pertanian dan juga bidang perdagangan serta menggerakkan kemampuan mereka menjadi masyarakat maju yang menguasai ekonomi dan penghayatan Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh.

Terbukti kemudian, lahir konglomerat-konglomerat tangguh semisal Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf dengan tujuan untuk menjadikan Madinah sebagai pusat perdagangan Islam internasional di Semenanjung Arab dan dibangun pasar-pasar untuk merangsang kewirausahaan sebagai salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Madinah yang kemudian menjadi "citizen" yang lahir dari sistem politik baru, masyarakat kosmo yang melebur dari spirit *Muhajirin* yang mayoritas pedagang dan *Anshar* yang mayoritas petani, sudah cukup untuk mengenal konsep ekonomi dan paham bahwa sumber pendapatan negara perlu senantiasa ditingkatkan untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi

²⁹ M.Faizul Amirudin, *Dakwah Nabi Muhammad di Madinah (Analisis Keberhasilan Dakwah Nabi dalam Tinjauan Sosiologi)*, Jurnal el-Ghiroh. Vol. XV, No. 2018, h.12-13

dalam menghadapi tantangan global dan regional. Sistem keuangan negara Islam menampilkan corak perdagangan dan investasi semua lini merangsang pertumbuhan dan mendorong peningkatan belanja dalam negeri dan pencapaian tahap kematangan ekonomi yang lebih meyakinkan. Kerja sama regional dan internasional yang menguatkan daya tahan dan kekuatan ekonomi negara yang menyumbang sumber pendapatan baitul mal berupa infak, *sadaqah*, rampasan perang, tanah, pungutan jizyah, beacukai dan pendapatan dari hasil pengawasan wilayah. Pelibatan para ahli sebagai perancang ekonomi juga diwujudkan untuk memastikan dasar keuangan dan fiskal. Reformasi keuangan juga dikemas dalam pengurusan sistem logistik dengan menyediakan kawasan tanah lahan baru dan usaha revitalisasi pertanian.³⁰

Distribusi Pendapatan dalam Konteks Negara

Prinsip-prinsip dalam ekonomi yang dibangun atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para ekonom muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level Negara terkait dengan diantaranya, penjaminan di level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemamfaatan yang sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Negara wajib mengeluarkan kebijakan mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Kalangan ekonom barat sendiri sudah banyak melancarkan kritikan pedas terhadap pola yang ada saat ini, seperti Dudley Seers yang percaya bahwa kriteria pembangunan

³⁰Abdul Mukti Thabrani, *Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad...* h.24-25

adalah berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran dan meratanya distribusi pendapatan. Jika salah satu dari persoalan tersebut, terutama jika ketiga-tiga memburuk maka tidak dapat dikatakan bahwa negara yang bersangkutan telah mengalami pembangunan sekalipun pendapatan per kapitanya berlipat dua kali.

Strategi pembangunan berbasis ajaran Islam mengubah paradigma dengan menyaji-kan beberapa elemen penting yaitu: pertama, seluruh keinginan agen ekonomi tidak dapat diloloskan kecuali telah melewati saringan filter yang terdiri dua lapis saringan yaitu *masalah syariyyah* dan mekanisme harga di pasar. Kedua, agen ekonomi perlu dimotivasi untuk melakukan pemuasan kebutuhan dengan tidak membahayakan lingkungan. Ketiga, perlu ada restrukturisasi dalam bidang sosio ekonomi dengan tujuan untuk mengura- ngi konsentrasi kekayaan yang beredar di kalangan tertentu, terus menghapuskan pola konsumsi pamer, konsumtif dan mereformasi sistem keuangan.³¹

Analisis Pendapatan Negara dalam Aspek Syariah

Pendapatan nasional (*national income*) merupakan salah satu indikator kemampuan dan kualitas sumber daya (alam dan atau manusia) suatu negara. Semakin baik dan berkualitas sumber daya suatu negara maka relatif semakin besar juga pendapatan nasionalnya. Kualitas sumber daya yang terbaik untuk memperbesar pendapatan nasional tentu saja adalah kualitas sumber daya manusianya. Negara-negara yang berkualitas sumber daya manusianya sangat baik dan dianugerahi sumber daya alam yang cukup pastilah menjadi negara yang memiliki pendapatan nasional yang tinggi.

Dalam struktur negara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa cara yang digunakan meng-

³¹Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No.1,2016, h .70-71

himpun pendapatan guna untuk menjalankan pemerintahan. Dalam teori ekonomi secara umum bisa dilakukan dengan pengembangan bisnis. Pemerintah melakukan bisnis seperti perusahaan lainya, misalnya dengan mendirikan BUMN. Dari perusahaan inilah negara diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua adalah pajak, dengan cara menarik pajak terhadap masyarakat. Pajak di kenakan dari berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, penjualan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lainnya. Ketiga dengan meminjam uang atau istilah saat ini hutang negara. Sebagaimana di pahami dalam ekonomi modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan akan tidak akan ada pembangunan bila tidak di tunjang dengan utang luar negeri.

Sedangkan dalam Islam, sumber sumber pendapatan negara bisa di lihat pada zaman Rasulullah SAW tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Sedangkan zakat sendiri baru di syariatkan pada tahun 8 Hijriah. Zakat pada awal masa Islam merupakan penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat itu berupa beberapa uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan. Dan zakat juga merupakan sebuah unsur penting, karena sistemnya penunaianya yang bersifat wajib (*obligatory zakat system*) sehingga pada saat itu kewajiban membayar zakat di kenakan kepada seluruh umat Islam maupun non muslim (*kafir zimmy*) yang dilindungi, sedangkan negara adalah sebagai pengelola dalam mekanismenya.

Di samping itu ada pendapatan dari pos-pos ghanimah, merupakan pendapatan yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil ghanimah sudah di jelaskan langsung dalam al-Quran surah Al-Anfal ayat 41:

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. *Fa'i* dibahas dalam surat al-Hasyr Maksudnya: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnus sabil. Sedang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Yang dimaksud dengan *Apa* ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan. *Furqaan* ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. Sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.

Dalam konteks perekonomian modern, pos penerimaan ini boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara sebagai barang *ghanimah*. Kemudian ada *khumus*, bagian dari pendapat *ghanimah* akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah dan kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Selanjutnya *fa'i* hampir sama dengan *ghanimah*, namun bedanya *fa'i* tidak dilakukan dengan pertumpahan darah atau perang. *Fa'i* adalah harta negara didapatkan selain dari zakat. Di dalamnya

termasuk kharaj, jizyah dan 'usyur. Dan pendapatan usaha-usaha hasil komersil pemerintah. Lalu ada *jizyah* merupakan pajak yang diberlakukan bagi warga negara non muslim yang mampu. Bagi mereka yang tidak mampu karena uzur, cacat dan mereka pada golongan ekonomi kebawah akan terbebas dari kewajiban ini. Lalu ada infak sadakah dan wakaf. Merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridha allah swt. Namun oleh negara di manfaatkan untuk proyek-proyek pembangunan negara. Dan ada juga *nawajib* pajak yang dibebankan kepada muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.

Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel seperti harta warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah, atau hadiah dari negara sesama islam serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia. Dalam konteks modern saat ini tentu sebuah negara akan memiliki pos penerimaan yang cukup variatif. Misal berupa penerimaan devisa dan berupa keuntungan dari bada usaha milik negara (BUMN). Dari pendapatan diatas, itu bisa digunakan untuk pemberdayaan penguatan ekonomi suatu negara, kalau seandainya jumlah pendapatan negara kuat makan konsumsi dan produksi ke masyarakat akan mengalami kestabilan ekonomi.

Kesimpulan

Pendapatan Nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Istilah yang ada pada pendapatan nasional antara lain, Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product/GDP*), Produk Nasional Bruto (*Gross National Product/ GNP*), serta Product Nasional Neto (*Net National Product/ NNP*).

Di dunia Islam, pemerintahan memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang bertujuan menopang dan memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip keadilan.

Hal yang membedakan pendapatan nasional konvensional dengan pendapatan nasional dalam perspektif Islam adalah penggunaan parameter *falāh*. *Falāh* adalah kesejahteraan hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya yang harus dimiliki setiap manusia, dimana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian *falāh*.

Buku Teks

- Huda, Nurul, (2008), *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Islahi, A. A, (1997), *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Naf'an, (2014), *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rianto Al Arif, M. Nur dan Euis Amalia, (2010), *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana
- Rosyidi, Suherman, (2009), *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono, (2000), *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press

Jurnal Ilmiah

- Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No. 1, 2016
- Amirudin, Faizul M, *Dakwah Nabi Muhammad di Madinah (Analisis Keberhasilan Dakwah Nabi dalam Tinjauan Sosiologi)*, Jurnal el-Ghiroh. Vol. XV, No. 2018

- Maryam, Siti, Juliana, Ropi Marlina, Ramdhani Saadillah: *Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam*, Amwaluna, Vol 2 No. 2, 2018
- Mudhiyah, Kharidatul, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Jurnal Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015
- Mukti Thabrani, Abdul, *Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014
- Noviyanti. Ririn *Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis*. Iqtishodia, Vol. 1, No. 1, Maret 2016
- Rahman, Muh. Fudhail *Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*, Jurnal al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
- Rahmawati, Lilik, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 2, 2008
- Ridwan, Murtadho *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*, Ziswaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014
- Supangat: *Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Economica, Volume IV, Edisi 2, 2013

Makalah Ilmiah dan Artikel

- Syahbudi, Muhammad, (2018), *Diktat Ekonomi Makro Perspektif Islam*, Medan: FEBI UIN SU Medan

KONSEP UANG DALAM ISLAM

M. Shaleh Hamid

Imam Masjid Raya Pasar Atas Kota Bukittinggi
*Program Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
m.shaleh.hamid@gmail.com*

Ferdyanto

Da'i dan Muballigh Muda Bukittinggi
*Program Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
antoferdy@rocketmail.com*

Latar Belakang

Semakin modern zaman ditandai dengan semakin cepatnya perputaran bisnis yang terjadi dengan sistem komputerisasi dan tentunya berdampak pada perekonomian. Banyak yang mengira bahwa perekonomian saat ini sudah maju namun sebenarnya ada masalah yang mesti diselesaikan secara bersama-sama yakni mengenai uang.

Pembahasan mengenai uang menjadi perhatian utama karena uang memiliki fungsi vital dalam muamalah, ketika memahami konsep uang dengan baik maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik. Permasalahan utama dalam konsep uang adalah bagaimana kah konsep uang, apa saja fungsi uang dan apakah uang saat ini telah sesuai dengan tuntunan Islam. Karena Islam memberikan tuntunan yang sempurna bagi kesejahteraan kehidupan.

Tulisan ini akan membahas konsep, fungsi dan solusi terbaik untuk uang. Semoga ini bisa sebagai penambah wawasan untuk memahami konsep serta fungsi uang secara Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Uang

Uang mengalami proses yang sangat panjang dalam sejarah peradaban manusia, mulai dari zaman kuno sampai saat ini. Keberadaan tentu sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan perekonomian serta transaksi muamalah lainnya.

Pada zaman kuno, manusia belum mengenal uang, karena transaksi dilakukan dengan menukarkan barang dengan barang atau dikenal dengan istilah "barter". Pertukaran barter ini memiliki syarat yaitu mesti adanya keinginan yang sama dan pada waktu yang sama (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan pun semakin beragam dan manusia pun semakin sulit untuk menemukan kondisi *double coincidence of wants*. Contohnya, suatu ketika seseorang yang memiliki gula membutuhkan beras, namun di waktu yang bersamaan pemilik beras membutuhkan jagung, sementara pemilik jagung tidak membutuhkan beras. Kondisi seperti ini menyebabkan syarat untuk melakukan "barter" tidak terpenuhi. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kebutuhan alat tukar yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak dan alat tukar ini kemudian dikenal dengan uang.³²

Uang merupakan suatu benda yang memiliki fungsi utama: alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung dan ukuran pembayaran tertunda.³³

Uang ibarat darah dalam tubuh. Ketika uang yang digunakan salah maka akan berdampak pada kesehatan tubuh. Jika mata uang yang diakui itu bererdar terlalu banyak atau sedikit maka akan berdampak negatif pada perekonomian seperti deflasi atau inflasi.³⁴

³²Emily, *Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, Laa Maisyir*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, h.32

³³ Solikin, (2002) *Uang: Pengertian, penciptaan dan peranannya dalam perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, h. 2

³⁴Ishahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997,) h.174

Jadi mata uang yang digunakan akan memberikan dampak positif atau negatif pada perekonomian suatu negara. Ketika mata uang yang digunakan adalah mata uang yang baik maka perekonomian negara itupun akan baik.

Fungsi Uang³⁵

Uang sebagai alat tukar. Sebelum ditemukan uang, maka manusia bertransaksi dengan sistem barter. Namun dengan sistem barter maka akan dibutuhkan waktu untuk menemukan orang yang memiliki kelebihan barang yang dicari dimana orang tersebut juga membutuhkan barang yang kita miliki. Untuk menyelesaikan masalah ini maka uang dibutuhkan. Artinya uang memiliki fungsi sebagai alat untuk transaksi antara penjual dan pembeli sehingga kedua belah pihak akan mudah untuk melakukan transaksi tanpa harus mencari orang yang membutuhkan barang yang ia miliki (*barter*).

Uang sebagai penyimpan nilai. Sesuai dengan sifat dasar manusia yang terdapat dalam surat ali imran ayat 14 bahwa manusia sangat senang untuk mengumpulkan dan menyimpan harta kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga. Dimana barang ini bisa digunakan pada masa yang akan datang dan uang juga bisa menjadi pilihan untuk menyimpan kekayaan.

Uang sebagai satuan hitung. Ketika uang belum ditemukan maka akan susah dalam melakukan transaksi jual beli. Contoh satu ekor sapi dinilai sama dengan 7 ekor kambing. Tentunya ini akan ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya uang maka transaksi pun lebih mudah untuk dilakukan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini berkaitan dengan transaksi pinjam-meminjam. Ketika seseorang meminjam, maka untuk menghitung jumlah pembayaran hutangnya akan lebih mudah dengan menggunakan uang dari pada menggantinya dengan barang. Contohnya membayar

³⁵Solikin, *Uang: Pengertian, ...* h. 2

dengan kambing, maka kondisi kambing saat ini tentu akan berbeda dengan kondisi kambing dimasa yang akan datang. Maka disinilah salah satu fungsi uang untuk menyelesaikan masalah ini.

Jenis-jenis Uang³⁶

Seiring perkembangan zaman, uang pun mengalami perkembangan dimana uang digolongkan menjadi tiga jenis:

a. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang ialah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan jika barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. manun tidak semua barang yang bisa dijadikan sebagai uang. ada tiga syarat agar suatu barang bisa diterima sebagai uang yakni kelangkaan (*scarcity*) maksudnya persediaan barang itu harus terbatas, daya tahan (*durability*) maksudnya barang tersebut harus tahan lama dan bernilai tinggi maksudnya barang tersebut harus bernilai tinggi.

Dengan tiga syarat tersebut maka logam-logam mulia memenuhi syarat tersebut. Dan kelebihan lain dari logam mulia adalah emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian kecil yang tetap memiliki nilai utuh. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut dan rusak.

b. Uang Tanda/ Kertas (*Token Money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak tersebut adalah bank, yakni orang yang meminjamkan uanga dan pandai emas atau toko-toko perhiasan. Mereka melihat bukti peminjaman, penitipan emas atau perak di tempat mereka juga bisa di terima pasar.

³⁶Emily, *Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, Laa Maisyir*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, h. 35

Berdasarkan hal ini pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak dan masyarakat pun menerima uang kertas itu sebagai alat tukar. Jadi inilah menjadi awal pula uang kertas menjadi alat tukar yang sah.

Ini pun berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan pada semua sistem perekonomian. Namun sayang penggunaan uang kertas ini saat ini tidak didukung oleh cadangan emas yang senilai dengan jumlah uang kertas yang beredar.

Beberapa keuntungan dari uang kertas adalah biaya pembuatannya rendah, proses pengiriman mudah, dapat dipecah dalam jumlah berapapun.

c. Uang Giral (*Deposit Money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini adalah simpanan bagi nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro ini dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan hutang. Uang ini memiliki kelebihan yakni: jika hilang maka dapat dilacak kembali sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak. Dapat dipindahtanggankan dengan cepat dengan ongkos yang rendah. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Dan ini lah bukti uang mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa.

Uang Dalam Islam

Pemikiran Al-Ghazali Tentang Uang³⁷

Menurut Al-Ghazali kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif, bukan pada banyaknya jumlah uang yang beredar di negara tersebut. Artinya ketika jumlah uang yang beredar sangat banyak dan bukan berdasarkan pesatnya produksi maka uang yang banyak itu menjadi tidak bernilai.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai alat perantara untuk memudahkan transaksi muamalah. Menurut beliau uang memiliki fungsi sebagai cara untuk mendapatkan barang lain dan tujuan-tujuan tertentu. Kalau dikaitkan dengan fungsi uang secara umum maka penjelasan beliau ini masuk kepada fungsi sebagai sarana tukar-menukar. Oleh karena itu beliau mengibaratkan uang seperti sebuah cermin, dimana cermin merupakan wadah yang tidak mempunyai warna sendiri namun mampu memantulkan semua jenis warna.

Imam Al-Ghazali menyadari bahwa uang ditemukan dengan proses yang panjang. Teori evolusi uang menurut al-ghazali:

“Kebutuhan utama bagi setiap manusia adalah makanan, pakaian, alat rumah tangga, transportasi, tempat tinggal dan tempat vital lainnya seperti pasar, lahan pertanian yang memiliki fungsi sebagai sumber kehidupan. Inilah menjadi awal kebutuhan kepada uang. Untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi muamalah inilah maka dibutuhkan “hakim yang adil” sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut. Dengan demikian maka dibutuhkan suatu benda yang tahan lama karena transaksi muamalah tentu akan selalu terjadi. Dan diantara benda yang tahan lama adalah benda yang berbahan logam. Maka kemudian dibuatlah uang dari bahan emas, perak dan tembaga.

³⁷Jalaludin, *konsep uang menurut al-ghazali*, *Asy-syaria'ah* vol. 16, no. 2, 2014

Meskipun Al-Ghazali tidak menyebutkan harus disahkan oleh pemerintah, namun beliau mengharuskan adanya pencetakan uang, pengesahan dan juga penetapan harga yang hanya boleh dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk. Dalam pernyataannya beliau menjelaskan: “kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yakni emas, perak dan tembaga dan dibutuhkan percetakan, serta penentuan nilai tukar. Untuk itulah dibutuhkan tempat percetakan uang.”

Landasan pemikiran Al-Ghazali tentang uang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat: 34:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*

Jadi, larangan disini ditujukan kepada alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak maupun belum. Dan barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang peralatan rumah tangga, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan tujuan penciptaan emas dan perak.

Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa meminum dalam bejana emas dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebongkah api neraka ke dalam perutnya”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun beberapa fungsi uang menurut Al-Ghazali yakni sebagai *al-mu’awwidhah* (alat tukar), *hakim mutawasith* (pengukur nilai barang) dan *qiwam al-dunya* (satuan hitung).

Fungsi uang sebagai *al-mu’awwidhah* yakni uang menjadi sarana untuk transaksi muamalah. Sementara fungsi uang sebagai *hakim mutawasith* (pengukur nilai barang) yakni uang me-

mliki peran sebagai alat ukur yang jelas dalam menentukan harga suatu barang. Dan fungsi uang sebagai *qiwam al-dunya* memiliki arti bahwa uang adalah alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkan dengan barang yang lain, sebagaimana beliau mengilustrasikan uang itu seperti cermin.

Jadi Al-Ghazali menyimpulkan bahwa uang hanya sekedar alat tukar dalam transaksi.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Uang³⁸

Dua fungsi utama dari uang yakni sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Secara khusus Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang asal-usul dan fungsi uang. Beliau mengatakan '*athman* (*thaman*) adalah harga atau sesuatu yang dibayarkan sebagai pengganti harga, contohnya adalah uang yang dimaksudkan sebagai alat ukur dari nilai suatu barang (*mi'yar al-amwal*), melalui uang itu dari sejumlah benda (*maqadir al-amwal*) diketahui nilainya dan tidak menggunakannya untuk diri sendiri (dikonsumsi). Dengan pernyataan ini maka jelaslah bahwa fungsi utama dari uang adalah untuk mengukur nilai suatu barang atau yang dibayarkan sebagai alat tukar sejumlah barang yang berbeda. Sementara murid beliau yakni Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa uang dan keping uang tak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi juga dimaksudkan digunakan untuk memperoleh barang-barang (ini menyatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar saja).

Sejak Ibnu Taimiyah mempertimbangkan fungsi utama uang yakni sebagai alat tukar, beliau pun menentang perdagangan uang. karena dengan adanya perdagangan uang maka otomatis mengalihkan fungsi utama uang. jika uang bisa ditukar dengan uang, maka pertukaran itu harus sepenuhnya simultan (*taqabud*) dan tak ada penundaan (*hulul*). Dengan cara

³⁸Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu., 1997,) h.175-

inilah seseorang akan mampu menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Seandainya ada dua orang menukarkan uang dengan uang, dimana satu pihak membayar dengan tunai sedang yang lain berjanji akan membayar kemudian, maka orang yang pertama tak akan mampu menggunakan uang yang masih dijanjikan itu untuk melakukan transaksi yang harus dibayarnya seketika. Artinya ia akan kehilangan kesempatan.

Ibnu Taimiyah mempunyai pengalaman sendiri yakni dengan beberapa kali terjadinya penurunan nilai mata koin di mesir, dimasa pemerintahan dinasti mamluk. Beliau meminta sultan untuk memeriksa penyebab menurunnya nilai uang tersebut, yang menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi. Beliau sangat menentang penurunan nilai mata uang, juga percetakan mata uang yang terlalu banyak. Beliau menyatakan bahwa pemerintah harus mencetak mata uang koin (emas atau perak) sesuai dengan transaksi yang adil dari penduduk tanpa ada kezhaliman yang terselubung didalamnya.

Beliau memiliki beberapa konsep dalam hubungan antara uang yang beredar. Total nilai transaksi dan tingkat harga. Pernyataan-pernyataan beliau menjadi bukti bahwa beliau sangat mempertimbangkan akan pentingnya menjaga nilai intrinsik dari mata uang koin, yakni harus sesuai dengan nilai logamnya. Sehingga sesuai dengan kekuatan jual-beli di pasar dimana tak seorangpun (termasuk penguasa) yang dapat memperoleh keuntungan dari percetakan mata uang tersebut.

Beliau juga menganjurkan agar penguasa yang memelopori bisnis mata uang yakni dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin, kemudian menjadikan itu sebagai ladang bisnis. Dan beliau merlarang mencetak jenis mata uang koin baru dengan tujuan agar mata uang yang lama menjadi tidak berlaku. Bahkan beliau juga meminta pemerintah untuk mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa tujuan mencari keuntungan apapun dari percetakan uang tersebut sehingga kesejahteraan publik terjamin.

Beliau juga menyatakan bahwa perdagangan mata uang berarti membuka pintu luas ke arah kezhaliman bagi penduduk dan menghabisi kekayaan publik dengan dalih yang salah.

Ibnu Taimiyah juga meminta pemerintah tetap menjaga nilai intrinsik dari mata uang yang dicetak. Misalnya kalau seandainya mencetak mata uang koin dengan nilai yang sebenarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, kemudian penduduk membelinya dengan emas dan perak atau benda berharga lainnya maka akan terjadi penurunan nilai mata uang dan ini akan menyebabkan terjadinya inflasi dan pemalsuan mata uang. Beliau mempertimbangkan perdagangan uang sebagai sebuah kezaliman bagi penduduk dan tentunya bertentangan dengan kepentingan publik. Berikut ini uraian Ibnu Taimiyah tentang uang:

- a. Perdagangan uang akan mendorong terjadinya pemalsuan dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut yang mengakibatkan terjadinya inflasi
- b. Hilangnya kepercayaan ini akan menghancurkan kontrak jangka panjang dan akan mengakibatkan terjadinya kezaliman bagi penduduk yang memiliki penghasilan tetap.
- c. Perdagangan internal pun akan terganggu sebagai akibat dari perubahan nilai mata uang dan rasio antar mata uang tersebut.
- d. Terjadinya penurunan nilai mata uang, akan mempengaruhi minat pedagang asing.
- e. Logam mulia melayang keluar negeri, untuk mencari tempat yang bisa memberikan nilai yang baik.

Ibnu Taimiyah juga memberikan rekomendasi agar upah para pegawai harus dibayarkan dari baitul mal (bukan dari pencetak uang). tentunya rekomendasi ini sangat signifikan. Kerana kalau pembayaran upah para pegawai dibayarkan melalui pencetakan uang tentu akan meningkatkan suplai mata uang. mencetak uang (selain dari emas dan perak) untuk mem-

biayai pengeluaran pemerintah akan menimbulkan akibat serupa dengan yang terjadi pada masa sekarang ini, yakni defisit anggaran. Pembayaran dari baitul mal (kantor perbendaharaan negara) artinya menggunakan uang yang telah beredar di masyarakat.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa uang buruk akan merusak uang baik. Maksudnya adalah jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang lain untuk penduduk, tentunya akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang. Karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi sekedar barang dagangan biasa. Artinya pemerintah bertindak zalim kepada mereka dengan menghilangkan nilai uang yang mereka miliki. Dan kalau seandainya nilai intrinsik dari koin itu berbeda maka akan menjadi sumber bagi seseorang untuk mengumpulkan mata uang koin yang lebih buruk dan ditukarkannya dengan mata uang yang lebih bernilai dan ini akan mengakibatkan nilai barang milik penduduk setempat.

Uang sebagai *Flow Concept*³⁹

Uang itu ibarat air yang semakin sering mengalir dan semakin cepat mengalir maka akan semakin bagus. Sewaktu air mengalir, maka inilah yang disebut uang. Sedangkan apabila air itu mengendap maka disebut dengan capital. Wadah tempat mengendapnya adalah *private goods*, sedangkan air adalah *public goods*. Ketika uang berperan seperti air maka perekonomian pun akan sehat.

Uang sebagai *Public Goods*⁴⁰

Ciri dari *public goods* ialah masyarakat bisa menggunakan barang tersebut tanpa menghalangi orang lain. Sebagai contoh adalah jalan raya. Jalan raya bisa digunakan oleh setiap orang

³⁹Adiwarman A. karim, *Ekonomi Makro Islam*, Depok: PT. Rajagrafindo persada, (2014,) h.88

⁴⁰Adiwarman A. karim, *Ekonomi Makro Islam*,... h.89

yang ingin melewatinya. Namun masyarakat yang memiliki kendaraan memiliki kesempatan lebih besar dalam menggunakan jalan raya tersebut. Demikian juga dengan uang, sebagai *public goods* uang banyak dimanfaatkan oleh orang kaya. Dan ini bukan karena simpanan yang mereka simpan di bank namun karena asset yang mereka miliki seperti rumah, tanah dan aset berharga lainnya yang mereka gunakan pada sektor produksi. Penggunaan pada sektor produksi inilah yang memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk menggunakan uang lebih banyak. Jadi dengan semakin banyak produksi maka akan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari *public goods* (uang) tersebut. Oleh karena itu tindakan penimbunan sangat dilarang karena dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan *public goods* tersebut. Jadi *private goods* yang digunakan pada sektor produksilah yang akan memberikan keuntungan.

Perbedaan Antara Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam⁴¹

Ada beberapa aspek yang membedakan antara konsep pada konvensional dengan konsep pada islam dalam hal uang:

a. Secara fungsi.

Pada konvensional uang berfungsi sebagai komoditas, yang dapat diperjual belikan dengan kelebihan ataupun uang juga dapat disewakan.

Sementara pada islam uang berfungsi sebagai alat tukar. Uang bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan dengan kelebihan dan juga tidak dapat disewakan, uang hanya digunakan untuk membeli barang yang lain sehingga dengan demikian kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi.

b. Secara substansi

⁴¹Nur, *Studi komparasi konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi islam*, Adilla: jurnal Ekonomi syariah, Vol.1 No. 1, 2018.

Pada konvensional uang identik dengan modal (*capital*) dan sering kali istilah uang diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*) yakni uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. Sementara pada Islam uang bukanlah *capital*, dimana *capital* bisa disewakan dan akan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, sedangkan uang tidak bisa disewakan karena uang bukanlah komoditas, uang hanya bisa dipinjamkan tetapi tidak boleh mengambil keuntungan dalam transaksi pinjaman tersebut. Karena kelebihan itu akan masuk kategori riba.

Pada konvensional uang (modal) ialah barang pribadi (*private goods*), uang dapat dimonopoli. Sementara pada Islam uang ialah barang khalayak (*public goods*), uang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi muamalah. Uang bukan monopoli perorangan, sehingga masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, menumpuk uang sangat dilarang karena kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain untuk menggunakannya. Modal adalah barang pribadi (*private goods*). Modal adalah barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung sehingga diperlukan proses produksi terlebih dahulu dan akan menghasilkan keuntungan. Sehingga dalam Islam modal sebagai barang pribadi (*private goods*) harus diinvestasikan dalam proses produksi, dengan demikian baru lah pemilik barang tersebut akan mendapatkan uang yang lebih banyak.

Pada konvensional uang (modal) adalah *flow concept* menurut Fisher, uang (modal) adalah *stock concept* menurut Cambridge. Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*). Teori permintaan uang menurutnya didasarkan pada pendekatan kebutuhan masyarakat memegang uang tunai (*cash balance approach*). Sementara pada Islam uang adalah *flow concept* yakni uang harus diputar terus menerus sehingga mendapatkan

keuntungan yang lebih besar, untuk itu uang digunakan untuk investasi pada sektor riil. Uang berputar untuk produksi akan mendapatkan kemakmuran dan kesehatan perekonomian masyarakat. Sementara jika uang tersebut ditahan, maka dapat menyebabkan gangguan pada siklus ekonomi. Penyimpanan uang juga akan dikenakan zakat.

c. Secara nilai waktu

Pada konvensional ada nilai waktu uang (*time value of money*), jumlah nilai uang dimasa yang akan datang akan berubah dan ini adalah kekeliruan terbesar dalam ekonomi konvensional karena uang bukanlah makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Sementara dalam islam nilai ekonomi waktu (*economic value of time*), waktulah yang memiliki nilai ekonomi dan jika dimanfaatkan untuk kegiatan produksi maka akan memperoleh keuntungan.

Konsep Sistem Moneter Islam⁴²

Konsep pada sistem moneter adalah kebijakan moneter yang diberlakukan oleh suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang agar bisa mempengaruhi variabel-variabel finansial diantaranya suku bunga dan tingkat penawaran uang. adapun sasarannya adalah memelihara stabilitas nilai uang yang mencerminkan stabilitas harga dan tentunya akan memberikan pengaruh pada realisasi pencapaian tujuan pembangunan.

Pada sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat dalam kebijakan moneter untuk mengendalikan uang yang ada di masyarakat adalah dengan bunga. Sementara dalam islam melarang pemberlakuan instrumen bunga eksis di pasar.

⁴²Aji prasetyo, *Peran uang dalam sistem moneter islam*, Majalah Ekonomi, Vol. XXII No. 1, 2017

Kebijakan moneter Islam lebih ditujukan pada pemeliharaan siklus sumber daya ekonomi. Sehingga regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap semua potensi investasi masyarakat. Sehingga waktu untuk memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan sesingkat mungkin, karena ini sangat erat kaitannya dengan *velocity*. dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian.

Perbedaan utama sistem moneter Islam secara konseptual, sistem moneter Islam kontemporer dan sistem moneter konvensional dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Sistem islam konseptual
 - a. Sistem uang Islam (*Full bodied*)
 - b. *100 percent Reserve banking system*
 - c. Sistem bagi hasil
2. Sistem Islam kontemporer
 - a. Sistem uang *Fiat-Fully backed money*
 - b. *Fractional reserve banking*
 - c. Sistem bagi hasil
3. Sistem konvensional
 - a. Sistem *fiat money*
 - b. *Fractional reserve banking system*
 - c. Sistem bunga

Fiat money yang digunakan pada konvensional memiliki kelemahan. Dan kelemahan utamanya adalah antara nilai nominal yang tertera pada mata uang dengan nilai instrinsiknya memiliki perbedaan yang besar. Sehingga ini bisa menjadi pemicu tindakan pemalsuan. Kelemahan lainnya adalah apabila uang kertas tersebut terbakar maka habislah uang tersebut dan

hanya menjadi abu. Dan juga masa berlaku uang kertas tersebut mudah dirusak.

Ini sangat berbeda dengan uang yang ada dalam konsep sistem moneter Islam yakni bersifat *full bodied* yang berupa uang emas (logam) dan inilah uang yang digunakan pada masa Rasulullah SAW. Dimana uang ini memiliki nilai intrinsik yang hampir sama dengan nilai nominalnya. Uang emas atau logam tidak mudah untuk dirusak dan meskipun terbakar masih tetap memiliki nilai. Upaya pemalsuan uang pun tidak akan terjadi karena nilai nominal dan nilai intrinsiknya hampir sama.

Sementara dalam konsep Islam kontemporer konsep sistem moneter yang dipakai adalah *full backed money*. Atau uang (biasanya dalam bentuk kertas atau koin) yang mana nilai nominal dari uang tersebut di-*back up* sepenuhnya dengan emas yang disimpan oleh otoritas yang menerbitkan uang tersebut. Dalam penerbitan uang baru ini tidak ada daya beli baru yang diciptakan, sehingga tidak mengandung unsur riba. Dalam penerbitan uang baru, biaya percetakan menjadi tanggungan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sedangkan *fractional reserve banking system* artinya adalah bahwa bank hanya diwajibkan menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun. Cadangan wajib minimum perbankan bervariasi yang umumnya berkisar antara 5%-20%. Dengan sistem ini perbankan memiliki kemampuan menciptakan jenis lain dari *fiat money*. Yakni uang bank (demand deposit, termasuk uang elektronik). Melalui sistem simpanan berlipat (*multiple deposit creation*). Dalam hal ini uang dapat diciptakan ketika bank memberikan pinjaman.

Adapun dalam sistem keuangan ganda yang saat ini terjadi, pembeda antara konsep moneter konvensional dengan konsep moneter Islam kontemporer hanya terletak pada sistem bagi hasil. Pada saat ini sistem moneter Islam kontemporer masih menggunakan uang *fiat konvensional* dan masih menerapkan *fractional reserve banking system*.

Karakteristik sistem bunga sangat berbeda dengan karakteristik bagi hasil. Suku bunga sebagai sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya juga bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga ini akan menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya yang nilainya tetap sepanjang akad masih berlaku. Sedangkan tingkat pengembaliannya mengikuti hasil yang benar-benar terjadi di lapangan. Artinya tingkat keuntungan tidak ditetapkan secara eksogenus oleh otoritas perbankan syariah.

Problematika Uang Saat Ini Uang Kertas (*Fiat Money*)⁴³

Uang kertas dan logam dicetak dan disebar oleh pemerintah, tetapi kita telah melihat bahwa suplai uang lebih besar ketimbang nilai fisik uang ini. Pertanyaannya, apa yang membuat nilai uang berlipat-lipat dari nilai intrinsiknya? Bank melakukannya dalam bentuk *checkable deposits*. Pada kebanyakan negara, bank sentralnya mengoperasikan sistem perbankan fraksional, yang mensyaratkan agar hanya sebagian saja dari uang di deposit yang tetap dalam nilainya atau deposit dengan bank sentral. Yang lainnya dapat dipinjamkan. Ini berarti, bahwa uang menjalankan fungsinya berkali-kali dan itulah mengapa suplai uang lebih besar ketimbang kuantitas fisik uang.

Sejak awal para pedagang global menghadapi suatu masalah yakni mereka bepergian dengan membawa emas atau logam mulia lainnya untuk membayar barang atau sebagai perolehan dari hasil dagangan mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi sasaran para perampok, maka cara lain yang dianggap lebih efisien dikembangkan pada abad ke-16, dimana

⁴³Surahman, *Analisis Kekuatan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis*, FEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2. 2016

pandai emas akan menyimpannya dengan upah tertentu dan memberi depositor tanda terima (semacam kuitansi) yang bisa dipakai kelak sebagai bukti untuk mengambil kembali simpanannya. Saat itu lahirlah bentuk pertama uang kertas.

Lembaran tanda terima tersebut mewakili jumlah emas yang disimpan. Tak lama kemudian, si pandai emas menyadari bahwa ada lebih banyak emas simpanan yang diklaim pada satu waktu, terutama karena telah menjadi lumrah bagi banyak orang untuk memperdagangkan kuitansi emas ketimbang emas itu sendiri. Dari situ, muncul praktik menerbitkan kuitansi yang melebihi emas itu sendiri. Ini diberikan sebagai pinjaman dan bunga dikenakan atas pinjaman itu. Pedagang bersedia meminjamnya dan membayar bunganya sebab kuitansi itu ditopang oleh emas. Jika setiap orang yang punya simpanan emas muncul bersama dan menarik kembali simpanannya, maka akan muncul masalah.

Namun hal seperti itu jarang sekali terjadi walau kadang terjadi kepanikan yang menyebabkan simpanan emas langsung menyusut. Jika seseorang punya bank dan klien orang tersebut menyimpan \$100, suplai uang ini dapat diperbesar dengan meminjamkannya kepada orang lain. Mungkin orang yang meminjamnya akan menghabiskan sebagian uang itu dan menyisihkan sisanya di tabungan, yang kemudian dipinjamkan lagi ke orang lain dan proses ini terus berlanjut.

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana sejumlah uang dapat beranak menjadi lebih banyak akan digambarkan dalam tabel berikut:

Bank	Deposit	Cadangan	Dipinjamkan
1	200	40	160
2	160	32	128
3	128	26	102
4	102	20	80
5	80	16	64
6	64	13	51
7	51	10	41
8	41	8	33
9	33	6	27
10	27	5	22
Jumlah uang yang terisi			708

Dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa sistem perbankan mengambil uang dari kelebihan persyaratannya dan menciptakan uang baru dengan meminjamkannya. Efek yang sama akan muncul ketika rumah tangga membelanjakan pendapatannya, kemudian menjadi pendapatan bagi rumah tangga lain. Rumah tangga itu kemudian membelanjakannya dan begitu seterusnya.

Dalam proses tersebut hanya bekerja jika ada kepercayaan terhadap nilai uang dan kemampuan pemerintah untuk menopangnya. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika kepercayaan itu berubah dan uang kertas tersebut tidak dibelanjakan atau tak dipinjamkan? Jika pinjaman dibayar lebih cepat ke timbang pinjaman baru yang diberikan, uang akan menyusut, sebagaimana jika rumah tangga tak lagi menerima uang dari rumah tangga lainnya.

Dua faktor yang memungkinkan penciptaan uang dari kehampaan sebagai perpanjangan sistem uang kertas adalah bank dan bunga, yang salah satu fungsi pokoknya adalah menciptakan kredit atau utang. Bank akan terus mengutang-utangkan uang yang ada padanya, sebab dengan cara demikian penciptaan uan akan terus terjadi.

Dengan meminjamkan uangnya bank bukan mengurangi melainkan menambah hartanya. Padahal semua yang dicatat oleh bank sebagai uangnya adalah fiktif. Jika para nasabah mengambil uangnya pada saat yang bersamaan (*rush*) terjadilah keruntuhan bank (*collapse*).

Penyebabnya adalah karena uangnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicatatkan oleh bank. Sementara itu, Dampak dari penciptaan uang yang terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang terus menerus.

Krisis Keuangan dan Inflasi⁴⁴

Ketika interaksi keuangan (moneter) dunia berjalan berdasar sistem mata uang emas, dunia hidup dalam tahapan yang mapan, perekonomian dan keuangan stabil. Ketika sistem pertukaran berbasis emas lenyap, mulailah kekacauan keuangan terjadi hingga meredup dan terabaikannya kesepakatan Bretton Woods. Setelah itu, lenyaplah sistem pertukaran berbasis emas dan transaksi berjalan hanya menggunakan *fiat money*. Akibatnya, kondisi keuangan berambah buruk.

Akhirnya, krisis semakin cepat terjadi dan menyatu dengan krisis yang lain.

Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 menekankan bahwa perekonomian utama di dunia akan beroperasi pada pertukaran yang tetap dan berbasis emas senilai US\$ 35 per ons, sementara kurs lainnya akan diselaraskan dengan dolar (dan secara tidak langsung selaras dengan emas). Sistem ini dioperasikan secara efektif hingga Richard Nixon secara unilateral mengeluarkan AS dari standar emas pada 1971 dan menggunakan sistem kurs mengambang tanpa dukungan standar emas maupun benda lainnya.

Seiring kebijakan ini, suplai dolar AS di seluruh dunia menggelembung dan inflasi tahunan meningkat dari 2% rata-

⁴⁴Surahman, *Analisis Kekuatan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis*, FEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2. 2016

rata pada abad ini hingga ke angka 6% dan mencapai puncaknya sebesar 20% di beberapa negara. Dengan sistem tersebut, negara-negara di dunia akhirnya tergantung pada belas kasihan Amerika Serikat. Amerika mengatasi kekosongan anggaran belanja negara-negara tersebut dengan mencetak (menerbitkan) uang kertas dolar semu, yakni tanpa adanya *back up* emas yang cukup.

Setiap kali pencetakan uang dolar bertambah, kemungkinan dipertukarkannya dolar dengan emas semakin kecil. Inilah yang benar-benar terjadi setelah perang Dunia Kedua dan setelah diterapkannya Marshall Plan. Akhirnya, AS lalu membatalkan pertukaran seluruh dolar yang beredar dengan emas. Amerika mengharuskan pertukaran dolar yang beredar di luar negeri saja, tetapi tidak bagi dolar yang beredar di dalam negeri AS.

Akibatnya, muncul krisis. Sebab, keberadaan emas hanya cukup untuk menutupi jumlah dolar yang beredar di luar negeri saja. Akan tetapi, kemampuan itu semakin berkurang hingga terjadi krisis berikutnya pada tahun 1961 hingga 1965, yakni ketika emas yang ada pada simpanan Amerika tidak lagi mencukupi untuk menggati dolar yang beredar diluar negeri sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam pertemuan Bretton Woods.

Akibatnya, nilai persediaan dolar negara-negara di dunia jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya, sehingga terjadi keguncangan perekonomian dunia. AS mengalami defisit antara Januari 1958 hingga Desember 1960 sekitar US\$ 4 miliar dari pengeluaran emasnya. Ini merupakan akibat dari penambahan nilai dolarnya di luar negeri. Akibatnya, kepercayaan terhadap dolar menurun, yang mendorong terjadinya peningkatan permintaan cadangan emas dan permintaan pertukaran dolar dengan emas. Akhirnya, pembiayaan anggaran belanja Amerika dengan dolar berlangsung tanpa disertai lagi dengan adanya cadangan emas. Akibat penurunan cadang-

an emas terhadap dolar, AS meminta bantuan negara-negara di Dunia untuk membantunya.

Kemudian disepakati untuk menggalakkan pengumpulan emas dan pelaksanaannya dengan jalan jika harga emas meningkat karena suatu sebab (kondisi) di pasar, bank segera mengintervensi secara tunai dengan mengucurkan emas untuk membeli dolar, dengan tujuan mengembalikan tingkat harga kurs dolar terhadap emas ke tingkat harga kesetimbangan. Sebaliknya, jika harga menurun, Bank Sentral segera membeli sejumlah emas untuk menaikkan tingkat harga semula.

Hal itu berlangsung selama beberapa tahun. Akan tetapi, secara perlahan terjadi saling intervensi ke pasar sebagai bentuk penawaran, khususnya antara tahun 1965 hingga berakhir pada 17 pebruari 1968. Hal itu menjadi perkara yang melemahkan pencetakan emas di negara-negara anggota. Perancis terseret krisis pada bulan Juni 1967.

Krisis semakin cepat. Poundsterling terseret pada musim gugur tahun 1967. Kemudian terjadi krisis emas pada tahun 1968. Kedua krisis itu menyebabkan penurunan cadangan emas negara-negara di dunia selama enam bulan sebesar U\$ 2,5 miliar.

Selanjutnya, terjadi pertemuan di Washington pada 17 Maret 1968. Dalam pertemuan itu disepakati penghapusan cadangan emas dan membiarkan harga emas bebas dan berubah-ubah sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan.

Krisis emas yang disebutkan terdahulu itu menyebabkan berkurangnya pencetakan emas di Amerika, dari U\$ 14 miliar pada tahun 1965 menjadi U\$ 10,48 miliar pada bulan maret 1968, yakni tatkala cadangan emas dihapus. prosentase emas Amerika untuk krisis, pada saat itu adalah batas jumlah terendah sesuai dengan yang dinyatakan undang-undang sebagai nisbah cadangan emas dalam negeri terhadap dolar (yaitu 25%).

Selanjutnya As menghapus penukaran dolar yang dimiliki untuk pecahan tertentu di luar negeri terhadap emas dan

membatasi penggantiannya dengan emas hanya untuk ekspor luar negeri yang resmi saja. Artinya, cadangan dolar emas di dalam negeri (25%) telah disembunyikan (disimpan). Akan tetapi, AS belum mampu memenuhi penggantian pengeluaran resmi luar negeri akibat impor dan ekspor pecahan khusus. Demikian juga transaksi pecahan yang umum dalam hubungan internasional dengan negara lain. Atas dasar ini, AS menetapkan penghapusan sistem pertukaran emas secara sempurna tahun 1971.

Dari uraian sebelumnya jelas betapa kejam krisis akibat sistem pertukaran yang dipakai. Dengan sistem keuangan seperti itu, negara pemilik uang cetakan bisa terseret kedalam krisis perekonomian dunia akibat pencetakan dollar tambahan untuk menutupi sejumlah kepentingannya secara khusus. Negara lain akhirnya terseret arus untuk ikut menyelesaikan kelemahan neraca anggaran Amerika. Belum lagi dengan adanya penentangan terhadap keputusan pemerintah AS untuk menghapus penggantian uangnya (yaitu mata uang dolar menjadi cadangan luar negeri) dengan emas, baik sebagian atau keseluruhannya. Hal itu menyebabkan cadangan negara-negara lain berupa dolar menurun hingga mempengaruhi strategi perekonomian negara.

Charles de Gaule, Presiden Perancis kala itu mengingatkan hal itu dalam ceramahnya yang terkenal pada 14 Februari 1965, bahwa dolar dulu di backup dengan nilai yang lemah, yaitu (emas sebesar) 20%. Seandainya negara-negara ingin menukar cadangan devisa yang berbentuk dolar dengan emas, sesuai harga resmi, AS tidak akan sanggup memenuhinya, sementara, sesuai dengan ketentuan sistem emas, penggantian itu wajib dilakukan. Uang itu sendiri sesungguhnya bukanlah kekayaan, melainkan hanyalah satuan yang digunakan untuk mengukur kekayaan, yang tergantung kepada kontrol volumenya. Jika Bank Sentral membanjiri pasar finansial dengan mencetak lebih banyak uang (meningkatkan likuiditas), jelas

tidak ada penambahan kekayaan di situ. Ini dapat meningkatkan transaksi finansial namun juga menciptakan atau bahkan menghancurkan nilai kekayaan tergantung kepada berbagai faktor, misalnya inflasi.

Di dalam ekonomi riil, kekayaan dihasilkan melalui penciptaan aset keras yang produktif semacam pertanian, barang produksi dan sebagainya, yang kemudian dijual untuk menunai laba. Kekayaan pun bisa ditingkatkan dengan meningkatkan produksi. Misalnya Kita memproduksi lebih banyak barang dan jasa lalu menjualnya untuk memperoleh laba lebih banyak. Jika kita memenuhi pasar finansial dengan uang, maka kita akan menciptakan inflasi. Ini karena ada lebih banyak uang yang beredar digunakan untuk membeli sejumlah barang yang jumlahnya tetap, sehingga menurunkan nilai uang dan barang yang hendak dipertukarkan menuntut lebih banyak uang untuk barang yang sama pada periode waktu tertentu. Misalnya, sepiring bakso kini harganya mencapai 800% lebih mahal dibandingkan 15 tahun lalu, ini karena nilai uangnya sendiri yang menurun.

Pada saat yang sama, sejumlah aset semacam properti, tanah, atau emas tidak akan berkurang karena semuanya menyimpan nilai intrinsik yang tetap sama sepanjang masa, namun karena nilai uang kertas menurun, efeknya akan terasa pada daya beli (kemampuan uang untuk membeli barang dan jasa) lebih rendah, sehingga dalam makna yang sesungguhnya, kekayaan pun menurun, karena uang menurun nilainya, jika dibandingkan dengan aset tak bergerak yang riil.

Dewasa ini kita telah menyaksikan bahwa kemampuan orang untuk menyimpan terus menurun dari waktu ke waktu, terlepas dari fakta bahwa kita memperoleh lebih banyak pendapatan dibanding sebelumnya. Daya beli uang telah menurun dalam wujud nyata karena nilai aset pada umumnya tetap sama, namun jumlah uang yang diperlukan untuk membeli berbagai aset tak bergerak (tanah, properti, barang) meningkat.

Dengan kata lain, masyarakat di zaman sekarang memiliki lebih sedikit simpanan dibandingkan masyarakat pada dua dekade lalu. Inflasi merupakan peningkatan harga secara keseluruhan dalam sistem ekonomi. Pada umumnya, hampir semua negara menentukan 2000 macam benda yang esensial dan membandingkan seluruh harganya dengan harga pada periode lain untuk mengamati pergerakan harga.

Masalah fundamental yang ditimbulkan oleh naiknya inflasi adalah karena inflasi mengurangi daya beli masyarakat. Jika harga-harga naik dan pendapatan tetap tidak berubah, maka jumlah pembelian yang dapat dilakukan pada masa sebelum kenaikan harga lebih tinggi dari saat harga telah naik. Karena itu, ekonomi mungkin mengalami peningkatan seiring kenaikan harga, namun laju inflasi yang meningkat sebenarnya berarti melemahnya keadaan masyarakat. Inflasi akan senantiasa menjadi masalah di barat karena mereka dapat mencetak uang sesuka hati. Hal tersebut juga akan terjadi di berbagai negara.

Kemampuan mencetak uang sesuka hati memicu efek penurunan dalam ekonomi. Aset-aset semacam tanah dan property memiliki nilai intrinsik, namun karena efek pencetakan uang, jumlah aset semacam itu yang dapat dibeli seseorang terus menurun nilainya. Apa yang kita temukan karena uang dapat dicetak sesuka hati, pemerintah mencetak uang secara berkala. Uang tersebut kemudian dipakai membeli barang yang jumlahnya sama. Efek lanjutan dari masalah ini adalah walau ada banyak uang dalam sistem ekonomi, daya beli (kemampuan uang untuk mengimbangi barang dan jasa) jatuh dan karenanya dalam istilah riil, kekayaan selalu menurun akibat uang terdevaluasi (nilainya menurun).

Dinar dan Dirham Pilihan Terbaik⁴⁵

Dalam pemerintahan Islam, Rasulullah SAW. Telah menggunakan mata uang tersebut dalam berbagai muamalah saat itu. Keduanya beredar di masyarakat meski belum memiliki bentuk baku. Rasulullah SAW. Saat itu tidak pernah mencetak uang tertentu dengan ciri khas tertentu. Sebab, yang menjadi standar mata uang ini bukanlah ukuran, ukiran ataupun bentuknya, tetapi berat masing-masing satuan uang.

Kondisi semacam ini berlangsung terus sepanjang hayat Rasulullah SAW., masa Khulafaur Rasyidin, pada awal masa Bani Umayyah hingga masa Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik kemudian melihat perlunya mengubah emas dan perak-baik yang sudah diukir atau belum-yang dipergunakan dalam transaksi, ke dalam cetakan dan ukiran Islami; kemudian dibentuk dalam satu timbangan yang tidak berbeda-beda, serta berbentuk barang yang tidak perlu lagi ditimbang. Lalu beliau mengumpulkan mulai yang besar, kecil dan cetakan ke dalam satu timbangan Makkah. Setelah itu, Abdul Malik mencetak dirham dari perak dan dinar dari emas. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-75 Hijriah.

Sejak itulah uang Islam menjadi khas mengikuti satu ciri khas yang tidak berbeda-beda lagi. Kedua logam ini dapat digunakan secara bersamaan karena sistem uang emas pada dasarnya sama seperti sistem uang perak.

Negara Islam sejak Rasulullah SAW. Hijrah telah mengambil kebijakan berdasarkan standar uang emas dan perak secara bersama-sama, tanpa adanya pemisahan. Karenanya, kebijakan moneter tetap harus senantiasa berpijak pada standar emas dan perak tersebut secara bersamaan. Uang yang beredar di masyarakat harus berupa emas dan perak, baik diwujudkan dalam bentuk fisik emas dan perak atau mempergunakan uang

⁴⁵Surahman, *Analisis Kekuatan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis*, FEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2. 2016

kertas dengan jaminan emas dan perak yang disimpan di tempat tertentu semisal bank sentral.

Sistem berbasis emas sebenarnya menjamin kestabilan nilai tukar. Kesatuan keuangan untuk semua negara dengan sistem emas atau uang kertas substitusi yang secara sempurna bisa dipertukarkan dengan emas pada waktu yang sama.

Karena itu, harga tukar antara uang suatu negara dengan uang negara lain menjadi stabil karena terikat dengan emas yang sama nilainya dan sudah dikenal luas. Dinar Islam, misalnya, adalah 4,25 gram emas; poundsterling Inggris sesuai dengan ketentuan undang-undangnya, yaitu 2 gram emas murni; franc Perancis setara dengan 1 gram emas murni.

Dengan demikian, harga tukar atau kurs menjadi stabil. Jadi, kurs pertukarannya adalah dua dinar Islam dapat ditukar dengan sembilan franc Perancis atau dengan 4,5 poundsterling Inggris. Kurs pertukaran ini akan tetap, karena hakikatnya adalah menukarkan emas dengan emas. Sistem ini mewujudkan kemantapan dan kestabilan nilai mata uang, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

Buktinya, harga emas pada tahun 1910 adalah sama dengan harga emas pada tahun 1890. Dinar dan dirham telah lama diketahui bebas dari inflasi. Orang-orang yang melawan upaya mengembalikan dinar dan dirham sebagai mata uang berpendapat bahwa emas sebagai komoditas juga mengalami inflasi, sebagaimana yang terjadi selama impor besar-besaran emas dari Afrika Selatan ke Spanyol.

Meski demikian, data inflasi uang selama 50 tahun adalah kurang dari 0,1%. Peningkatan harga pada tahun-tahun berikutnya bukan karena pengaruh logam tersebut, tapi karena pengaruh introduksi "mata uang kredit" dengan menjadikan *fiat money* sebagai pengganti mata uang real. Inilah alasan mengapa spanyol yang telah menerima demikian banyak emas menjadi negara miskin dibandingkan dengan Eropa barat yang

begitu cepat berekspansi dan memanipulasi dengan “mata uang kredit”.

Ketika syariaah Islam mengatur mata uang dengan emas dan perak, hal itu bisa diperuntukkan untuk dua hal:

Pertama, untuk jenis uang yang dipergunakan dalam melakukan transaksi, baik berupa tembaga, kertas uang atau lainnya, asalkan mempunyai penjamin berupa emas dan perak.

Kedua, untuk emas dan perak itu sendiri. Dengan demikian, uang jenis apapun, baik emas maupun perak, uang kertas, tembaga, maupun yang lain dapat digunakan sebagai mata uang selama memungkinkan untuk ditukarkan menjadi emas dan perak karena emas dan peraklah yang menjadi standar.

Standar uang yang pernah dibuat dan masyhur pada masa Rasulullah SAW. Adalah “uqiyah, dirham, daniq, qirath, mitsqal dan dinar. Apapun jenis dan penamaannya, semua jenis standar uang tersebut selalu dibuat dengan emas dan perak.

Inilah yang digunakan oleh masyarakat Islam saat dalam melakukan transaksi. Sebuah keuntungan yang dimiliki oleh sistem uang emas, jika dibandingkan dengan sistem uang kertas maupun sistem-sistem mata uang lainnya, adalah sistem uang emas bersifat internasional. Hal ini tidak mungkin dimiliki oleh sistem-sistem uang lain.

Dunia secara keseluruhan telah mempraktikkan sistem uang emas dan perak sejak ditemukannya uang hingga Perang Dunia I. Keunggulan sistem uang dua macam logam tersebut menjadi alasan mengapa harga-harga komoditi saat tetap terjaga dengan standar yang tinggi. Akibatnya, laju produksi terdorong dengan kuat karena tidak ada ketakutan akan adanya fluktuasi harga. Nilai uang tersebut lebih stabil.

Akan tetapi, ketika imperialisasi ekonomi dan kekayaan mulai dijalankan, para imperialis mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasi. Mereka mengubah sistem uang emas ke dalam sistem uang lain. Mereka menganggap tabungan bank dan *fiat money* yang disandarkan pada emas dan perak itu,

merupakan nilai banyaknya uang. Begitu pula mereka menganggap emas dan perak tersebut sebagai nilai banyaknya uang.

Dari sinilah, muncul sebuah keharusan untuk kembali pada sistem emas dan perak dengan beberapa pertimbangan manfaat sistem uang emas. Di antara manfaat yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Sistem uang emas akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yakni masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji pekerja.
2. Sistem uang emas juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara. Karena tetapnya kurs pertukaran mata uang tersebut, perdagangan internasional bisa meningkat. Sebab, para pelaku bisnis dalam perdagangan luar negeri tidak takut bersaing. Karena kurs uangnya tetap, maka mereka tidak khawatir dalam mengembangkan bisnisnya.
3. Dalam sistem uang emas, bank-bank pusat dan pemerintah tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang, karena secara umum kertas uang tersebut bisa ditukarkan menjadi emas dengan harga tertentu. Sebab, pemerintah-pemerintah tertentu khawatir jika memperluas peredaran kertas uang tersebut justru akan menambah jumlah permintaan akan emas, sementara pemerintah sendiri tidak sanggup menghadapi permintaan tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi kertas uang yang dikeluarkan serta sikap hati-hati pemerintah terhadap emas, pemerintah tersebut akan melakukan penimbunan (uang emas).
4. Setiap mata uang yang dipergunakan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu yang berupa emas. Pada saat itu, pengiriman barang, kekayaan dan orang dari satu negara ke

negara lain menjadi sedemikian mudah. Dengan begitu, masalah potongan serta kelangkaan uang bisa dihilangkan.

5. Setiap negara akan menjaga kekayaan emas sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari satu negara ke negara lain. Negara pun tidak akan memerlukan kontrol sekecil-kecilnya untuk melindungi kekayaannya. Sebab, kekayaan tersebut tidak akan ditransfer dari negara tersebut kecuali karena adanya alasan yang sah menurut syariah, yakni adakalanya untuk membayar barang atau gaji para pekerja.

Kesimpulan

Konsep uang dalam Islam adalah sebagai alat untuk melakukan transaksi muamalah. Konsep dalam moneter Islam kontemporer adalah setiap mata uang yang dicetak harus diback up emas dengan *full back up*. Dan juga kebijakan moneter Islam menfokuskan pada kesejahteraan masyarakat semata tanpa ada kezhaliman yang terselubung. Emas dan perak dijadikan uang dalam Islam karena memenuhi kriteria uang dengan sempurna. Pemilihan jenis uang yang baik maka akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik. Emas dan perak adalah solusi terbaik bagi perekonomian suatu negara.

Daftar Pustaka

- Karim, Adiwarmarman, 2014, *Ekonomi Makro Islami*, Depok: Pt. Rajagrafindo Persada
- Islahi. 1997. *Konsep Ekonomi Ibnu taimiyah*, Surabaya: PT. bina ilmu.
- Surahman, *Analisis kekuatan dinar dan dirham sebagai mata uang anti krisis*, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2016
- Prasetyo, Aji, *Peran uang dalam sistem moneter islam*, Majalah Ekonomi vol. xxii, No. 1 Juli 2017
- Jalaluddin, *Konsep uang menurut al-ghazali*, Asy-Syari'ah Vol. 16, No. 2, Agustus 2014
- Sa'idaturrahmah, Nur, *Studi komparasi konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi islam*. Adilla: jurnal ekonomi syariah, vol. 1 No. 1 Januari 2018.
- Solikin, Suseno (2002) *Uang: Pengertian, penciptaan dan perannya dalam perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, h. 2

INFLASI DALAM ASPEK EKONOMI MAKRO SYARIAH

Zulhendri

Pengajar Marqazul Qur'an Sumatera Barat
*Program Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bukittinggi*
Zulhendrisutanrajoalam171080@gmail.com

Feri Irawan

Direktur Utama BPR Jam Gadang Bukittinggi
*Program Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bukittinggi*
Feri.irawan.jg@gmail.com

A. Latar Belakang

Inflasi dalam dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal dan ketidak jelasan ongkos serta pendapatan pada masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi serta ketidak stabilan sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah pemerintahan negara yang berkuasa serta otoritas moneter negara tersebut. Lebih dari itu, adapula kecendrungan inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terus terjadi. Hal ini tercermin dari semua kebijakan otoritas moneter negara dalam hal menjaga tingkat inflasi negara tersebut. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi itu harus diturunkan agar menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Inflasi (*Inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus.

Kenaikkan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi untuk sesaat. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Misalnya harga barang-barang naik menjelang lebaran atau hari libur lainnya. Karena ketika lebaran usai harga barang kembali ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi. Inflasi juga berkaitan dengan kenaikan harga secara umum, artinya kenaikan harga satu jenis barang maupun jasa juga tidak termasuk inflasi, misalnya pada musim lebaran harga tiket pesawat naik.⁴⁶

Permasalahan tersebut menimbulkan reaksi atau pemikiran para ahli ekonomi Islam modern, seperti Ahmad Hasan, Hifzu Rab dan 'Umar Vadillo, yang menyerukan agar menerapkan kembali sistem mata uang *dînâr* dan *dirham* sebagai jalan keluar atau solusi bagi penyelesaian kasus-kasus transaksi inflasioner di dunia ekonomi modern terkhususnya Islam. Mereka beralasan bahwa sistem mata uang logam mulia atau emas dan perak *dînâr* dan *dirham* itu dapat menjamin keamanan sebuah transaksi karena keduanya memberikan keseimbangan nilai terhadap semua objek komoditas yang ditransaksikan. Gagasan atau ide tersebut memberikan akses bagi terwujudnya sebuah ekonomi makro yang kuat dengan dukungan penuh mata uang yang berbasis kekuatan riil pada materialnya. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama dari sebuah kebijakan moneter.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat diperhatikan oleh semua negara didunia, termasuk Indonesia. Apabila inflasi ditekan dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran, sedangkan tingginya tingkat pengangguran

⁴⁶Awaluddin, *Inflasi dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017 hal. 1-2

adalah salah satu simbol dari rendahnya produksi nasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. sehingga selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, pada keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, bahkan distribusi pendapatan.⁴⁷

Selanjutnya, Inflasi juga merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. Perkembangannya yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Banyak kajian membahas inflasi, tidak hanya cakupan regional, nasional, namun juga internasional. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian.⁴⁸

Sesungguhnya mengenai inflasi bukanlah hanya domainnya pemerintah. tapi, masyarakat sebagai komponen dari bernegara dan berbangsa seharusnya juga harus memahami sedikit banyaknya mengenai Inflasi, apa saja sebab timbulnya masalah inflasi, akibatnya serta bagaimana mengatasinya supaya tidak menjadi parah sehingga merugikan negara serta kita sebagai warga negara.

Berbagai macam teori, pendekatan dan kebijakan yang telah dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan. Pada makalah ini akan kami akan membahas mengenai “Inflasi Dalam Aspek Ekonomi Makro Syariah”.

⁴⁷Hera Susanti, dkk, *Indikator-Indikator Makroekonomi*, edisi Kedua, Jakarta: LPFEUI, 1995,). hlm. 41

⁴⁸F. Baasir, *Pembangunan dan Crisis*, Jakarta: Pustaka Harapan, 2003,). hlm. 265.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Inflasi

Byzantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara-negara lain dan berusaha mencegah impor dari negara-negara lain masuk ke negara mereka agar dapat mengumpulkan uang emas sebanyak-banyaknya. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya orang-orang Bizantium harus makan, membeli pakaian, mengeluarkan biaya untuk transportasi, serta juga menikmati hidup, sehingga mereka akan membelanjakan uang (kekayaan) yang mereka kumpulkan tadi sehingga akhirnya malah menaikkan tingkat harga dari komoditasnya itu sendiri. Spanyol setelah era '*conquistadores*' juga mengalami hal yang sama, begitu juga dengan Inggris setelah perang dengan Napoleon (*Napoleonic War*). Awal inflasi mata uang dinar dimulai bahkan pada saat ketika Irak sedang dalam masa puncak jayanya. Revolusi Harga di Eropa terjadi sepanjang beberapa Abad, pola kenaikan tingkat harga pertama kali tampak di Italia dan Jerman sekitar tahun 1470 (mengikuti wabah *Black Death* pada tahun 1349). Kemudian Inflasi menyerang Eropa dalam beberapa tahapan, dimulai dari Inggris dan Perancis pada tahun 1480-an, meluas ke semenanjung Iberia pada dekade selanjutnya dan menyerang Eropa bagian Timur pada tahun 1500-an. Kenaikan tingkat harga sangat cepat pada bahan-bahan mentah terutama makanan. Di Inggris harga komoditas kayu, ternak dan biji-bijian meningkat sampai 5-7 kali lipat dari tahun 1480 sampai tahun 1650, sementara itu barang manufaktur harganya meningkat 3 kali lipat. Kenaikan sebesar 700% selama 170 tahun itu juga dihitung secara Compound hanya sebesar 1,2% pertahunnya, akan tetapi dilain sisi, gaji hanya meningkat kurang dari 1/2-nya, sehingga masyarakat sangat mengalami goncangan akibat tekanan inflasi. Daya beli uang dan gaji menurun dengan tingkat yang di anggap sangat mencemaskan.

Semuanya adalah akibat gabungan dari penurunan produksi pertanian, pajak yang berlebihan, depopulasi, manipulasi pasar, high labor cost, pengangguran, kemewahan yang berlebihan dan sebab-sebab lainnya, seperti perang yang berkepanjangan, embargo dan pemogokan pekerja.⁴⁹ Pada era tahun 1870, Peranci juga mengalami Inflasi. Diduga ada hubungan besar antara kenaikan tingkat Inflasi dengan kenaikan produksi Emas. Menurut Michael Chevalier (seorang ekonom Perancis pada abad ke-19), pada tahun 1859 mengatakan bahwa pertambahan penawaran emas akibat ditemukannya tambang-tambang emas baru sehingga mengakibatkan turunnya harga emas relatif yang akan membawa pada turunnya dari nilai riil emas (inflasi) atau naiknya tingkat harga seluruh barang kecuali emas.⁵⁰

Sejarah inflasi di Indonesia antara tahun 1950-2002 dalam pemaparan Akhtar Hossain antara lain dikelompokkan dalam 3 periode utama yakni:

1. Periode Soekarno

Pada periode ini tingkat laju inflasi lebih dipengaruhi pada kepentingan politik dan pertumbuhan ekonomi yang dikorbankan pemerintah. Waktu itu, pemerintahan lebih memprioritaskan memilih mencetak uang secara terus menerus dan tanpa diikuti peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Akibatnya di tahun 1965 tingkat inflasi menjadi sangat tinggi mencapai 162,9%. Sehingga kondisi inflasi pada waktu itu mengakibatkan terjadinya kerusuhan yang cukup luas dan terjadi dimana-mana dan bermuara pada kejatuhan Presiden Soekarno atau kejatuhan rezim.

⁴⁹Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010,) h. 134.

⁵⁰Awaluddin, *Inflasi Dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017 hal.6

2. Era Soeharto

Pembangunan pada bidang ekonomi menjadi prioritas utama dengan penekanan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pembangunan. Di era ini, pemicu (*trigger*) yang mendorong terjadinya inflasi adalah karna terlalu focus pada hal investasi dalam pembangunan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pada penerimaan negara. Hal ini menyebabkan pengeluaran pada APBN menjadi lebih besar dari pada penerimaan kas negara, yang artinya pengeluaran pemerintah dalam hal investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan pada kas negara.

3. Periode setelah Krisis

Pembangunan ekonomi dinilainya hanya ditujukan untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh peningkatan daya beli masyarakat.

Namun pada umumnya dari beberapa studi mengenai inflasi menunjukkan bahwa penyebab terjadinya inflasi di Indonesia adalah kenaikan pada harga-harga yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti pada pertambahan jumlah produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik serta ekonomi sebagai akibat dari pemerintahan yang kurang bertanggungjawab.

B. Teori Inflasi Konvensional dan Ekonomi Syariah

1. Inflasi Dalam Ekonomi Konvensional

Inflasi adalah sebuah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Ini bukan berarti bahwa harga-harga setiap barang itu naik dengan dengan kenaikan yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga tersebut tidak secara bersamaan. Terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, tetapi meskipun

dengan persentase yang cukup besar, tetapi itu bukanlah merupakan sebuah inflasi.

Secara umum ada tiga komponen dalam sebuah inflasi, yaitu: Kenaikan Harga suatu komoditas yang dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Misalnya, pada musim panceklik harga jagung bisa mencapai Rp 10.000,- per kilogram. Sebab harga gabah telah naik. Tetapi pada musim panen harganya bisa lebih murah, karena harga gabah juga mengalami penurunan. Dapat dikatakan pada musim panceklik selalu terjadi kenaikan pada harga jagung. Begitu pula barang-barang atau jasa lainnya. Bersifat Umum Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan sebuah inflasi jika kenaikan komoditi tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum juga mengalami kenaikan. Misalnya, setiap pemerintah menaikkan harga BBM, harga-harga pada komoditas lain tidak ikut naik. Namun apabila kenaikan pada harga BBM juga mempengaruhi kenaikan harga pada komoditas lainnya, maka kenaikan harga ini bisa menunjukkan terjadi sebuah inflasi. Berlangsung terus-menerus pada kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan sebuah inflasi, jika terjadinya hanya sesaat saja karena itu perhitungan pada inflasi harus dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan dan berlangsung lama dan terus menerus.⁵¹

Tingkat inflasi itu berbeda dari satu periode dengan periode yang lain, dan berbeda juga pada satu negara dengan negara lainnya. Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku diakibatkan oleh banyak faktor. Di negara industri pada umumnya sebuah inflasi yang terjadi dapat bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua permasalahan berikut: Pertama tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan sebuah perusahaan untuk dapat menghasilkan barang ataupun jasa.

⁵¹ Idris Parakkasi, *Inflasi Dalam Perspektif Islam*, Laa Maisyir, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016 hal. 4

Kedua, para pekerja yang di berbagai kegiatan ekonomi menuntut adanya kenaikan pada upah.

2. Jenis-jenis Inflasi

Jika dilihat dalam teori Inflasi dalam ilmu ekonomi konvensional dapat digolongkan dalam beberapa cara:

1. Inflasi dapat digolongkan menurut besarnya, yaitu:

a. Infasi Ringan (*Low inflation*)

Yang dimaksud inflasi satu digit (*single digit inflation*) yaitu dibawah 10% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4% dikatakan tingkat inflasi yang rendah

b. Inflasi Sedang (*Galooping Inflation* atau *Double digit* bahkan *triple digit inflation*)

Yaitu inflasi antara 20% sampai pada kisaran 200% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah dinilai lemah, perang, revolusi, dan kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia dipasaran sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang.

c. *Hyperinflation*

Yaitu Inflasi diatas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang yang ada dan menyimpan dalam bentuk barang, seperti emas, tanah dan bangunan atau dalam bentuk aset karena barang-barang jenis ini kenaikan harganya setara dengan inflasi.

2. Berdasarkan Sumber Inflasi, Inflasi terbagi kepada:

a. Inflasi karena tarikan Permintaan

(*Demand Full Inflation*) Yaitu kenaikan pada harga-harga karena tingginya permintaan terhadap barang, sementara barang-barang tidak tersedia di pasaran sehingga harganya otomatis menjadi naik. Inflasi tarikan permintaan (*Demand Full Inflation*) atau inflasi dari sisi permintaan

(*Supply Side Inflation*) adalah sebuah inflasi yang timbul atau disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah pada barang dan jasa yang ditawarkan.

- b. Inflasi karena dorongan biaya (*Cost Push Inflation*) Yaitu inflasi karena biaya atau harga dari faktor produksi, seperti upah buruh yang meningkat sehingga produsen harus menaikkan harga komoditi supaya terus mendapatkan laba dan produksi bisa tetap berlangsung terus. Inflasi desakan biaya (*Cost Push Inflation*) atau inflasi yang dari sisi penawaran (*Supply Side Inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan produktifitas, maupun efisiensi, bisa mengakibatkan perusahaan mengurangi supply barang dan jasa.

Terkadang inflasi seperti satu pisau bermata dua yakni terdapat beberapa dampak positif maupun dampak yang negatif dari Inflasi sebagai berikut:⁵²

Pertama, Dampak dari Inflasi Tersebut Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Prinsipnya Tidak Semua Inflasi Berdampak Negatif Pada Perekonomian.

Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya.

Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya

⁵² N. G . Mankiw, *Teori Makroekonomi*, Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 27-30.

lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen.

Kedua, Dampak Inflasi Terhadap Hasil Produksi (Output).

Hasil produksi akan meningkat jika kenaikan harga barang-barang lebih cepat daripada kenaikan gaji atau upah pekerja. Hal ini akan memberikan keuntungan pengusaha menjadi lebih tinggi. Peningkatan keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha akan mendorong pengusaha memproduksi lebih banyak sehingga hasil dari produksi pun terus meningkat.

Hasil produksi akan menurun jika inflasi sudah terlalu tinggi (hiperinflasi). Ketika terjadi hiperinflasi, masyarakat tidak suka memiliki uang tunai, karena nilai uang riil yang dipegang menjadi semakin rendah. Daya beli uang akan menjadi rendah. Karena sebagian masyarakat tidak memegang uang tunai, sebagian pertukaran cenderung dilakukan dengan cara barter. Hal ini membuat produsen tidak bersemangat memproduksi sebab hasil produksi akan kurang laku, dan akibat selanjutnya hasil produksi pun turun.

Ketiga, Pengaruh Inflasi Terhadap Bentuk Penanaman Modal atau Investasi.

Pada masa inflasi terjadi, para pemilik modal atau investor lebih suka menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian harta-harta tetap seperti tanah dan rumah serta benda-benda berharga lain seperti emas dan mutiara. Pada masa inflasi ini, nilai barang akan terus naik atau semakin mahal, sedangkan nilai uang atau daya beli uang akan semakin turun. Oleh karena itu, pada masa inflasi para pemilik modal akan berusaha menyelamatkan uang mereka dengan cara membeli harta-harta tetap dan benda-benda berharga lainnya.

Keempat, Pengaruh Inflasi Terhadap Perdagangan Internasional.

Jika di dalam negeri terjadi inflasi, harga produk dalam negeri akan lebih mahal dibandingkan produk dari luar negeri. Keadaan ini akan menyebabkan produk domestik akan lebih sulit bersaing dengan produk-produk impor. Akibatnya, nilai ekspor akan lebih kecil daripada nilai impor, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit dan defisit ini dapat menghabiskan cadangan devisa negara.

Kelima, Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Masyarakat⁵³

Untuk masyarakat yang berpendapatan tetap, terjadinya inflasi sangat merugikan karena pendapatan riil menurun. Sedangkan bagi masyarakat yang berpendapatan tidak tetap, inflasi bisa sangat merugikan atau bisa juga tidak merugikan. Untuk masyarakat yang berpendapatan rendah dan tidak tetap, inflasi jelas sangat merugikan mereka. Sedangkan untuk masyarakat yang berpendapatan cukup tinggi dan tidak tetap seperti para pengusaha besar, inflasi dianggap tidak terlalu merugikan. Terutama jika pendapatan pada masa inflasi mengalami kenaikan yang persentasenya lebih besar dibandingkan persentase kenaikan inflasi.⁵⁴

3. Berdasarkan asal Inflasi, Inflasi ini dapat dikategorikan kepada:

a. *Domestic inflation*

Yaitu Inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Misalnya, Permintaan yang meningkat untuk barang tertentu, maka terjadi *Demand Full Inflation* yang berasal dari dalam negeri sendiri. atau terjadi kenaikan harga produksi

⁵³Paul. A Samuelson and W. D. Nordhaus, Ilmu akroeonomi Edisi Tujuh Belas, (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004,) hlm. 100.

⁵⁴Aziz Septiatin, Mawardi, Mohammad Ade Khairur Rizki, *Pengaruh Inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*, I-Economic Vol. 2. No.1 Juli 2016 hal. 7

yang diimpor, maka terjadi *Cost Push Inflation* yang bersumber dari luar negeri atau impor *Cost Push Inflation*.

b. *Foreign atau imortet inflation*

Yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Misalnya, terjadi lonjakan ekspor secara terus-menerus, maka terjadi demand *Full inflation* yang berasal dari luar negeri atau terjadi kenaikan harga komoditi, faktor produksi yang diimpor, maka terjadi *cost push inflation* yang bersumber dari luar negeri atau *importet Cost Push Inflation*.

4. Berdasarkan harapan masyarakat, Inflasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. *Expected Inflation*

Yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan terjadi. Misalnya, bila inflasi dari tahun 2001 sampai 2006 konstan 6%, kemudian akan ditanya berapa perkiraan mengenai besarnya inflasi tahun 2007 maka tentunya akan dijawab 6%.

b. *Unexpected inflation*

Yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Misalnya, diperkirakan inflasi 2007 sebesar 6%, kemungkinan besar inflasi pada tahun 2007 menyimpang dari 6%. Penyimpangan tersebut, itulah merupakan *unexpected inflation*.⁵⁵

C. Inflasi Dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Selain itu dalam pelaksanaannya, ekonomi kapitalis ini banyak menim-

⁵⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014,) Hal 304-

bulkan permasalahan. Pertama, ketidakadilan berbagai macam kegiatan yang bercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat. Ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang ada saat ini menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya dan dalam ekonomi Islam hal tersebut insya Allah tidak akan terjadi.⁵⁶

Dalam sistem perekonomian Islam inflasi bukanlah merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat, karena mata uangnya selalu stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham yang berbahan logam mulia. Penurunan pada nilai dinar dan dirham masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai dari emas itu sendiri yang menopang nilai nominal dari dinar itu sendiri mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena: Bisa menimbulkan gangguan terhadap fungsi dari uang tersebut, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap kemauan menabung dari masyarakat. Meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk berbelanja terutama untuk kebutuhan non-primer dan barang-barang mewah. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak atau kurang produktif, yaitu penumpukkan pada harta kekayaan seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah yang lebih produktif lagi seperti: pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, industrial, perdagangan, transportasi, jasa dan lainnya.⁵⁷

Salah seorang ekonom muslim (Al-Maqrizi) membuat sebuah klasifikasi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke

⁵⁶Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008,) h. 189

⁵⁷Al-Bara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2016

dalam dua jenis, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Menurut al-Maqrizi inflasi karena faktor alamiah terjadi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan permintaan terhadap barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi dan jauh dari daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Sedangkan inflasi karena kesalahan manusia dapat terjadi akibat tiga hal yaitu korupsi dan kesalahan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi mata uang.

Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali yaitu sebelum Perang Hunain. Walaupun demikian Al Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur rasyidin, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi akibat kesalahan manusia ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. Al-Maqrizi mengatakan supaya jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja.⁵⁸

⁵⁸ Al-Bara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2016

D. Penyebab Inflasi dan Indikator Inflasi

1. Natural Inflation dan Human Error Inflation

Natural inflation

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran Agregatif (AS) atau naiknya permintaan agregatif (AD). Maka natural inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana ekspor naik sedangkan impor turun sehingga nilai ekspor bersih yang sangat besar, maka dapat mengakibatkan naiknya Permintaan Agregat (AD). Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan kekhalifahan Umar Ibn Khattab r.a. Pada masa itu kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli barang-barang yang mereka jual (*positive net export*). Adanya *positive net export* akan menjadikan bagian keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk kembali ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat otomatis akan naik. Naik nya Permintaan Agregatif, atau grafik dilukiskan sebagai kurva AD yang bergeser ke kanan, akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan.
- b. Apa yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab r.a pada waktu itu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Beliau melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya tindakan itu adalah turunnya Permintaan Agregatif (AD) dalam perekonomian. Setelah pelarangan tersebut berakhir maka tingkat harga kembali normal.
- c. Akibat dari turunnya tingkat produksi (Aggregate Supply [AS]) karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo atau boikot. Hal ini pernah terjadi pula pada masa

pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab yaitu pada saat terjadi musim paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, atau Dapat digambarkan pada grafik kurva AS yang bergeser arah ke kiri, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga. Lantas apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. terhadap permasalahan ini? Beliau melakukan impor gandum dari Fustat Mesir sehingga penawaran Agregatif (AS) barang di pasar kembali naik yang kemudian berakibat pada turunnya tingkat harga-harga.

Jadi inflasi yang terjadi karena sebab-sebab yang alamiah, atau murni karena tarikan permintaan dan penawaran, maka pemerintah tidak perlu khawatir. Karena solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menstabilkan baik permintaan agregat maupun penawaran agregat pada saat kondisi seperti semula sebelum terjadinya kenaikan harga atau inflasi.

Human Error Inflation

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada *natural inflation*, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai *Human error inflation* atau *false inflation*. *Human error inflation* dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. *Human error inflation* itu sendiri dapat dikelompokkan menurut dari hal penyebab- penyebabnya sebagai berikut:

a. Korupsi dan administrasi yang buruk.

Korupsi akan menaikkan tingkat harga, karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya “*siluman*” yang telah mereka bayarkan. Birokrasi perijinan yang berbelit-belit, dimana hanya untuk pengurusan suatu izin harus melalui beberapa instansi, hal ini tentu akan menambah jumlah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Hal yang harus dilakukan oleh

pemerintah adalah dengan menghilangkan korupsi dan melakukan reformasi birokrasi.

Jika menggunakan pendekatan kepada permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS), maka korupsi dan administrasi yang buruk akan menyebabkan kontraksi pada kurva penawaran agregat, yang menyebabkan akan terjadinya kenaikan harga. Selain menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya dan ekonomi biaya tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk mungkin akan dapat menyebabkan perekonomian terpuruk. Inflasi yang disebabkan korupsi dan administrasi yang buruk.

b. Pajak yang berlebihan (*excessive tax*)

Efek yang terjadi atau yang ditimbulkan pengenaan pajak yang berlebihan pada perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu terjadinya kontraksi pada kurva penawaran agregat. Jika dilihat lebih lanjut, pajak yang berlebihan mengakibatkan pada *efficiency loss* atau *dead weight loss*. Ini termasuk masalah pula dalam perekonomian di Indonesia, terutama pasca penerapan otonomi daerah, dimana setiap daerah selalu memiliki kebijakan tersendiri dalam menggali sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai obyek utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan-lebihan (*excessive seignorage*).

Seignorage dalam arti tradisionalnya adalah keuntungan dari pencetakan koin yang didapat oleh percetakannya itu sendiri dimana biasanya percetakan tersebut kebanyakan dimiliki oleh para penguasa. Pencetakan uang yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, hal ini berimplikasi pada penurunan nilai mata uang itu sendiri. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa

pemerintahan Presiden Soekarno, dimana kebutuhan pada anggaran pemerintah dibiayai oleh percetakan uang. Namun karena terlalu berlebihan hal ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

Human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang telah menyimpang atau melanggar dari aturan-aturan atau kaidah-kaidah syariah. Sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum:41)

1. Actual/Anticipated/Expected Inflation dan Unanticipated/Unexpected Inflation

Pada saat *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pada pinjaman nominal dikurangi inflasi atau secara notasi $r = R - \pi$ sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman yang nominalnya belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

2. Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation

Demand Pull Inflation yaitu kenaikan harga-harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan aggregate (AD) yang lebih besar daripada penawaran agregate (AS). Artinya, inflasi terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar daripada pendapatan potensial. *Cost Push Inflation*: inflasi yang disebabkan karena peningkatan harga akibat naiknya biaya-biaya. Apabila permintaan terhadap bahan baku melebihi dari penawarannya, maka harga-harga akan jadi naik. Karena pabrik harus membayar agak lebih mahal atas bahan baku dan mereka menetapkan harga produk akhir yang lebih tinggi kepada para

⁵⁹Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro ...*, h. 143.

pedagang dan pedagang menaikkan harga barang itu yang pada akhirnya akan ditanggung oleh para konsumen.⁶⁰ Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang maupun jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:

- a. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
- b. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pada pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang bisa diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.⁶¹

E. Akibat Buruk Inflasi bagi Perekonomian

Menurut para ekonom Islam, inflasi sangat berakibat buruk bagi Perekonomian karena:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau dengan kata lain *self feeding inflation*.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*).

⁶⁰Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Makro Islam*,... h. 178-179

⁶¹Awaluddin, *Inflasi dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017 hal. 8

3. Meningkatkan pada kecendrungan untuk berbelanja terutama untuk hal non primer dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*).
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi dan lainnya.⁶²

F. Efek Bagi Distribusi Pendapatan, Alokasi Faktor Produksi, Serta Produk Nasional

1. Efek Terhadap Pendapatan

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada pihak yang dirugikan ada yang diuntungkan. Seseorang dengan pendapatan tetap akan dirugikan karena adanya inflasi. Demikian pula orang yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk kas.

Pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, serta mereka yang menyimpan kekayaannya bukan berbentuk uang dengan nilainya naik yang melebihi inflasi (misalnya tanah, emas).

2. Efek Terhadap Alokasi Faktor Produksi

Disebut juga efek terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan barang yang mendorong terjadinya perubahan dalam produksi. Dengan adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain dan kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi tersebut akan

⁶² Saparuddin Siregar, *Politik Ekonomi Islam Dalam Pengendalian Inflasi*, Human Falah: Volume 1. No. 2 Juli-Desember 2014.

merubah pola alokasi faktor produksi menjadi lebih efisien apabila tidak terjadi inflasi. Namun pada waktu inflasi kenaikan produksi tersebut cenderung tidak efisien.

3. Efek Terhadap Produk Nasional

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Karena kenaikan harga barang biasanya mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan bagi pengusaha meningkat. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila inflasi terlalu tinggi (*hyperinflation*) dapat berakibat sebaliknya. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Pengaruh inflasi itu cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian besar bagi para ekonom-ekonom, pemerintah, maupun masyarakat luas pada umumnya.⁶³

G. Pengendalian Inflasi dalam Politik Ekonomi Islam

Pengendalian inflasi dalam politik ekonomi Islam utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis riba (*bunga*), menghindari hal gharar, maysir serta perbuatan zhulum. Pengendalian inflasi di Indonesia diperankan oleh 3 (tiga) pihak:

1. Pengendalian Inflasi oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter

Bank Indonesia(BI) biasanya melakukan pengendalian moneter dengan empat cara, yaitu;

Pertama, operasi pasar terbuka (*openmarket operation*) di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Kedua, penetapan tingkat diskonto (*discount window*); Ketiga, penetapan cadangan

⁶³ Ida Musdafiah Ibrahim, *Kaidah Fikih dalam Mengatasi Transaksi yang Mengalami Inflasi*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2014 hal, 5

wajib minimum (*reserve requirement*); Keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan.

Operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia adalah dengan segera melakukan kontraksi terhadap peredaran uang dengan cara Bank Indonesia menerbitkan instrumen surat berharga yang digunakan di pasar uang antar bank. Apabila Bank Indonesia bermaksud mengurangi peredaran uang di pasar, maka Bank Indonesia menawarkan keuntungan yang menarik atas surat berharga yang diterbitkannya agar perbankan cenderung menempatkan dananya di Bank Indonesia. Demikian sebaliknya dengan menurunkan tingkat keuntungan surat berharga, maka Perbankan akan terdorong untuk mencairkan surat berharganya dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan agar memperoleh return yang lebih tinggi.

a. *Open Market Operations*

Open Market Operation (operasi pasar terbuka) masih dapat diterima dalam sistem moneter Islam sepanjang surat berharga yang diperdagangkan adalah instrumensurat berharga islami, yaitu surat berharga tanpa basis bunga. Sehubungan dengan surat berharga yang tidak berbasis bunga ini, Bank Indonesia telah memiliki perangkat surat berharga “Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank” (SIMA) dan “Sertifikat Bank Indonesia Syariah” (SBIS).

b. FPJPS

FPJPS (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah), diatur dalam PBI No 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. PBI ini telah diubah dengan PBI No 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan terhadap PBI No 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

c. *Reserve requirement* tanpa bunga

Instrumen moneter dalam bentuk penetapan dari *reserve requirement*, yaitu penetapan Giro Wajib Minimum per-

bankan di Bank Indonesia tanpa imbalan bunga adalah instrumen yang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen moneter.⁶⁴

d. Pengaturan Kredit / Pembiayaan

Pengaturan kredit/pembiayaan oleh otoritas moneter ini semata-mata pada *asset liability management* yang tidak terkait dengan pemberian imbalan ataupun bunga, sehingga tidak terdapat permasalahan dengan prinsip syariah.

2. Pengendalian Inflasi oleh Pemerintah

Pengendalian inflasi oleh pemerintah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh beberapa kementerian di negara Indonesia yang terkait dengan ekonomi, seperti (1) Kementerian Keuangan, (2) Kementerian ESDM, (3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (4) Bulog, (5) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Kementerian Perhubungan, (7) Kementerian Pertanian, (8) Kementerian Perdagangan.

Beberapa kementerian ini berkordinasi dengan pemerintah daerah dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi (TPI). Kementerian dan pemerintah daerah dapat memiliki akses langsung untuk mencegah gangguan-gangguan yang dipengaruhi oleh kejutan di sisi penawaran (*supply shock*) yang bersifat struktural seperti dibawah ini.⁶⁵

- a. Mengatur Pasokan barang, dimana pada komoditas pertanian, terganggunya pasokan umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak kondusif bagi kuantitas dan kualitas produksi pangan (misalnya curah hujan yang berlebihan, musim kemarau yang terus berkepanjangan dan gangguan hama).

⁶⁴Isra, *Islamic Financial System: Principal & Operations*, (Kuala Lumpur: ISRA, 2012), h. 92-94

⁶⁵POKJANAS TPID, *Buku Petunjuk TPID*, (Jakarta: POKJANAS TPID, 2014, h.16

- b. Mengawasi distribusi barang agar tetap lancar, khususnya komoditas pertanian dari pusat produksi ke daerah pemasaran. Mengatasi gangguan distribusi antara lain karena kendala infrastruktur transportasi, seperti: jalan rusak dan lain-lain.
- c. Menyiapkan infrastruktu, untuk mendukung, baik dalam rangka proses produksi, distribusi, termasuk infrastruktur terkait energi.
- d. Mengawasi Struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga, agar kompetitif khususnya pada beberapa komoditas pangan.
- e. Mengawasi agar tidak terjadi praktek spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang strategis terutama pada saat terjadi gejolak harga.
- f. Mengatur harga/tarif jasa/komoditas strategis yang ditetapkan oleh pemerintah (administered prices) seperti misalnya TTL, tarif angkutan, BBM dan LPG.

Menyangkut peran pemerintah dalam pengendalian dari inflasi, Hasanuzzaman merekomendasi tindakan dibawah ini:

- a. Menjaga kestabilan harga bahan pokok. Ini dilakukan dengan membuat pengaturan agar harga-harga dari bahan pokok tidak mengalami kenaikan melebihi kemampuan masyarakat banyak. Pengaturan dimaksud adalah mencegah terjadi distorsi terhadap keseimbangan supply dan demand.
- b. Mengamankan pasokan barang. Ini dilakukan dengan cara menjaga kelancaran arus barang dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
- c. Peningkatan Produksi. Ini dilakukan terkait dengan menjaga kecukupan pasokan barang-barang kebutuhan pokok. Ini juga terkait dengan saran dan prasarana prduksi yang perlu disiapkan oleh negara.

- d. Melengkapi fasilitas umum. Penyiapan Pasar, Sekolah, Rumah Sakit, Air Minum, Jalan dan sebagainya.
- e. Perencanaan Jumlah Penduduk.
- f. Alquran melarang untuk membunuh anak karena takut miskin, rasul juga menganjurkan agar menikahi gadis yang perawan. Dari Nash ini dapat difahami bahwa pembatasan penduduk tidak dibenarkan jika didasarkan pada alasan ekonomi.
- g. Pengawasan Pasar. Adalah Institusi Hisbah yang melakukan pengawasan agar tidak ada terjadinya kecurangan-kecurangan dipasar, seperti penimbunan barang, pencurian timbangan dan berbagai kecurangan.⁶⁶

3. Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Inflasi

Sebagaimana diuraikan diatas, inflasi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi dari pedagang dan konsumen. Pedagang memiliki kecenderungan untuk menaikkan harga, antara lain, pada ketika mengetahui gaji pegawai akan naik atau harga BBM (Bahan Bakar Minyak) akan naik. Dengan demikian kenaikan harga bukan didasarkan kepada mekanisme yang alamiah, tetapi sematamata disebabkan faktor psikologis. Hal yang sama terjadi pada konsumen, yaitu jika ada kekhawatiran harga akan naik pada waktu-waktu yang akan datang, maka terdapat pula kecenderungan untuk membeli stok barang yang lebih banyak. Pada akhirnya harga terdorong untuk naik karena meningkatnya permintaan terhadap kuantitas barang.

Masyarakat sesungguhnya memiliki peran paling utama dalam mengendalikan inflasi, karena masyarakatlah yang menjadi pelaku utama ekonomi. Penetapan harga naik atau turun dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat selaku pembeli dan penjual dalam rangka mencapai titik equilibrium di pasar.

⁶⁶ Saparuddin Siregar, *Politik Ekonomi Islam Dalam Pengendalian Inflasi*, HUMAN FALAH: Volume 1. No. 2 Juli-Desember 2014 hal, 17

H. Pendekatan Makro Syariah Dalam Mengatasi Inflasi

Pendekatan Islam dalam mengatasi inflasi, Islam mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan penanggulangan inflasi dengan cara:

1. Himbauan moral, dengan cara menghimbau masyarakat untuk hemat dalam berbelanja
2. Mendorong peningkatan produksi dalam negeri
3. Subsidi langsung kepada masyarakat, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai)
4. Perbaikan Infrastruktur, seperti jalan dan lainnya.
5. Membuat Regulasi (aturan) yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil Inflasi yang terus menerus, apalagi yang cukup tinggi harus diatasi dengan mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
6. Kebijakan Moneter
7. Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini dilakukan oleh pihak pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter.

Ada tiga cara yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- b. Menaikkan tarif pajak.
Jika tarif pajak dinaikkan tentu uang yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat semakin berkurang, sehingga harga akan menurun.
- c. Mengadakan pinjaman pemerintah.
Pelaksanaannya dapat dilakukan cara otomatis tanpa kompromi terlebih dahulu misalnya agar uang tidak terlalu banyak beredar.

Kebijakan Non Moneter cara ini bisa ditempuh dengan tiga cara, yaitu:

- a. Menaikkan hasil produksi, sekalipun jumlah uang beredar bertambah.

- b. Kebijakan upah. Pemerintah menganjurkan kepada serikat-serikat buruh untuk tidak menuntut kenaikan upah selagi masih terjadi inflasi tanpa dibarengi dengan peningkatan produksi.
- c. Pengawasan harga, agar harga barang tidak terlalu naik, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan kalau perlu menetapkan harga. Langkah lain untuk mengatasi inflasi adalah dengan melakukan sanering yaitu dengan cara menurunkan nilai nominal rupiah.⁶⁷

Kesimpulan

Dalam teori konvensional inflasi ialah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi disebabkan oleh dua hal, yaitu, inflasi tarikan penawaran (*Demand Full Inflation*) dan inflasi desakan biaya (*Cost push inflation*). Disamping hal tersebut dalam Islam inflasi disebabkan tiga keadaan yaitu pertama, *natural inflation* yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali dalam menekan inflasi. Kedua *Human error inflation* human sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. Ketiga, *emotional market*, yaitu permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu, kegiatan keagamaan, atau terkait dengan budaya atau perilaku. Dampak dari inflasi ialah menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Makin buruknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Di dalam pandangan ekonom muslim, inflasi dapat menimbulkan gangguan, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke sektor non produktif. Cara mencegahnya dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal, dan output yang dilakukan oleh pemerintah serta perbaikan perilaku moral pejabat dan masyarakat.

⁶⁷Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro ...*, h. 1

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Susanti, Hera, dkk (1995), *Indikator-indikator Makro ekonomi*, edisi Kedua, Jakarta: LPFEUL.
- Baasir, F, (2003) *Pembangunan dan Crisis*, Jakarta: Pustaka Harapan
- Karim, Adiwarmanto, A.,(2010) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed,3 Jakarta: Rajawali Pers
- Mankiw, N. G, (2003), *Teori Makroekonomi*, Edisi Kelima Jakarta: Penerbit Erlangga
- Samuelson, Paul. A, and W. D. Nordhaus, (2004) *Ilmu Makroekonomi* Edisi Tujuh Belas, Jakarta: PT. Media Global Edukasi,
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Huda,Nurul, Dkk. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- ISRA. (2012). *Islamic Financial System: Principal & Operations*. Kuala Lumpur: ISRA.
- POKJANAS, TPID. (2014). *Buku Petunjuk TPID*. Jakarta: POKJANAS TPID

Jurnal Ilmiah

- Awaluddin, *Inflasi dalam perspektif Islam (Analisis terhadap pemikiran Al-Maqrizi)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017
- Parakkasi, Idris, *Inflasi dalam perspektif Islam*, LAA MAISIYIR, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016
- Septiatin, Aziz, Mawardi, Mohammad Ade Khairur Rizki, *Pengaruh Inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*, I-Economic Vol. 2. No. 1 Juli 2016
- Al-Bara, *Analisis pengaruh perilaku pedagang terhadap inflasi*, Analytica Islamica, Vol. 5, No. 2, 2016
- Siregar,Saparuddin, *Politik Ekonomi Islam Dalam Pengendalian Inflasi*, HUMAN FALAH: Volume 1. No. 2 Juli-Desember 2014
- Ibrahim,Ida,Musdafiah, *Kaidah fikih dalam mengatasi transaksi yang mengalami inflasi*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1,2014

KEMISKINAN DALAM ASPEK EKONOMI MAKRO SYARIAH

Fika Reflina

Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Agam
*Program Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
fika.fika68@yahoo.co.id*

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinannya. Sedangkan Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup.⁶⁸

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup pelik. Meskipun ekonomi tumbuh dan berkembang selama beberapa tahun terakhir dan berbagai langkah kebijakan pengurangan kemiskinan telah dilakukan, namun nampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan. Target kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintahpun hampir tidak pernah

⁶⁸ Ayu Setyo Rini *Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Desember 2016; 01(2): 17-33 Issn 2085-4617, h.17

tercapai. Kemiskinan tetap menjadi masalah sosial yang paling persistence yang sulit ditanggulangi sebagaimana kemiskinan “abadi” yang terjadi di Afrika (Korankye, 2014).

Bagian ini merupakan bagian utama makalah dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu makalah. Hasil pembahasan dalam bagian ini adalah hasil sesuai dengan rumusan persoalan yang dibahas di latar belakang.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidak berdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidak merataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi aspek yang penting dalam agenda kebijakan pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi negara secara eksplisit menyatakan melalui UUD 1945 pasal 34 bahwa masyarakat miskin menjadi tanggung jawab negara. Pun begitu dengan al-Qur’an yang menjadi kitab suci mayoritas masyarakat Indonesia telah memberi pesan-pesan bagaimana menanggulangi kemiskinan. Alih-alih kemiskinan menjadi semakin berkurang, kemiskinan malah semakin bertambah pesat. Peran pemerintah kembali dipertanyakan, paradoksi ayat-ayat normatif al-Qur’an dengan realitas sehari-hari juga tidak terhindarkan. Realitas kemiskinan tersebut pada akhirnya kembali menarik perhatian guna melahirkan tawaran untuk menanggulangi problem kemiskinan, termasuk al-Qur’an yang berusaha melakukan revolusi bagi masyarakat Arab sebagai salah satu bentuk membangun kesejahteraan masyarakat Arab pada waktu itu. Demikian ini karena al-Qur’an yang terkenal dengan adagiumnya *shalihun likulli zaman wa makan* harus mampu keluar dari nilai-nilai normatifnya sebagai teks dan bisa

mentransformasikan nilai-nilai sosialnya agar solusi al-Qur'an tentang kemiskinan benar-benar dapat diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di tengahnya masyarakat. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Konsep Pengangguran

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan memiliki banyak definisi dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. *Pertama*, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. *Kedua* dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori

miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.⁶⁹

Kemiskinan absolut yang berarti sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari suatu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak. Seseorang yang memiliki pendapatan di bawah pendapatan minimum maka orang tersebut dikatakan miskin.

Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif ini seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu dikatakan tidak miskin. Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan yang telah rendah maka keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Dengan kata lain kemiskinan ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut tinggal.⁷⁰

Ada beberapa pengertian kemiskinan di Indonesia diberikan oleh banyak ahli sebagai berikut:

1. Menurut **Sajogyo** kemiskinan adalah suatu tingkatan kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimal yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

⁶⁹Nunung Nurwati, *Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan* Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008, Hal 3

⁷⁰Arya Dwiandana Putri, *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Tangga Miskin Di Desa Bebandem*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 4, April 2013, h.178

2. **Menurut Salim** kemiskinan adalah keadaan penduduk yang meliputi hal-hal yang tidak memiliki mutu tenaga kerja tinggi, jumlah modal yang memadai, luas tanah dan sumber daya alam yang cukup, keaslian dan keterampilan yang tinggi, kondisi fisik dan rohaniah yang baik dan rangkuman hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan.
3. **Menurut Soemitro** kemiskinan ditandai dengan tingkat hidup rendah dan tertekan. Ini merupakan akibat dari serangkaian keganjilan dan kepincangan yang terdapat pada pertimbangan keadaan dasar dan kerangka susunan masyarakat itu sendiri dan menyangkut beberapa masalah yaitu:
 - a. Keadaan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sebagai sumber produksi yang menyangkut sumber daya alam, modal dan keterampilan. Secara umum dapat dikatakan negara-negara berkembang termasuk Indonesia kekurangan modal keterampilan.
 - b. Kepincangan akibat sebagai sektor ekonomi, modal dan penggunaan teknologi, dimasa lampau dilakukan paling intensif justru disektor-sektor yang terbatas yaitu sektor perkebunan dan pertambangan.⁷¹

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan masyarakat yang harus segera di selesaikan. Perkembangan kemiskinan selalu menjadi polemik masyarakat di berbagai daerah. Di Indonesia, telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Ditengah fenomena kemiskinan di Indonesia tersebut, agama Islam selalu mengajak untuk saling berbagi dan bersedekah karena memiliki banyak manfaat. Dari pihak yang memiliki kemampuan lebih diberikan kepada pihak yang kurang mampu.

⁷¹Silvieni Girsang, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Provinsi Riau*, Jom Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, h. 3-4

Tujuan tertinggi mengharapkan Ridho Allah SWT, juga sebagai tindakan untuk mengasah kepekaan sosial terhadap sesama. Allah berfirman, QS Al Jumuah (62): 10:

Artinya: *"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung"*.

Etos kerja yang disiplin dan semangat yang tinggi juga memiliki peranan yang penting dalam mengentaskan kemiskinan. Al-qur'an tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur dan bermalas-malasan. Firman Allah SWT QS. Al Insyirah (94): 7 :

Artinya: *"Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)"*.

Indikator Kemiskinan

Tiga jenis indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah:

1. Kemiskinan absolut (termasuk timbulnya kemiskinan), indeks jurang kemiskinan dan indeks kesulitan kemiskinan. Kemiskinan absolut mengukur jumlah dari penduduk miskin, sedang timbulnya kemiskinan ditunjukkan sebagai persentase kemiskinann pada total penduduk.
2. Jurang kemiskinan dipihak lain, mengukur rata-rata jurang pemisah antara pendapatan kaum miskin dengan garis kemiskinan,
3. Sedangkan indeks kesulitan adalah indeks jurang kemiskinan yang sensitif didistribusikan.⁷²

Kemiskinan absolut adalah kondisi dibawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan, pakaian dan perlindungan. Selain itu Pendapatan Sosial Ekonomi tahun 2005 indikator yang digunakan BPS dalam penentuan rumah tangga miskin yakni:

⁷²Silvieni Girsang, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*,... h.5-6

- a. Luas lantai rumah
- b. Jenis lantai rumah
- c. Jenis dinding rumah
- d. Fasilitas tempat buang air besar
- e. Sumber air minum
- f. Penerangan yang digunakan
- g. Bahan bakar yang digunakan
- h. Frekuensi makan dalam sehari
- i. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
- j. Kemampuan membeli makanan
- k. Kemampuan berobat ke puskesmas
- l. Lapangan kerja kepala keluarga
- m. Pendidikan kepala keluarga
- n. Kepemilikan aset

Indikator pada Pendapatan Sosial Ekonomi ini didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, sehingga penentuan rumah tangga sampai pada data kepala rumah tangga dan alamat tinggal mereka.⁷³

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

1. Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja.

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

⁷³ Silvieni Girsang, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan, ...* h.5-6

3. Keterbatasan Sumber Alam.
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja.
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan Modal.
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6. Beban Keluarga.
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Bentuk-Bentuk Kemiskinan

1. Kemiskinan Subjektif⁷⁴
Kemiskinan yang terjadi karena setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun sebenarnya tidak terlalu miskin
Contoh: Pengemis musiman di Jakarta

⁷⁴Neng Kamarni, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal *Economac*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2010, h. 7

2. Kemiskinan Absolut

Seseorang (keluarga) yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan mereka.

Contoh: Keluarga yang kurang mampu

3. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

Contoh: kurangnya lapangan kerja menimbulkan banyak pengangguran

4. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan yang terjadi karena keadaan alam yang miskin atau langka sumber daya alam (SDA), sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah.

Contoh: Orang-orang yang ada di Zimbabwe sana kekurangan SDA, karena disekitarnya hanya tanah yang tandus.

5. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang terjadi karena sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern.

Contoh: Suku Badui yang menolak ajaran-ajaran modern dan tetap teguh dengan adat istiadatnya

6. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang terjadi karena ketidak mampuan sistem atau struktur sosial menghubungkan seseorang dengan sumber daya yang ada.

Contoh: Malas bekerja, kasus Freeport⁷⁵

⁷⁵Neng Kamarni, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan...* h.7

Kemiskinan dalam Prespektif Islam

Kemiskinan adalah salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Bahkan Islam memandang kemiskinan merupakan suatu ancaman dari setan. Allah berfirman:

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Karena itulah, Islam sebagai risalah paripurna dan sebuah ideologi yang shahih, sangat consen terhadap masalah kemiskinan dan upaya-upaya untuk mengatasinya. Dalam fiqih, dibedakan antara istilah Fakir dan Miskin. Menurut pengertian syara', Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan Miskin adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari pengertian kedua istilah di atas, nampak bahwa kriteria Fakir sebenarnya telah mencakup kriteria Miskin. Karena itulah dalam pembahasan selanjutnya, kedua istilah tersebut dilebur dalam satu istilah yaitu miskin, dengan pengertian orang-orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, berupa pangan, sandang dan papan.

Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap individu adalah pangan, sandang dan papan. Allah swt menyatakan bahwa kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban

demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.⁷⁶

Langkah Islam Mengatasi Kemiskinan

Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia; seluruh makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakan, pasti Allah menyediakan rizki baginya. Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka.

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”.

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya”. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). Jika demikian halnya, mengapa terjadi kemiskinan? Seolah-olah kekayaan alam yang ada, tidak mencukupi kebutuhan manusia yang populasinya terus bertambah.

⁷⁶Akhmad Mujahidin, *Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni, h. 172-174

Dalam pandangan ekonomi kapitalis, problem ekonomi disebabkan oleh adanya kelangkaan barang dan jasa, sementara populasi dan kebutuhan manusia terus bertambah.

Akibatnya, sebagian orang terpaksa tidak mendapat bagian, sehingga terjadilah kemiskinan. Pandangan ini jelas keliru, bathil dan bertentangan dengan fakta. Secara *i'tiqadiy*, jumlah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah swt. untuk manusia pasti mencukupi. Hanya saja, apabila kekayaan alam ini tidak dikelola dengan benar, tentu akan terjadi ketimpangan dalam distribusinya. Jadi, faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah sistem hidup yang shahih dan keberadaan Negara yang menjalankan sistem tersebut. Oleh karena itu program pemberantasan kemiskinan dan kebodohan oleh pemerintah Propinsi Riau dan gerakan seratus desa mandiri oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan langkah konkret meretas kemandegan ditribusi "kekayaan" kepada rakyat. Islam adalah sistem hidup yang shahih.

Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan; baik kemiskinan alamiyah, kultural, maupun sruktural. Hanya saja, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk kemiskinan, Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu. Bagaimana Islam mengatasi kemiskinan, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁷

Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Primer

Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri dari pangan, sandang dan papan. Terpenuhi-tidaknya ketiga kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi penentu miskin-

⁷⁷Akhmad Mujahidin, *Pengentasan Kemiskinan dalam Prespektif...* h.177-178

tidaknya seseorang. Sebagai kebutuhan primer, tentu pemenuhannya atas setiap individu, tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan ini. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian dan perumahan kepada siapa saja, setiap saat. Sehingga terbayang, rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah dipenuhi. Ini anggapan yang keliru. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Mekanisme tersebut adalah:

Mewajibkan Laki-laki Memberi Nafkah Kepada Diri dan Keluarganya.

Islam mewajibkan laki-laki yang mampu dan membutuhkan nafkah, untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Jadi jelas, kepada setiap laki-laki yang mampu bekerja, pertama kali Islam mewajibkan untuk berusaha sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun terhadap wanita, Islam tidak mewajibkan mereka untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka.

Mewajibkan Kerabat Dekat untuk Membantu Saudaranya.

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut dan lain-lain. Semua ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jika demikian keadaannya lalu siapa

yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya? Dalam kasus semacam ini, Islam mewajibkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka.

Jadi jelas, jika seseorang secara pribadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, karena alasan-alasan di atas, maka kewajiban memenuhi nafkah, beralih ke kerabat dekatnya. Jika kerabat dekat diberi kewajiban untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, bukankah hal ini akan menyebabkan kemiskinan para keluarganya dan dapat berdampak pada menurunnya taraf kehidupan mereka? Tidak dapat dikatakan demikian! Sebab, nafkah tidak diwajibkan oleh syara' kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya. Orang yang mampu menurut syara' adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah*) dan kebutuhan pelengkap (*al-hajat al-kamaliyah*), menurut standar masyarakat sekitarnya.

Mewajibkan Negara untuk Membantu Rakyat Miskin

Bagaimana jika seseorang yang tidak mampu tersebut tidak memiliki kerabat? Atau dia memiliki kerabat, akan tetapi hidupnya pas-pasan? Dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke *bait al mal* (kas negara). Dengan kata lain, negara melalui *bait al mal*, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Rasulullah Saw. pernah bersabda: Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya dan siapa saja yang, meninggalkan 'kalla', maka dia menjadi kewajiban kami. (HR. Imam Muslim) Yang dimaksud kalla adalah orang yang lemah, tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas zakat.⁷⁸

⁷⁸Akhmad Mujahidin, *Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif...* h.178-180

Mewajibkan Kaum Muslim untuk Membantu Rakyat Miskin

Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih ke kaum Muslim secara kolektif.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, kaum Muslim secara individu membantu orang-orang yang miskin. *Kedua*, negara mewajibkan dharibah (pajak) kepada orang-orang kaya, hingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang miskin. Jika, dalam jangka waktu tertentu, pajak tersebut tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara harus dihentikan.

Demikianlah mekanisme bagaimana Islam mengatasi masalah kemiskinan secara langsung. Orang yang bersangkutan diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak mampu, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke Baitul Mal dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari Baitul Mal, dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum Muslim. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan cara kaum Muslim secara individu membantu orang yang miskin; dan negara memungut *dharibah* (pajak) dari orang-orang kaya, hingga mencukupi.

Konsep al-Qur'an Tentang Kemiskinan Al-Qur'an⁷⁹

Berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan

⁷⁹Fauzi Arif Lubis, *Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Tansiq, Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2018, h. 81

sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai 'budak' belaka. Bahkan di antara mereka ada yang rela menggubur buah hatinya karena takut menjadi miskin.

Dalam menjelaskan konsep kemiskinan ini, al-Qur'an biasa menggunakan term faqîr dan miskîn. Secara etimologis, lafadz faqîr berasal dari katafaqura-yafquru-faqârah, yang maknanya lawan dari kaya (*al-ghina*).

Selain faqura, dengan dlamamah pada 'ain fi'il-nya, kata faqîr juga dijumpai pada kata kerja faqara-fathah pada 'ain fi'il-nya yang memiliki makna hafara yang artinya menggali atau melubangi, hazza wa assara fih yang artinya memotong dan memberi bekas, al-dâhiyah wa al-musîbah al-syadidah yang artinya malapetaka dan musibah yang dahsyat, seperti yang dijumpai dalam QS. al-Qiyamah: 25. Namun Al-Isfahani melontarkan akar etimologis yang berbeda mengenai lafadz faqîr. Di dalam memaknai lafadz faqîr, al-Isfahani berpendapat bahwa lafadz faqîr berasal dari kata al-maksûr al-fiqâr (yang berarti patah tulang punggungnya. Hal tersebut menunjukkan beratnya beban yang dipikul sehingga mematahkan tulang punggungnya).

Di dalam al-Qur'an, lafadz faqîr dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 14 kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 268, QS. Ali Imran ayat 181, QS. al-Qasas ayat 24, QS. al-Nisa ayat 6, QS. al-Nisa ayat 135, QS. al-Hajj ayat 28, QS. al-Nur ayat 32, QS. Fathir ayat 15, QS. Muhammad ayat 38, QS. al-Baqarah ayat 271, QS. al-Baqarah ayat 273, QS. al-Taubah ayat 60 dan QS. al-Hasyr ayat 8. Sedangkan secara terminologis, banyak ulama yang mengemukakan makna terminologis tentang faqîr, salah satunya pendapat Abi Abdullah al-Qurtubi ketika menginterpretasikan QS. Al-Taubah ayat 60:

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,*

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan”.

Menurutnya, setidaknya ada 10 pendapat yang menjelaskan tentang makna faqîr. Di antaranya pendapat yang mengemukakan bahwa al-fuqarâ', mufrad kata faqîr, menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefaqiran hidupnya. Berikutnya term yang banyak digunakan untuk menunjukkan orang yang lemah secara ekonomi adalah term miskîn. Secara etimologis, lafadz miskîn merupakan isim masdar yang berasal dari sakana-yaskunu-sukûn/miskîn. Dilihat dari asalnya, sakana-sukûn, kata ini memiliki makna 'diam', 'tetap' atau reda. Al-Asfihani dan Ibn Mansur mengartikan kata ini sebagai 'tetapnya sesuatu setelah ia bergerak'. Selain arti tersebut, kata sakana-sukûn juga bisa diartikan sebagai 'tempat tinggal'.

Langkah-Langkah Pengentasan Kemiskinan dalam Upaya Membangun Kesejahteraan Umat

Perlu disadari, bahwa harta merupakan pit fall seluruh lapisan masyarakat, terkecuali orang-orang tertentu yang dijamin kema'sumannya. Kemiskinan tidak lahir begitu saja, melainkan ada latar belakang dan penyebabnya. Walaupun para ahli ilmu-ilmu sosial sependapat bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi kemiskinan itu sendiri bukanlah suatu gejala terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi.

Langkah-Langkah Penanggulangan Kemiskinan Bisa Dijalankan Melalui Tiga Hal, Yaitu:

1. Rekonstruksi Teologi Kemiskinan.

“Kemiskinan yang disandang oleh orang miskin dan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya merupakan kehendak

dan takdir Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, Dia bisa menjadikan semua manusia menjadi Qarun. Tetapi Tuhan sengaja membatasi rezeki untuk orang yang dikehendaknya, untuk menguji mereka". Ungkapan tersebut merupakan bentuk pembelaan yang sering dilontarkan oleh orang miskin. Hal tersebut disebabkan karena keyakinan mereka bahwa kemiskinan adalah takdir dan kuasa Tuhan, sebuah keyakinan fatalistik. Rekonstruksi teologis yang penulis maksud, adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-matadisebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis 'miskin' itu sendiri, yaitu 'diam atau tidak bergerak'.

Dari sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak atau berusaha dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri. Padahal Allah swt. telah menjamin rizki setiap orang di muka bumi. Kewajiban setiap individu adalah berusaha mencarinya dan keluar dari rongrongan kemiskinan. Allah berfirman dalam QS. Hud ayat 6 dan QS. Al- Dzariyat ayat 58:

Artinya: *"dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya"*. (QS. Hud [11]: 6). Artinya: *"Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh."* (QS. Al-Dzariyat [51]: 58). Maka tidak heran jika Rasulullah pernah berdo'a sebagaimana yang terekam dalam salah satu hadisnya: *"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran"*. (HR. Abu Daud). Nabi SAW mengucapkan do'a tersebut berarti mewajibkan setiap individu untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan itu sama celanya dengan kekufuran dan karena setiap individu harus memerangi kekufuran, berarti juga harus memerangi kemiskinan. Manusia memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak terkecuali kuasa atas dirinya keluar dari kemiskinan dan

melakukan perubahan sosial. Ayat yang sering dirujuk kaitannya dengan hal tersebut adalah QS. Al-Ra'd ayat 11:

Artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*.

Ayat ini berbicara tentang konsep perubahan masyarakat, yang menurut Quraish Shihab, ditafsirkan sebagai sebuah proses perubahan yang memberi posisi manusia menjadi pelaku perubahan. Dalam posisinya sebagai pelaku perubahan, di samping manusia bergerak sebagai wujud personal, juga bagian dari komunitas dan masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut, betapa Allah menegaskan bahwa perubahan sosial, baik personal maupun masyarakat, juga lahir dari kuasa diri.⁸⁰

Dalam konteks kemiskinan, rekonstruksi teologis yang dimaksud penulis adalah melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individu yang meliputi pola pikir, motivasi, pandangan hidup dan segala aspek terkait lainnya. Jika pola pikir masyarakat miskin meniscayakan bahwa miskin adalah takdir Allah, maka keluar dari cengkeraman kemiskinan adalah juga takdir Allah.

2. Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan

Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja. Masalahnya sekarang, apa dosa orang-orang yang lemah yang sudah tidak mampu lagi bekerja? Apa kesalahan para janda yang ditinggal mati suaminya, sementara mereka tidak memiliki simpanan harta yang cukup? Apa kesalahan para orang tua jompo? Apa kesalahan orang-orang yang memiliki penyakit kronis? Fenomena tersebut menegaskan bahwakemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi

⁸⁰Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Al-Maslahah - Volume 13 Nomor 1 April 2017, h.72-74

juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk menanggulangnya.

Dalam konteks ini, hemat penulis, sangat diperlukan adanya kesadaran bersama yang harus dibangun guna menanggulangi kemiskinan, baik kesadaran tersebut sifatnya personal atau individu yang dilakukan oleh masyarakat, maupun kesadaran penuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakannya. Pertama, kesadaran personal. Kesadaran personal atau individu dalam upaya mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang tidak kalah penting. Bahkan kesadaran personal tersebut telah digagas pula oleh al Qur'an.

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Hal itu bisa tumbuh, berangkat dari kesadaran bahwa harta bukan tujuan, melainkan sebatas sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.

Artinya: *"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung."* (QS. Al-Rum [30]: 38).

Dalam ayat yang lain, betapa Allah menjanjikan balasan yang sangat besar kepada setiap individu yang mendermakan hartanya kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Allah menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

Artinya: *"siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."* (QS. Al-Baqarah [02]: 245).

Secara etimologis, lafadz qardan dalam ayat tersebut bermakna 'pinjaman' suka rela yang didermakan seseorang kepada orang lain. Sedangkan makna yang dimaksud dalam

ayat tersebut, menurut Ibn Katsir, sebagaimana pendapat yang bersumber dari Umar dan beberapa ulama lainnya, adalah infak di jalan Allah. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah pemberian kepada keluarga.⁸¹

Dengan demikian, maksud ayat tersebut adalah barang siapa yang membantu sesama, baik orang lain maupun keluarga, maka Allah akan melipatgandakan pemberian tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 26. Kedua, peran pemerintahan. Telah penulis singgung sebelumnya, aspek pemerintahan bukan merupakan sarana utama. Namun demikian, peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Indonesia sebagai negara penganut konsep welfare state (negara sejahtera) seharusnya sudah mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya, namun dalam realitasnya hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Membangun Etos Kerja Individu Tawaran

Yang terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Berbeda dengan dugaan sementara orang yang beranggapan bahwa Islam kurang menyambut baik kehadiran harta. Pada hakikatnya, pandangan Islam terhadap harta sangat positif. Manusia diperintahkan Allah swt. untuk mencari rezeki bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk mencari apa yang diistilahkan dengan fadlullah, yang secara harfiah berarti 'kelebihan' yang bersumber dari Allah swt. Kelebihan yang bersumber dari Allah SWT, tersebut hanya bisa digapai melalui faktor etos kerja yang dimiliki seseorang.

⁸¹Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*,... h.76

Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Menurut Musa Asy'ari, etos kerja adalah rajutan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam bekerja, yang kemudian membentuk semangat yang membedakannya, antara yang satu dengan yang lainnya. Etos kerja dalam Islam dengan demikian merupakan refleksi pribadi seseorang yang bekerja dengan bertumpu pada kemampuan konseptual yang bersifat kreatif dan inovatif.⁸²

Dampak Kemiskinan dan Kesenjangan

Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks.

1. Pengangguran.

Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi dan tingkat pengeluaran rata-rata. Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan.

2. Kekerasan.

Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat

⁸²Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*,... h.76-78

bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak

3. Pendidikan.

Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

4. Kesehatan.

Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.

5. Konflik sosial bernuansa SARA.

Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan “keamanan” dan perlindungan hukum dari

negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.⁸³

Solusi Untuk Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

1. Memperhatikan Sektor UMKM

Menurut Puspayoga, kesalahan itu terletak pada belum diperhatikannya upaya pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM di Tanah Air. "Selama ini UKM belum tersentuh upaya pemberdayaan dengan optimal," katanya.

Ia berpendapat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya jika pemerataan pendapatan tidak terdistribusi dengan baik. Dengan kata lain bahwa kesejahteraan hanya dirasakan oleh segelintir kalangan saja.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong semua pihak untuk turut serta dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan para pelaku UMKM di Tanah Air melalui berbagai cara. Pihaknya sendiri salah satunya mengembangkan skema kredit usaha rakyat (KUR) untuk para pelaku usaha mikro dengan suku bunga 9 persen per tahun.

2. Kebijakan Anti Kemiskinan

Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB, ILO, UNDP dan lain sebagainya.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantara-nya dapat dibagi menurut waktu, yaitu:

⁸³ Iman Gea, Makalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. https://www.academia.edu/37683419/Makalah_Kemiskinan_dan_Kesenjangan_Pendapatan_di_Indonesia PEREKONOMIAN_INDONESIA_ diakses pada tanggal 30 April 2019

Intervensi Jangka Pendek, Berupa:

Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan Manajemen lingkungan dan SDA Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan Peningkatan proteksi sosial

Intervensi Jangka Menengah dan Panjang, Berupa:

1. Pembangunan/penguatan sektor usaha
2. Kerjasama regional
3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
4. Desentralisasi
5. Pendidikan dan kesehatan
6. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
7. Pembagian tanah pertanian yang merata⁸⁴

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.⁸⁵

Program ini dilator belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Bahkan

⁸⁴Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*,... h.79-80

⁸⁵Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, h.23

dalam Alquran dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma'uun 1-7:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna”.

Dalam surah ini, Allah SWT. ingin memberitahu kita tentang siapakah yang dimaksud sebagai pendusta agama. orang yang menghardik anak yatim yaitu yang mengusir anak yatim atau mengeluarkan ucapan-ucapan keras ketika ia datang meminta sesuatu yang diperlukan. Semata-mata karena meremehkan kondisinya yang lemah dan tiadanya orang tua yang mampu membela dan memenuhi kebutuhannya dan juga tedorong oleh kesombongannya karena menganggap dirinya lebih kuat dan lebih mulia.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, apalagi sebagai pemerintah yang bertanggung jawab atas rakyatnya, maka hendaklah memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkannya agar mereka dapat keluar dari kesulitannya. Dalam Islam juga diatur tentang bantuan yang diberikan pada orang yang membutuhkan seperti pemberian zakat, infaq dan sedekah. Namun diantara ketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah infaq, dimana infaq merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sebagaimana Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga dapat terlepas dari belenggu kemiskinan.

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Pada Maret 2018

Menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2018. Pada tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 21,20 persen, sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,09 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,34 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,98 juta orang).

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2018

Tabel 1: Tingkat Kemiskinan Indonesia

Pulau	Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Total
Sumatera	8.65	11.66	10.39
Jawa	6.82	12.81	8.94
Bali Dan Nusa Tenggara	9.18	17.77	14.02
Kalimantan	4.33	7.6	6.09
Sulawesi	5.83	13.68	10.6
Maluku Dan Papua	5.03	29.15	21.20
Indonesia	7.02	13.2	9.82

Sumber: Badan Pusat Statistik⁸⁶

Kesimpulan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah.

Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok

⁸⁶ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>

baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Seperti yang sudah kita ketahui dan kita lihat pada saat sekarang ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada dibawah dan banyaknya kemiskinan yang disebabkan oleh banyaknya pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak pengangguran dan membuat orang-orang tidak takut untuk bertindak kriminal agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dari masalah kemiskinan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan cara menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, memberikan pelatihan wirausaha kepada masyarakat dan memberi bantuan kepada masyarakat miskin.

Oleh karena itu salah satu upaya pemerintah yang sudah di laksanakan melalui program-program bantuannya haruslah diawasi dan diperhatikan agar tepat sasaran dan pembagiannya yang merata kedaerah-daerah yang sulit dijangkau sekalipun. karena banyaknya program yang membantu dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia membuat masyarakat antusias dan sangat berharap agar mereka juga mendapatkan bantuan sesuai dengan keadaan ekonomi keluarganya yaitu bagi mereka yang menengah kebawah, meskipun tidak secepat yang kita bayangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan akan tetapi upaya pemerintah sangatlah berpengaruh besar terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat Indonesia apalagi dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan yang sudah berlangsung semenjak tahun 2007 sampai sekarang.

Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/ keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita.
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)
5. Memiliki anak SMA/SMK/Paket C/Sederajat (usia 15-18 tahun)
6. Memiliki Anak atau anggota keluarga Penyandang Disabilitas Berat
7. Memiliki Anggota keluarga atau orang tua Lansia umur 60 Tahun ke atas

Adapun jumlah bantuan yang diterima setiap rumah tangga miskin peserta PKH dapat dilihat pada tabel berikut:⁸⁷

Tabel 2
Skenario Bantuan PKH

Skenario Bantuan	Jumlah Bantuan
Bantuan Tetap	Rp. 550. 000/ Tahun
Bantuan bagi RTSM yang memiliki: anak usia dibawah 6 tahun, ibu hamil	Rp. 2. 400. 000/ Tahun
anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)	Rp. 2. 400. 000/ Tahun
Anak peserta pendidikan setara SD/MI/Paket A/SDLB	Rp. 900. 000/ Tahun
Anak peserta pendidikan setara SMP/Mts/Paket B/SMLB	Rp. 1. 500. 000 / Tahun

PKH diharapkan mampu merubah pola pikir orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka mampu

⁸⁷Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, h. 23

mengarahkan anak-anak mereka untuk terus belajar demi masa depan dan diharapkan para orangtua mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-sebaiknya.

Batas Kemiskinan Menurut BPS

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber Data: Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.⁸⁸

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan

⁸⁸ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>

diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data:

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Rumus Penghitungan:

$GK = GKM + GKNM$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:
- Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

Daftar Pustaka

Buku Teks

Badan Pusat Statistik

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, hal 23

Jurnal Ilmiah

Rini, Ayu Setyo *Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Desember 2016; 01(2): 17-33 Issn 2085-4617 Hal 17

Nurwat, Nunung I, *Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan* Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008, Hal 3

Putri, Arya Dwiandana, *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah*

Girsang, Silvieni, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Provinsi Riau*, Jom Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, Hal 5-6

Mujahidin, Akhmad, *Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni, Hal 176-178

Lubi, Fauzi Arif s, *Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Tansiq, Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2018 Hal 81

Makalah Ilmiah dan Artikel

Iman Gea, Makalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia https://www.academia.edu/37683419/Makalah_Kemiskinan_dan_Kesenjangan_Pendapatan_di_Indonesia_PEREKONOMIAN_INDONESIA diakses pada tanggal

PENGANGGURAN DALAM ASPEK EKONOMI MAKRO SYARIAH

Fauziah Nur. H

Ibu Rumah Tangga

Program Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam IAIN Bukittinggi

fauziahnur336@gmail.com

Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak Negara, termasuk dinegara kita sendiri yaitu Indonesia. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana pembangunan ekonomi masyarakat, selalu dikatakan dengan tujuan menurunkan angka pengangguran, namun pengangguran tetap saja terjadi, baik kota maupun desa, yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kriminalitas dan juga masalah sosial politik yang juga semakin meningkat dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat persoalan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang tampak belum cukup untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja.

Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara penyedia lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia

dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur.

Di suatu negara yang berkembang, pengangguran menjadi masalah yang sangat serius karena berdampak bagi keadaan ekonomi dan sosial di suatu Negara. Namun pada Negara yang maju permasalahan pengangguran hanya masalah siklus ekonomi.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2007).⁸⁹

Sekolah tinggi tidak menjamin kemudahan mendapatkan pekerjaan. Penganggur terdidik justru meningkat. Lulusan sekolah rendah malah cepat mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan untuk kaum terdidik meluas, tetapi banyak yang tak mampu memenuhi persyaratan kerja.

Ketika tingkat pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Berikut perkembangan pengangguran yang ada di Indonesia

⁸⁹ Dian Linggi, Bambang Wiwoho, *Analisis Tingkat Pengangguran di Kab. Banggai Tahun 2009-2013*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 1, Nomor 2, September 2016, h. 167

Tabel 1:
Tingkat Pengangguran Terdidik di Indonesia

TK. Pendidikan	Tahun	
	Feb 2018	Feb 2019
SD	2. 67%	2. 65%
SMP	5. 18%	5. 04%
SMA	7. 19%	6. 78%
SMK	8. 92%	8. 63%
Diploma	7. 92%	6. 89%
Universitas	6. 31%	6. 24%

Sumber: Badan Pusat Statistik⁹⁰

Dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran paling tinggi adalah tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) 8,63%, turun tipis dari posisi 8,92% pada Februari 2018. Pengangguran terbuka tertinggi juga terjadi di kalangan tamatan diploma I, II dan III yang mencapai 6,89% dan SMA 6,78%. Yang memegang ijazah universitas, minimal S-1, ada 6,24% pengangguran terbuka. Pengangguran dengan pendidikan maksimal SD hanya 2,65%. Itu karena mereka tidak memilih-milih pekerjaan. Pekerjaan apa pun mereka jalani.

Kondisi ini cukup memprihatinkan. SMK didesain untuk mencegah pengangguran. SMK menjadi *link* atau jembatan antara pendidikan formal dan perusahaan agar tamatannya bisa langsung bekerja. Kurikulum dan mata pelajaran di SMK harus *match* atau sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Namun, dalam kenyataan, SMK justru menghasilkan paling banyak penganggur terbuka. Itu berarti *link and match* tidak jalan. Alumni SMK tidak mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. SMK gagal menjadi *link* ke dunia usaha akibat kualitas pendidikannya yang tidak *match* dengan dunia usaha.

Oleh karena itu, bisa dimengerti apabila laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5% dalam lima tahun terakhir.

⁹⁰Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>

Penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Sekitar 40,51% pekerja Indonesia hanya mengenyam pendidikan SD dan 17,75% berpendidikan SMP. Jika digabung, 59% tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan maksimal SMP.

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari tingkat pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat diikuti pula dengan angkatan kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.

Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar. Salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. Saat ini pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek.

Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa menjadi bosan. Kita hanya pandai dalam teori tetapi gagal dalam praktek dan dalam

profesionalisme pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga kerja terdidik kita juga adalah karena kita terlalu melihat pada gelar tanpa secara serius membenahi kualitas dari kemampuan di bidang yang kita tekuni.

Masalah ketersediaan lapangan kerja di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran yang besar dan pendapatan yang relatif rendah. Pengangguran dapat menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat membawa berbagai dampak pada proses pembangunan ekonomi. Agar tidak terus berlanjut, pemerintah harus mengatasi masalah pengangguran, karena masalah pengangguran ini adalah masalah yang sangat vital dan sensitif bagi kestabilan ekonomi dan keamanan suatu negara. Pengangguran dapat membawa dampak yang sangat berbahaya jika tidak diatasi. Pengangguran berdampak dalam bidang ekonomi, sosial maupun secara individual pada pelaku pengangguran itu sendiri. Begitu pentingnya pengangguran ini untuk segera diatasi, maka penulis tertarik bahwa makalah ini akan membahas tentang Pengangguran Dalam Aspek Ekonomi Syariah yang dikaji didalamnya mengenai konsep pengangguran, sebab akibat terjadinya pengangguran, dampak pengangguran itu sendiri serta solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi pengangguran tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Konsep Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Orang yang sedang tidak bekerja contohnya: Ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Masalah pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.⁹¹

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah masalah sosial lainnya.⁹²

Menurut Soeroto pengangguran dalam pengertian makro ekonomi adalah sebagai angkatan kerja yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam pengertian mikro pengangguran adalah seseorang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan akan tetapi sedang tidak mempunyai pekerjaan. Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.⁹³

Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud pengangguran adalah suatu keadaan di mana orang-orang atau tenaga kerja yang mau serta mampu melaksanakan pekerjaan, tetapi tidak dapat terlaksana karena ada sesuatu

⁹¹Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014,) h.132

⁹²Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*,... h.132

⁹³Muhammad Mada, Khusnul Ashar, *Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Terdidik Di Indonesia*, JIEP-Vol. 15, No 1 Maret 2015, h. 37

yang menghalangi untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.⁹⁴

$$\text{Tk. Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Yang Nganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Tingkat pengangguran yang tinggi menggambarkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pendapatan, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian.

Jenis dan Macam Pengangguran

Berdasarkan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi tiga jenis, yaitu:⁹⁵

1. Pengangguran Friksional / *Frictional Unemployment*

Pengangguran Jenis ini adalah pengangguran yang muncul karena pencari kerja masih mencari pekerjaan yang sesuai jadi ia menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan, pengangguran ini tidak menimbulkan masalah dan bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran jenis ini karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dengan pelamar kerja. Kesulitan temporer ditimbulkan karena proses bertemunya pihak pelamar kerjadengan penyedia pekerjaan yang tentunya perlu waktu untuk sesuai dengan target kerja. Pihak penyedia pekerjaan berharap kualitas kerja yang dipeoleh dan sebaiknya pihak pencari kerja perlu waktu untuk dapat memutuskan pilihannya.

⁹⁴Naf'an, *Ekonomi Makro*, ... h.132

⁹⁵Naf'an, *Ekonomi Makro*, ... h.133

Pengangguran Frikional juga diakibatkan adanya jarak dan kurangnya informasi, pelamar pekerjaan tidak mengetahui adanya lowongan kerja dan pihak penyedia kerja kesulitan untuk mencari pekerja sesuai dengan syarat yang diharapkan.

2. Pengangguran Struktural / *Struktural Unemployment*

Pengangguran structural adalah pengangguran yang muncul karena perubahan struktur dan komposisi perekonomian. Pengangguran struktural adalah keadaan dimana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. misalnya, Adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Peralihan dari pertanian ke industri perlu adanya penyesuaian yang tentunya perlu mendapat pendidikan yang sesuai dengan strukturnya.

Pengangguran struktural muncul ketika upah minimum berada diatas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Aturan upah minimum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekakuan harga. Serikat pekerja dan ancaman pembentukan adalah sebab lainnya. Akhirnya teori upah efisiensi menyatakan bahwa untuk berbagai alasan, perusahaan akan upah yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja.

Pengangguran struktural juga bisa disebabkan karena pengangguran alat yang semakin canggih. Pekerjaan yang semula yang dilakukan banyak tenaga kerja, karena adanya peralatan canggih maka tentu saja hanya memerlukan beberapa tenaga kerja. Pengangguran ini sulit diatasi karena terkait dengan strategi pembangunan sebuah

negara. Meskipun demikian, pengangguran jenis ini bisa diatasi dengan melakukan pelatihan agar terciptanya tenaga kerja yang terampil.

3. Pengangguran musiman / *Seasonal Unemployment*

Pengangguran ini terjadi karena faktor musim, misalnya para pekerja di industri yang mengandalkan hidupnya dari pesanan. Pengangguran jenis ini juga tidak banyak menimbulkan masalah. Meskipun belum ada bukti empirik yang mendukung, pengangguran yang muncul karena keterpurukan industri sebagian besar adalah pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Pengangguran friksional yang muncul di Indonesia tidak karena menganggur secara sukarela melainkan karena kondisi krisis ekonomi.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang dihubungkan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu Negara atau keadaan sebuah Negara mengalami resesi. Kegiatan perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Pada masa resesi tingkat pengangguran siklis meningkat disebabkan beberapa hal, diantaranya orang akan banyak kehilangan pekerjaan meningkat dan diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan pekerjaan kembali karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

5. Pengangguran terdidik

Pengangguran terdidik adalah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dan tidak bekerja. Jika didasarkan pada kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun, maka golongan terdidik adalah golongan di mana telah menempuh kewajiban pendidikan dasar dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pengangguran menurut lama waktu kerja dapat dibedakan menjadi:⁹⁶

1. Pengangguran Terbuka (*open unemployment*)

Pengangguran terjadi dimana situasi seseorang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan orang sulit memperoleh pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia jumlahnya terbatas sehingga orang betul-betul menganggur dan tidak bekerja sama sekali.

2. Setengah Menganggur (*under unemployment*)

Pengangguran terjadi karena situasi dimana orang bekerja, tetapi tenaganya kurang termanfaatkan bila diukur dari jumlah jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan yang diperoleh, seorang pekerja lepas (*freelance*) tidak ada kepastian waktu dalam mengerjakan pekerjaan.

3. Pengangguran Terselubung (*disguised unemployment*)

Pengangguran tersebut terjadi karena tenaga kerja bekerja tidak bekerja secara optimal. Ketidaksesuaian posisi pekerjaan yang dikerjakan tenaga kerjatentunya akan berpengaruh produktivitas kerja dan penghasilan rendah. Misalnya pekerja lulusan bidang informatika komputer mengerjakan pekerjaan pada posisi bidang akuntansi. Posisi pekerjaan ini tentu akan menghambat proses kerja yang ada. Pengangguran terselubung juga dapat terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja yang mengerjakan suatu pekerjaan yang melebihi batas optimal. Misalnya, satu petak sawah bisa diselesaikan dua tenaga kerja dalam sehari tetapi dikerjakan oleh lima pekerja dalam sehari.

Pengangguran juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (*voluntari unemployment*). Dan pengangguran dukalara (*involuntari unemployment*). Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena

⁹⁶Naf'an, *Ekonomi Makro*, ... h.133

ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan pengangguran dukalara adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan.

Faktor-Faktor Terjadinya Pengangguran

Menurut Marhaeni dan Manuati (2004) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebagai berikut:⁹⁷

1. Kekakuan Upah/Tingkat upah, dimana tingkat upah memegang peranan penting atau sangat berpengaruh besar dalam kondisi ketenagakerjaan.

Teori Upah Efisiensi, Alasan lain mengapa pengangguran selalu terjadi dalam perekonomian selain pencarian kerja, peraturan upah minimum dan serikat pekerja, di jelaskan oleh teori upah efisiensi. Menurut teori ini, perusahaan-perusahaan beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas titik keseimbangan. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja.⁹⁸

Jika upah di pertahankan di atas titik keseimbangan karena segala alasan maka hasilnya adalah pengangguran. Peraturan upah minimum adalah salah satu alasan mengapa upah menjadi terlalu tinggi. Apabila pencari kerja menjadi alasan terjadinya pengangguran, para pekerja mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Sebaliknya, apabila upah berada diatas titik keseimbangan, jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaan dan para pekerja menjadi

⁹⁷Noorfath Hasanah dkk, *Pengaruh Migrasi Masuk Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Kota Pekanbaru*, Jomfekon, Vol. 2 no. 1 Februari 2015, hal 5

⁹⁸Warda Harahap dan Nasri Bachtiar, *Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia*, hal 7, <http://repo.unand.ac.id/5117/>

pengangguran karena mereka menunggu adanya lowongan pekerjaan.

2. Teknologi, penggunaan teknologi yang tepat guna akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan jumlah pengangguran. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang digunakan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi
3. Fasilitas modal, fasilitas modal mempengaruhi permintaan tenaga kerja melalui dua sisi. Pengaruh substitutif, dimana bertambahnya modal akan mengurangi permintaan tenagakerja
Pengaruh komplementer, dimana bertambahnya modal akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengelola modal yang tersedia.
4. Struktur perekonomian, perubahan struktur ekonomi menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja.

Menjadi pengangguran bukanlah keinginan seseorang, namun keadaanlah yang terkadang memaksa mereka. Berikut beberapa penyebab terjadinya pengangguran menurut Naf'an (2014) yaitu: ⁹⁹

1. Penduduk relatif banyak sedangkan kesempatan kerja/ lapangan kerja relatif rendah
Jumlah penduduk yang cukup tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan kerja maka jumlah angkatan kerja tidak semua tertampung dalam dunia kerja.
2. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
Pendidikan dan keterampilan yang rendah tidak dibutuhkan oleh pihak badan usaha kaena dengan pendidikan yang rendah dan keterampilan yang rendah tidak akan meningkatkan produktivitas kerja dan hasil produksi

⁹⁹Naf'an, *Ekonomi Makro*, ... h.133

3. Teknologi yang semakin maju yang belum terimbangi oleh kemampuan manusia
Teknologi dan kemampuan yang tinggi begitu cepat tidak diimbangi dengan kemampuan manusia untuk menguasai maka banyak badan usaha hanya menerima yang mampu menguasai teknologi tersebut. Bagi yang tidak menguasai teknologi tersebut akan tersingkir dalam persaingan kerja.
4. Pengusaha yang selalu ingin mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi
Pengusaha hanya menerapkan cara berpikir yang rasionalis sehingga tenaga kerja dipaksa untuk bekerja seoptimal mungkin untuk mengejar target. apabila tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan target maka tenaga kerja tersebut tidak diperlukan lagi.
5. Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim
Pekerjaan yang dipengaruhi musim dapat menimbulkan pengangguran seperti, Pertanian, Perkebunan. Setelah masa menanam selesai maka banyak tenaga kerja yang tinggal menunggu hasilnya. Untuk menunggu hasil mereka kebanyakan menganggur dan akan bekerja kembali apabila musim panen nanti telah tiba.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut: ¹⁰⁰

- a. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi
- b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama

¹⁰⁰Sitti Hasbiyah, *Penguatan Ekonomi dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Makasar*, Jurnal Ekonomi Volume 2 Nomor 1 Juni 2014, h.30

atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

- c. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
- d. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

Dampak-dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu:¹⁰¹

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan

¹⁰¹Sitti Hasbiyah, *Penguatan Ekonomi dalam Mengatasi Pengangguran*, h.31

nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun.

Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

2. Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

- a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
- b. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan.
- c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

Selanjutnya Akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian menurut Samuelson, adalah:¹⁰²

- a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan output aktual yang dicapai lebih rendah dari atau dibawah output potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang di capai adalah lebih rendah dari tingkat yang akan dicapainya.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang, pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.
- c. Pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini jelas bahwa penganggur tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang

Kebijakan Mengatasi Pengangguran Dilihat Dari Jenis Pengangguran

Adanya berbagai macam pengangguran dibutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan cara-cara untuk mengatasi pengangguran, yang terjadi. Adapun cara mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰² Syahril, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 2, November 2014, h. 80

¹⁰³Suraji, *Pengangguran Dari Perspektif Ekonomi dan Pemikiran Ibn Khaldun*, Jurnal Mimbar, Vol 8 no 17, 2015, h.7

1. Pengangguran friksional dapat diatasi dengan cara:
 - a. Perluasan jaringan komunikasi dan informasi di berbagai bidang terutama di bidang industri.
 - b. Mengintensipkan pengembangan sektor informal di berbagai bidang.
 - c. Program transmigrasi ditingkatkan untuk membuka lahan baru di pulau-pulau terpencil yang berbatasan dengan negara tetangga.
 - d. Pembukaan proyek-proyek umum, oleh pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat yang sifatnya padat karya.
 - e. Kemudahan kredit untuk merangsang investor baru di berbagai bidang.
2. Mengatasi pengangguran struktural dengan cara sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja.
 - b. Memindahkan tenaga kerja ke tempat yang kekurangan tenaga kerja
 - c. Mendirikan industri padat karya di wilayah pengangguran
 - d. Mengadakan pelatihan tenaga kerja.
3. Pengangguran musiman diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
 - b. Melakukan pelatihan di bidang ketrampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.
4. Pengangguran teknologi dapat diatasi dengan cara:
 - a. Selektif dalam memilih teknologi
 - b. Meningkatkan pendidikan di bidang teknologi.
 - c. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Pengangguran konjungktural siklus diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa

- b. Meningkatkan daya beli masyarakat.
6. Pengangguran voluntary sukarela dapat diatasi sebagai berikut:
 - a. Memotivasi angkatan kerja bahwa dengan bekerja kemakmuran dan kesejahteraan akan lebih meningkat.
 - b. Kedudukan dan status sosial akan lebih tinggi dengan bekerja.
7. Pengangguran deflasiioner terbuka diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membuka kesempatan kerja di luar negeri
 - c. Menjalinkan kerja sama antar negara dalam urusan tenaga kerja diintensifkan.
 - d. Peningkatan sistem padat karya di berbagai daerah di Indonesia

Kebijakan Ekonomi Mikro dan Makro Terhadap Pengangguran

Solusi masalah pengangguran di Indonesia dilihat dari 2 (dua) kebijakan diantaranya kebijakan mikro (khusus) dan kebijakan makro.¹⁰⁴

Berikut merupakan kebijakan mikro ada 10 solusi yaitu (1) Pengembangan *mindset* dan wawasan penganggur; (2) segera melakukan pengembangan kawasan khususnya yang tertinggal dan terpinggirkan sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi; (3) segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur; (4) segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok; (5) mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah diwilayah perkotaan lainnya seperti sampah, pengendalian banjir dan lingkungan

¹⁰⁴Syahril, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi...* hal 82

yang tidak sehat; (6) mengembangkan suatu lembaga antar kerja secara professional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job senter yang dibangun dan dikembangkan secara professional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja; (7) menyeleksi Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim keluar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI keluar negeri; (8) segera harus disempurnakan kurikulum dan system pendidikan nasional (Sisdiknas). System pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan; (9) upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK); (10) segera mengembangkan potensi kelautan kita.

Sedangkan kebijakan makro tentang solusi masalah pengangguran mengenai moneter seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiscal (Departemen Keuangan) dan lainnya.

Kebijakan makro dalam mengatasi pengangguran dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: ¹⁰⁵

- a. Kebijakan Fiskal: Mengurangi Pajak dan menambah pengeluaran pemerintah
- b. Kebijakan Moneter: Menambah pengeluaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu.
- c. Kebijakan dari Segi Penawaran: Mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangi pajak perusahaan dan individu

Solusi Mengatasi Pengangguran

Strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengangguran yaitu: ¹⁰⁶

¹⁰⁵Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), h.354

1. Menciptakan infrastruktur yang bisa menyebabkan atau terserapnya banyak orang yang bekerja.
2. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
3. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.
4. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.
5. Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera

¹⁰⁶Yulna Dewita Hia, *Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran*, Journal of Economic and Economic Education Vol.1 No.2, 2013, h.212

dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.

6. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.
7. Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.
8. Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (minimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.
9. Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang ber-

orientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.

11. Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif

Tujuan Beberapa Kebijakan Pemerintah¹⁰⁷

Uraian berikut menerangkan dari beberapa tujuan pemerintah dalam mengatasi pengangguran yaitu:

a. Tujuan Bersifat Ekonomi

Tujuan untuk mengatasi pengangguran berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama berikut: untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, meningkatkan taraf hidup kemakmuran masyarakat dan memperbaiki distribusi pendapatan.

b. Tujuan Bersifat Sosial dan Politik

Tujuan untuk mengatasi pengangguran berdasarkan tujuan sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi, Tanpa kestabilan sosial dan politik usaha – usaha untuk mengatasi ekonomi tidak akan tercapai dengan mudah. Masalah sosial dan politik yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran yaitu: Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, Menghindari masalah kejahatan, Mewujudkan kestabilan politik.

¹⁰⁷Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*,... h.331

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengangguran¹⁰⁸

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui *Gross Domestic Product* (GDP) yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran

Pengangguran berhubungan juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin rendah harapan untuk membuka kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.

Definisi Pengangguran Dalam Islam

Definisi pengangguran sebagaimana yang ada dalam ekonomi konvensional yang membatasi penganggur hanya pada pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, adalah definisi yang sangat sempit bila dilihat dari kacamata ajaran islam tentang kerja. Dalam perspektif Islam kerja menyangkut segala aktivitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah

¹⁰⁸ M. Wardiansyah; Yulmardi; Zainul Bahri, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran*, e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5. No.1, Januari – April 2016, h.15

maupun rohaniah yang dimaksudkan untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara Syar'i. Ketika seseorang tidak mau menggunakan potensinya maka itulah pengangguran yang amat membahayakan diri dan masyarakatnya.¹⁰⁹

Secara moral islam orang yang demikian adalah menganggur yang memikul dosa. Sedangkan yang terus memfungsikan potensinya baik modal, tenaga maupun pikiran tidak termasuk kategori menganggur yang menyalahi ajaran Islam. Ketika seseorang tidak bekerja namun ia masih terus berfikir keras bagaimana ia bisa memproduktivitaskan dirinya sehingga bisa menghasilkan kerja yang produktif maka ia secara moral islam memenuhi kewajiban kerja dalam islam dan tidak menanggung dosa pengangguran.

Jenis Pengangguran Dalam Islam

Menurut Yusuf al-Qardawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:¹¹⁰

1. Pengangguran jabariyah (terpaksa)

Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak memilih status sehingga harus terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai skill sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya, atau seseorang telah mempunyai skill tetapi skillnya tidak berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

2. Pengangguran khiyariyah

Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal pada dasarnya dia mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan ber-

¹⁰⁹Naf'an, *Ekonomi Makro*,... h.138

¹¹⁰Moh. Subhan, *Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam*, JES, Volume 3, Nomor 1, September 2018, h.28-29

malas-malasan. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak pernah berusaha dan mengusahakan suatu pekerjaan apapun, kepribadiannya malas hingga menjadi "sampah masyarakat".

Apapun jenis pengangguran akan berdampak pada seluruh lini kehidupan manusia, baik bidang perekonomian, sosial-politik, budaya bahkan agama. Dampak negatif pengangguran terhadap sektor perekonomian adalah pertama, masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Hal ini terjadi karena ketika ada pengangguran maka pendapatan riil masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensialnya sehingga tingkat kemakmurannya akan rendah pula.

Penyebab Pengangguran Dalam Islam

Penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor individu dan faktor sistem sosial dan ekonomi.¹¹¹

1. Faktor Individu terdiri dari kemalasan, cacat /uzur dan rendahnya pendidikan dan keterampilan penjelasan sebagai berikut:

a. Faktor Kemalasan

Pengangguran yang berasal dari kemalasan individu sebenarnya sedikit. Nmaun dalam sistem materialis dan politik sekularis banyak mendorong masyarakat menjadi malas, seperti sistem penggajian yang tidak layak atau maraknya perjudian. Banyak orang yang miskin menjadi malas bekerja karena berharap menjadi kaya mendadak dengan cara menang judi atau undian.

b. Faktor cacat/uzur

Dalam sistem kapitalis hukum rimba. Karena itu tidak ada tempat bagi mereka yang cacat / Uzur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

¹¹¹Naf'an, *Ekonomi Makro*, ... h.138

- c. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Keterampilan
Rendahnya pendidikan menyebabkan rendahnya juga keterampilan yang mereka miliki. Belum lagi sistem pendidikan Indonesia yang tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Pada akhirnya mereka menjadi pengangguran intelek.

2. Faktor Sistem Sosial dan Ekonomi

Faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia, diantaranya:

- a. Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan

Misalnya tahun depan diperkirakan akan muncul para pencari tenaga kerja baru sekitar 2 juta orang, sedangkan yang bisa ditampung saat ini dalam sektor formal hanya 30%. Sisanya di sektor informal atau menjadi pengangguran.

- b. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat

Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru. Kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan ekonomi juga mengakibatkan banyaknya ketimpangan dan pengangguran. Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada juga mengakibatkan terjadinya pengangguran.

- c. Pengembangan Sektor Ekonomi non Real

Dalam sistem ekonomi kapitalis muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang disebut sektor non real serta bursa efek dan saham perbankan sistem ribawi maupun asuransi. Sektor ini tumbuh pesat bahkan nilai transaksinya bisa mencapai 10 kali lipat dari pada sektor real

Pertumbuhan uang yang beredar yang jauh lebih cepat dari pada sektor real ini mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunya produksi dan investasi di sektor real. Akibatnya hal itu mendorong kebangkrutan perusahaan dan PHK serta pengangguran. Peningkatan sektor non real juga mengakibatkan harta yang beredar hanya dikelpompok orang tertentu dan tidak memiliki kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

d. Banyaknya Tenaga Kerja Wanita

Peningkatan jumlah tenaga kerja wanita mengakibatkan persaingan pencari kerja antara wanita dan laki-laki. Akan tetapi, dalam sistem kapitalis untuk efisiensi biaya biasanya diutamakan adalah wanita karena mereka mudah diatur dan tidak banyak menuntut, termasuk dalam masalah gaji. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya pengangguran di pihak laki-laki.

Dampak Pengangguran Dalam Islam

Dampak Pengangguran dari sisi agama sebagai berikut:¹¹²

1. Membahayakan terhadap akidah.

Para penganggur harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kondisinya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ada banyak orang miskin yang karena ketidakberdayaannya secara ekonomi tidak pernah mengenal Tuhan atau kufur. Mereka tidak pernah pergi ke masjid untuk melaksanakan kewajibannya yaitu sholat sebagaimana mereka tidak pernah berpuasa. Banyak orang seperti ini akhirnya berpindah ke agama lain karena adanya bantuan-bantuan ekonomi yang mampu menyejahterakan hidupnya.

¹¹²Moh. Subhan, *Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam*,... h.29-30

Mengingat beratnya godaan-godaan yang dialami para penganggur, maka mereka harus pandai-pandai membentengi keimanannya dengan sabar dan syukur. Dengan sikap seperti ini orang-orang miskin akan bisa tangguh menghadapi godaan-godaan yang bisa menggoyahkan imannya.

2. Membahayakan terhadap akhlak.

Orang miskin lebih-lebih yang hidup di tengah-tengah orang kaya akan banyak mendorong mereka untuk berbuat yang tidak dibenarkan syara' dan akhlak mulia. Karena itu kita sering mendengar semboyan "rintihan perut lebih hebat dari rintihan hati nurani" dan lebih hebat lagi bila frustrasi dan kekacauan sudah tidak bisa dikuasai lagi akan timbul masa bodoh terhadap nilai-nilai etika dan kemantapan sendi-sendi yang pada gilirannya akan menjurus pada pengabaian nilai-nilai agama.

3. Membahayakan terhadap kelangsungan rumah tangga.

Pengangguran dapat mengancam keluarga dalam beberapa segi, baik segi pembinaan, kelangsungannya maupun pemeliharannya. Dalam segi pembinaan menuju rumah tangga semisal seorang jejaka yang ingin menikah, ia harus memikirkan bagaimana membayar mahar dan memberi nafkah, dengan ia pada posisi pengangguran ia mengalami kesulitan untuk mewujudkan impiannya menuju ke pelaminan. Oleh karenanya, Al-qur'an memerintahkan bagi para pemuda yang belum mampu menikah untuk memelihara kehormatan. Dalam segi pemeliharaan dan kelangsungan rumah tangga, pengangguran sering mendorong kepada hal-hal yang tidak baik antara suami istri, bahkan tidak jarang akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. karena ketidaksukaan istri kepada suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Cara Mengatasi Pengangguran Dalam Islam

Cara mengatasi pengangguran dalam islam dapat dilakukan dengan cara:¹¹³

- a. Melalui kegiatan pendidikan dan dakwah yang efektif dan membangun pemahaman fiqh serta pemahaman ajaran Islam dengan memberikan dorongan kepada masyarakat tentang pentingnya bekerja.

Banyak alquran dan Hadits mengenai pentingnya kita bekerja untuk mendapatkan keuntungan didunia dan pahala di akhirat nanti, hal ini ada dalam dalam firman Allah yaitu ;

1. QS. At-Taubah [9]:105

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

2. QS. Al-Kahfi [18]:79

Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

3. QS. Al-Qashas [28]:26 - 27.

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

4. QS. Ash-Shaffat [37]:61

Artinya: Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.

5. QS. Az-Zumar [39]:39

Artinya Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja(pula), maka kelak kamu akan mengetahui,

¹¹³Ali Murtadho, *Solusi Problem Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 28 No 1, Juni 2013, h, 184

6. QS. Al-Fushilat [41]:5
Artinya: Mereka berkata: "Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula)."
7. QS. Al-Insyiqaq [84]:6
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.
8. QS. Al-Ghaasyiah [88]:3
Artinya: Bekerja keras lagi kepayahan,

Selain menjadi sebuah kewajiban, Islam juga memberikan penghargaan mulia untuk setiap pemeluknya yang dengan ikhlas dalam bekerja dan mengharapkan keridhaan Allah SWT dan penghargaan tersebut tertuang dalam beberapa riwayat hadits berikut ini.¹¹⁴

1. Akan Diampuni Dosanya Oleh Allah SWT
Ibnu Abbas ra berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa yang merasakan kelelahan pada sore hari, karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah SWT pada sore hari tersebut.' (HR. Imam Tabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Ausath VII/ 289)
2. Dihapuskan Dosa Tertentu
Beberapa dosa tertentu juga akan dihapuskan dimana beberapa dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan melaksanakan shalat, puasa dan juga shadaqah.
Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan shalat, puasa, haji dan juga umrah.' Sahabat bertanya, "Apa yang bisa meng-

¹¹⁴ Ali Murtadho, *Solusi Problem Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,... h. 185

hapuskannya wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab, *“Semangat dalam mencari rizki”*. (HR. Thabrani, dalam Al-Mu’jam Al-Ausath I/38)

3. Mendapat Cinta Allah SWT

Ibnu Umar ra bersabda, *‘Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang mu’min yang bekerja dengan giat’*. (HR. Imam Tabrani, dalam Al-Mu’jam Al-Aushth VII/380)

4. Lebih Baik Dari Meminta-Minta

Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, *“Sungguh, seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik, daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Meraih Sisi Allah Dengan Taat

Abu Zar dan Al-Hakim, *“Sesungguhnya Ruhul Qudus membisikkan bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Karena itulah kamu harus bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. Jika datangnya rezeki itu terlambat maka jangan memburunya dengan bermaksiat karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan taat pada-Nya.”*

6. Makan Dari Hasil Sendiri

Hadits riwayat Bukhari, *“Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.”* (HR. Bukhari)

7. Serupa Dengan Mujahid di Jalan Allah

Hadits riwayat Ahmad, *“Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah.”*

- b. Menciptakan dan menanamkan jiwa wirausaha para warga melalui kegiatan pendidikan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha mandiri dan mendukungnya dengan

aliran modal yang memadai. Ini bisa ditempuh dengan memberdayakan instrument perekonomian Islam seperti zakat, infaq, sedekah maupun wakaf yang lebih berorientasi pada produktifitas, dengan didukung lembaga keuangan Islam yang sudah ada semisal perbankan Syari'ah dan Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) yang tentunya harus beroperasi Islami secara substansial bukan formalnya saja.

- c. Dan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun dan menegakkan landasan hukum yang mampu mengatasi tindakan-tindakan kontra produktif bagi kebijakan-kebijakan pemberantasan pengangguran tersebut.

Selain itu cara lain dalam mengatasi pengangguran dalam islam dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme Individu dan mekanisme sosial ekonomi.¹¹⁵

1. Mekanisme Individu

Dalam mekanisme ini pemerintah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja dihadapan Allah SWT, serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Banyak nash Al-Quran maupun As-Sunnah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT QS Al-mulk ayat 15:

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Jelas, Islam mewajibkan kepada individu untuk bekerja. Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja maka pemerintah berkewajiban untuk memaksa individu bekerja

¹¹⁵Naf'an, *Ekonomi Makro*, ... h.141

serta menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk di dalamnya pendidikan.

2. Mekanisme Sosial Ekonomi

Mekanisme ini dilakukan melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran yaitu:

- a. Negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.

Rasullullah SAW bersabda:

Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya. (HR al Bukhori dan Muslim).

Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan disektor riil baik dibidang pertanian dan kehutanan, kelautan dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, yaitu tidak mewajibkan wanita untuk bekerja, apalagi dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai Ibu rumah tangga dan manajer rumah tangga. Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki. Dengan kebijakan ini wanita kembali pada pekerjaan utamanya, bukan menjadi pengangguran, sementara lapangan pekerjaan sebgian besar akan diisi oleh laki-laki, kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh wanita.

- b. Negara menjamin jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan), dimana Islam melalui Negara menjamin pemenuhan-

nya melalui mekanisme yang bertahap dan secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum dan kemashalatan hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar adalah Negara.

- c. Negara harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara adil

Hubungan ketenagakerjaan didalam pandangan islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkannya. Sebaliknya pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepadanya.

Itulah mekanisme Islam yang bisa mengatai pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara adil. Ini hanya akan terwujud jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Islamiyah.

Kesimpulan

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja

yang ada yang mampu menyerapnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.

Pengangguran juga Tidak hanya berdampak pada perekonomian saja, namun juga berdampak pada masyarakat. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi menggambarkan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan. Namun mereka tetap dituntut untuk memenuhi hidup diri sendiri dan keluarganya, sehingga mereka akan melakukan apasaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Inilah yang memicu terjadinya pencopetan, perampokan dan tindak kriminal lainnya.

Pengangguran dapat diatasi dengan melakukan peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global.

Pengangguran dalam islam dapat diatasi dengan mengeksplorasi pesan pesan normatif dari Alquran dan Hadits dengan cara menanamkan lebih dalam lagi mengenai agama tentang pemahaman pentingnya bekerja untuk kebutuhan di dunia dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk keuntungan di akhirat nanti serta menciptakan jiwa wirausaha yang bisa produktif secara mandiri, bukan yang hanya mengharapkan kesempatan diberi kerja.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>
Naf'an, (2014), *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hal 354

Jurnal Ilmiah

- Hasanah, Norfaath, *Pengaruh Migrasi Masuk Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Kota Pekanbaru*, Jomfekon, Vol. 2 no. 1 Februari 2015, hal 5
Hasbiyah, Sitti, *Penguatan Ekonomi dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Makassar*, Jurnal Ekonomi Volume 2 Nomor 1 Juni 2014, hal 30
Hia, Yulna Dewita, *Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran*, Journal of Economic and Economic Education Vol. 1 No. 2, 2013, hal 212
Linggi, Dian, *Analisis Tingkat Pengangguran di Kab. Banggai Tahun 2009-2013*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hal 167
Mada, Muhammad, *Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Terdidik Di Indonesia*, JIEP-Vol. 15, No 1 Maret 2015, h. 37
Murtadho Ali, *Solusi Problem Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 28 No 1, Juni 2013, h, 184
Subhan, *Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam*, JES, Volume 3, Nomor 1, September 2018, h. 28-29
Suraji, *Pengangguran Dari Perspektif Ekonomi dan Pemikiran Ibn Khaldun*, Jurnal Mimbar, vol 8 n0 17, 2015, hal 7,
Syahril, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 2, November 2014, hal 80
Wardiansyah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran*, e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5. No. 1, Januari - April 2016, hal 15

Zarkasi, *Pengaruh Pengangguran Terhadap daya Beli Masyarakat Kalbar*, Jurnal Khatulistiwa - Journal Of Islamic Studies Volume 4 Nomor 1 Maret 2014, hal 52

Makalah Ilmiah dan Artikel

Nasri, Warda, *Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia*, hal 7, <http://repo.unand.ac.id/5117/>

BIOGRAFI PENULIS

Kumaidi lahir di Teluk Kecimbang Sarolangun, 10 Mei 1990. Pendidikan dasar dan menengah ia tempuh di kampung halaman Sarolangun Jambi. Ia melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Plus Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur Jawa Barat. Pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Bukittinggi. Setelah menyelesaikan studinya ia pun bekerja di SMP IT menjadi bendahara sekolah dan guru kelas, dan juga pernah menjadi karyawan salah satu PT Sawit di Provinsi Bengkulu. Tahun 2018 ia memutuskan untuk melanjutkan studi S2 di IAIN Bukittinggi dengan jurusan yang sama. Semasa mahasiswa, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bukittinggi, Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Al-Irsyad, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam dan Dewan Mahasiswa (DEMA FEBI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi. Sering terlibat aktif di beberapa forum diskusi kajian kritis mahasiswa dan pemuda di Sumatera Barat, saat ini ia dan beberapa temannya membentuk sebuah institusi kajian ekonomi yang di beri nama *Dangau Tuo Institute*. Sebuah lembaga yang memfokuskan kepada kajian ekonomi.

Elsa Monicha Lahir di Bukittinggi, 02 Januari 1995. Bertempat tinggal di Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam Sumatera Barat. Icha adalah panggilan akrabnya, anak pertama dari 5 bersaudara pasangan Bapak Amrizal dan Ibu Arneti. Pendidikan mulai dari TK tahun 1999 sampai SMA 2012 diselesaikan di kampung halamannya Nagari Sungai Pua. Tahun 2016 menyelesaikan studi S1 jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi. Semasa mahasiswa ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam,

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bukittinggi, Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Al-Irsyad dan UKM Seni IAIN Bukittinggi. Tahun 2017 memulai karir di dunia usaha, membuka bisnis berjualan baju/pakaian dengan sistem wadiah (*titipan*), untuk menambah pengalaman di dunia usaha ia juga bergabung di Serikat Saudagar Nusantara Bukittinggi, Forum Kewirausahaan Pemuda SUMBAR dan Penggiat Forum Literasi Agama. Dalam perjalanan hidup ia terinspirasi dari kata-kata pengusaha sukses Indonesia Bob Sadino "*Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, kamu tetap seorang pegawai, dan sekecil apapun usaha yang dipunya kamu adalah bosnya*" kata-kata itulah yang menjadi sebuah energi untuk menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Saat ini aktivitas di samping menyelesaikan S2 di IAIN Bukittinggi, ia juga mengembangkan usaha keluarga dalam bidang fashion, tidak hanya berjualan tetapi dengan memproduksi sendiri. Meskipun kesibukan kuliah dan aktivitas lainnya tidak menghalangi jiwa entrepreneur-nya surut, karena ia yakin dengan semangat mempelajari ilmu adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang lain yang tidak mengetahui adalah shadaqah, menyerahkan pada ahlinya adalah Taqarrub.

Ferdyanto lahir di Pakan Sinayan Agam, 5 Februari 1990 dari pasangan Bapak M. Nafis dan Ibu Husniati (Almarhumah). Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pendidikan dasar di SDN 40 Pakan Sinayan, pendidikan menengah pertama dan atas diselesaikan di Sumatera Thawalib Parabek pada tahun 2008. Menyelesaikan studi S1 nya di IAIN Bukittinggi. Pernah berkerja di Yayasan Pengembangan Ilmu Bukittinggi. Ia termasuk da'i muda yang terhimpun di wadah organisasi Himpunan Da'i dan Muballigh Kota Bukittinggi, dan termasuk pemerhati lingkungan alam wisata lokal minangkabau di Pakan Sinayan. Saat ini sedang menyelesaikan S2 Ekonomi Syariah di IAIN Bukittinggi.

Zulhendri lahir di Bukittinggi, 17 Oktober 1980. Pendidikan dasar dan menengah pertama ia tempuh di Kota Padang Panjang dari tahun 1987-1996, lalu ia melanjutkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Elektronika Komputer tahun 1999, setelah selesai di bangku sekolah ia memilih untuk vakum di dunia pendidikan beralih ke dunia kerja, lalu berbagai pertimbangan pada tahun 2013 ia melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan sekarang mengambil S2 di IAIN Bukittinggi dengan jurusan yang sama. Saat ini aktif di berbagai organisasi di antaranya adalah sebagai pengajar di Marqazul Qur'an Sumatera Barat dan instruktur HAPKIDO Sumbar.

Feri Irawan lahir di Padang, 10 Februari 1977. Pendidikan dasar dan menengah atas ia tempuh di Kota Solok. Pada tahun 2002 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Akuntansi, Universitas Bung Hatta Padang. Saat ini sedang melanjutkan studi S2 di IAIN Bukittinggi jurusan Ekonomi Syariah. Semasa mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Akuntansi Universitas Bung Hatta, pernah berkerja di beberapa perusahaan nasional, PT. Andalas berlian motor, PT. Djarum Super dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Jam Gadang (perseroda) kota Bukittinggi yang dalam proses konversi dari BPR konvensional ke BPR Syariah.

Fika Reflina lahir di Gumarang, 1 Januari 1993. Pendidikan sekolah dasar selesai tahun 2005 di Gumarang, MTsN 2 Bukittinggi tahun 2008, Sekolah MAN 2 Bukittinggi 2011, pada tahun 2011 melanjutkan studi S1 pada jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi. Sekarang sedang melanjutkan S2 di IAIN Bukittinggi dengan jurusan yang sama. Semasa mahasiswa pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bukittinggi, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam dan UKM

Pramuka. Adapun Aktivitas yang dilakukan saat ini adalah sebagai pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Palembangyan Kabupaten Agam.

Fauziah Nur. H lahir Medan, 30 Oktober 1990. Pendidikan dari SD, SMP, SMA di selesaikan di tanah kelahiran Sumatera Utara. Ia merupakan jebolan S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Setelah menyelesaikan studinya ia sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta di kota Medan tetapi hanya bertahan 2 tahun, lalu dia memutuskan untuk hijrah ke luar daerah untuk mencari peruntungan maka kota Bukittinggi Sumatera Barat yang menjadi tujuan. Saat ini di samping menyandang status sebagai ibu rumah tangga dia juga merupakan mahasiswi Pascasarjana jurusan Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi



BUATBUKU.COM

---- BUAT AJA DULU ----